



KILASAN KINERJA 2017 KEMENDIKBUD

NOVEMBER 2016 - NOVEMBER 2017

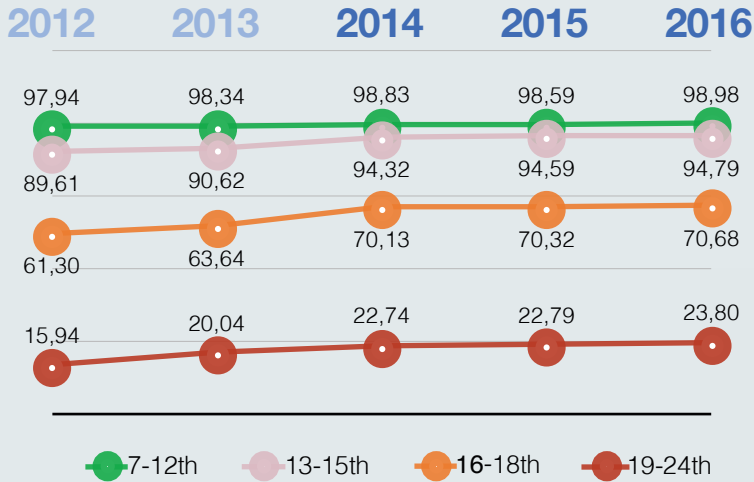


#kerja3ersama

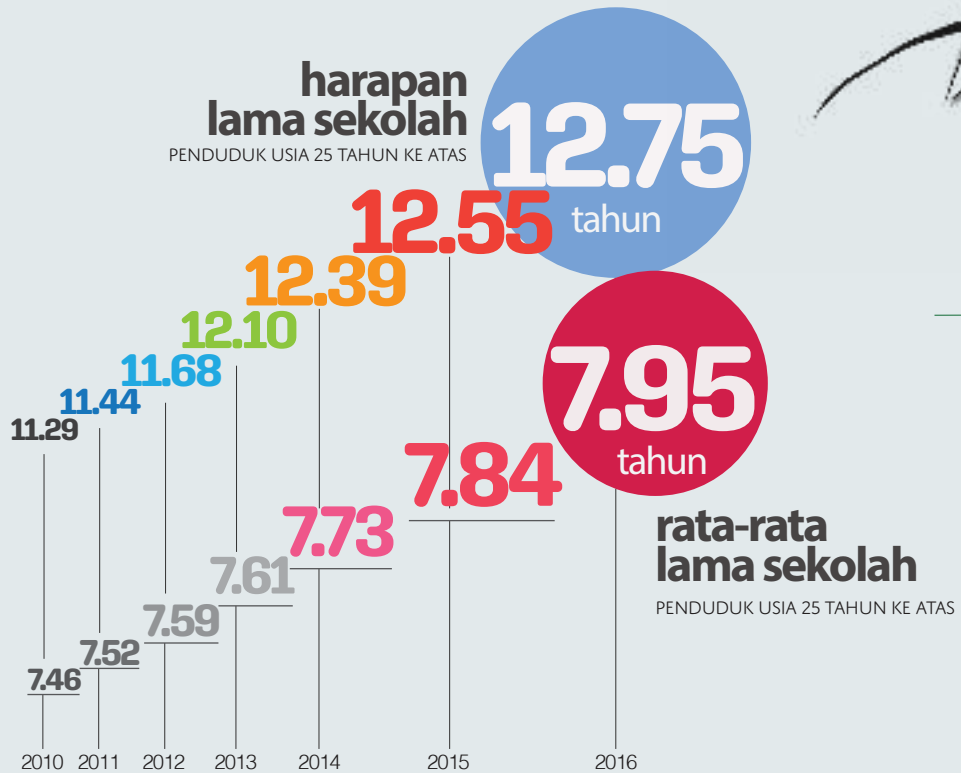
memeratakan pendidikan berkualitas,
mewujudkan insan berkarakter dan
memajukan kebudayaan

KILASAN KINERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2017

KILASAN KINERJA 3 TAHUN KEMENDIKBUD (2015-2017)



angka partisipasi sekolah menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir.



Program Indonesia Pintar

2015

- diberikan kepada **17.920.270** anak
- Prioritas bagi anak pemegang kartu PKH, KKS, KPS
- Penyaluran melalui **rekening tabungan** dan **rekening virtual**.
- Belum ditandai dengan kartu



Pendidikan Karakter

2015

- Penumbuhan Budi Pekerti (Permen dibud no. 23/2015) dengan **gerakan pembiasaan**-pembiasaan (membaca, menyanyikan lagu nasional, dsb.)
- Kawasan Bebas Asap Rokok di lingkungan Sekolah (Permendikbud no. 64/2015);
- Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud no. 82/2015) menciptakan **sekolah yang aman** dari perundungan dan kekerasan.

2016

- diberikan kepada **17.920.380** anak
- Prioritas bagi anak pemegang kartu PKH, KKS, KPS
- Penyaluran melalui **rekening tabungan** dan **rekening virtual**.
Ditandai dengan **Kartu Indonesia Pintar** (KIP) sebanyak 17.927.308 kartu
- Pencetakan kartu berdasarkan **Basis Data Terpadu**
- Ujicoba **pemanfaatan PIP Non Tunai** di Yogyakarta. Siswa bisa membelanjakan dana PIP secara non tunai pada *merchant* yang bermitra dengan bank.

2016

- Terbit **Permendikbud no. 8/2016**, mengatur tentang buku teks dan non-teks pelajaran harus mencantumkan informasi **para pihak yang bertanggung jawab** terhadap isi buku. Bisa menjadi kontrol bila ditemukan konten buku yang tidak sesuai.
- Terbit **Permendikbud no. 18/2016**, mengatur pelaksanaan **Pengenalan Lingkungan Sekolah**, menghindari praktik perpeloncoan.
- Terbit **Permendikbud no. 75/2016**, mengatur penguatan **peran Komite Sekolah**.
- Terbit Naskah Akademik **Penguatan Pendidikan Karakter** (PPK).
- Uji Coba PPK pada **538** sekolah (jenjang SD dan SMP).
- Pelatihan PPK terhadap **309** Guru, **536** Kepala Sekolah, **36** Pengawas Sekolah dan **35** Komite Sekolah (jenjang SD dan SMP).

2017

- diberikan kepada **17.927.380** anak
- Diberikan kepada anak pemegang kartu PKH, KKS, KPS.
- Prioritas bagi pemegang KIP yang terdaftar di DAPODIK. Termasuk **siswa yatim, piatu** dan **siswa di panti asuhan**.
- Penyaluran melalui rekening tabungan (**Simpanan Pelajar**) penerima PIP.
- Ditandai dengan **Kartu Indonesia Pintar** (KIP) yang sekaligus sebagai kartu **ATM**.
- Pencetakan kartu menggunakan **Basis Data Terpadu**

#kerja**3**ersama

2017

- Terbit Peraturan Presiden Nomor 87/2017 tentang **Penguatan Pendidikan Karakter** (PPK);
- Peraturan Pemerintah no. 19/2017, **menyelaraskan beban kerja guru** dengan beban kerja PNS (40 jam per minggu).
- Penguatan peran kepala sekolah sebagai manajer.
- Implementasi piloting PPK pada **2.168** sekolah
- Pelatihan PPK terhadap **1.499** guru, **2.017** kepala sekolah, **453** pengawas dan **1.296** komite sekolah (SD dan SMP)
- **22** daerah mengimplementasikan PPK secara mandiri;
- **4.552 KKG/MGMP** (+45 ribu sekolah) dan **244 MKKS** (+1.200 sekolah) mengikuti PPK

Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan

2015

- Menyiapkan Draft Inpres
- Tahap awal penyusunan peta jalan
- Transisi Penyelarasan Kurikulum
- Kekurangan guru produktif
- Tidak ada data Lembaga Sertifikasi di SMK dan PPPPTK

2016

- Terbit Inpres No. 9/2016
- Peta Jalan 2030
- Naskah Akademik Vokasi
- 56,7% struktur kurikulum selaras dengan DUDI dan SKKNI
- Merekrut 12.740 guru untuk program keahlian ganda
- Memberikan bantuan SMK Prioritas : 39 SMK Kelautan/Kemaritiman, 66 SMK Pariwisata, 32 SMK Pertanian
- kerjasama dengan 9 K/L dan 8 DUDI
- 321 SMK menjadi LSP-P1, 4 PPPPTK menjadi LSP-P2, 1.146 Lembaga Kursus menjadi TUK

2017

- 89,25% struktur kurikulum selaras dengan DUDI dan SKKNI
- 12.740 guru dilatih untuk menjadi guru produktif
- 15.000 guru PKG rekrutmen lanjutan
- Pemberian bantuan SMK Prioritas : 50 SMK Kelautan/Kemaritiman, 50 SMK Pariwisata, 100 SMK Pertanian
- Kerja sama dengan 9 K/L dan 16 DUDI
- 3.574 Industri bekerja sama dengan SMK
- Terdapat 219 SMK Rujukan
- 421 SMK menjadi LSP-P1, 6 PPPPTK menjadi LSP-P2, 1.304 Lembaga Kursus menjadi TUK



#kerja

Ujian Nasional

2015

- UN tak lagi menjadi syarat kelulusan.
- memperkenalkan **Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)** pada 554 Sekolah.
- Peserta UNBK sebesar 2%
- mengurangi praktik kecurangan dengan memperkenalkan **Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN)**
- Siswa wajib mengikuti seluruh mapel UN
- **UN Perbaikan** dilaksanakan tahun berikutnya

2016

- UN tidak menjadi syarat kelulusan UNBK di **4.381** sekolah
- Peserta UNBK sebesar **12%**
- Hanya **21%** sekolah mendapat skor IIUN tinggi.
- Siswa wajib mengikuti UN sesuai mapel yang ditentukan.
- **UN Perbaikan** dilaksanakan pada tahun yang sama.

2017

- UNBK diselenggarakan pada **33.448** Sekolah
- Peserta UNBK sebesar 49%
- Memperkenalkan **Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)** untuk mapel yang tidak diujikan pada UN
- **70%** daerah mendapat penilaian IIUN tinggi
- **Guru-guru dilatih** dan diberi tugas menyusun soal USBN melalui KKG/MGMP
- Siswa SMA diberi **kesempatan memilih** satu mapel pilihan sesuai minatnya masing-masing
- **4,7%** sekolah bergabung ke sekolah penyelenggara UNBK (*resource sharing*)
- Terdapat **UN Gelombang II** untuk Paket C dan Paket B.

sarana & prasarana

DALAM TIGA TAHUN PEMERINTAHAN

1.191 unit sekolah baru

239 SD&SMP Satu Atap

52 SMP berasrama

25 Asrama PKLK

27.671 ruang kelas baru

4.649 ruang perpustakaan

6.419 ruang perpustakaan

379 ruang UKS

rehabilitasi **67.253** ruang belajar

Bersama

pemajuan kebudayaan

DALAM TIGA TAHUN PEMERINTAHAN

merevitalisasi **132** museum

membangun **13** museum

merevitalisasi **57** cagar budaya

merevitalisasi **34** taman budaya

memfasilitasi **1.115** komunitas

memfasilitasi **1.083** sarana kesenian

1.108

906

814

1.003



1.000

1.142

1.266

558

pencatatan warisan budaya tak benda



KILASAN KINERJA 2017 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pelindung:

Didik Suhardi *didik.suhardi@kemdikbud.go.id*

Penanggung Jawab:

Hendarman *hendarman@kemdikbud.go.id*

Pengarah Materi:

Azis Purwanto *azis.purwanto@kemdikbud.go.id*

Kurniawan *kurniawan@kemdikbud.go.id*

Moch. Abduh *moch.abduh@kemdikbud.go.id*

Rusprita Putri Utami *rusprita.utami@kemdikbud.go.id*

Kontributor artikel:

Seluruh unit utama Kemendikbud

Editor:

Annisa Dwi Astuti *annisa.astuti101@kemdikbud.go.id*

Ashma Nur Afifah *ashma.afifah01@kemdikbud.go.id*

Desliana Maulipaksi *desliana.maulipaksi@kemdikbud.go.id*

Dwiyani Widhiharsi Kusuma Putri *dwiyani.widhiharsi@kemdikbud.go.id*

Indra Budi Setiawan *indra.budi@kemdikbud.go.id*

Namira Assagaf *namira.assagaf01@kemdikbud.go.id*

Marista Sinaga *marista.sinaga@kemdikbud.go.id*

Ratih Anbarini Ratih *anbarini@kemdikbud.go.id*

Editor Foto:

Azis Purwanto *azis.purwanto@kemdikbud.go.id*

Desain Sampul dan Tata Letak :

Azis Purwanto *azis.purwanto@kemdikbud.go.id*

Prista Rediza *redizaredi@gmail.com*

Sekretariat:

Ana Arham *ana.arham07@kemdikbud.go.id*

Yuliah Suwarni *yuliah.suwarni@kemdikbud.go.id*

Kuangan:

Rusprita Putri Utami *rusprita.utami@kemdikbud.go.id*

Rika Hidayat *rika.hidayat@kemdikbud.go.id*

Diterbitkan oleh:

Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat – 10270

KILASAN KINERJA 2017 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ISBN 978-602-73386-4-7

TAKRIF:

SILA HUBUNGI SURAT ELEKTRONIK DI ATAS

UNTUK MENDISKUSIKAN ISI BUKU INI LEBIH LANJUT



SEBUAH KILASAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Namo Buddhaya,
Om Swastiastu,
Shalom,*

Buku ini adalah sebuah kilasan atas kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selama periode November 2016 hingga November 2017. Di tahun ke-3 ini, Kemendikbud terus berusaha untuk memperluas akses pelayanan dan meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan dalam upaya pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Menipiskan kesenjangan antar warga, antar wilayah.

Saya berharap buku ini menghadirkan sudut pandang baru dalam informasi, sekaligus menjadi bahan refleksi atas perjalanan kebijakan pendidikan dan kebudayaan Indonesia selama tahun 2017. Walau sudah banyak yang dilaksanakan, masih banyak lagi pekerjaan yang harus dilakukan secara bersama untuk menciptakan ekosistem pendidikan dan kebudayaan bagi manusia Indonesia yang lebih baik.

Keterlibatan dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat merupakan keharusan untuk membangun pendidikan dan kebudayaan untuk memastikan pembangunan manusia Indonesia. Kami pun memanggil Anda, para pembaca buku ini, untuk terus berkarya dan mempersembahkan karya terbaik untuk bangsa.

Selamat membaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,
Namo Buddhaya,
Om Swastiastu,
Shalom*

Jakarta, November 2017

Muhadjir Effendy
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

KILASAN KINERJA 2017

KEMENDIKBUD

DAFTAR ISI

- III Sebuah Kilasan
- IV Daftar Isi
- XII Pendahuluan

Program Prioritas Kemendikbud

1 Memeratakan Kesempatan Belajar dengan PIP



11 Tingkatkan Daya Saing Bangsa lewat Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan



14 Penyelarasan Kurikulum dan Kerja Sama DUDI



16 Meningkatkan Daya Saing Bangsa Melalui Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan di Lembaga Kursus dan Pelatihan

18 pengiriman Guru Produktif ke Perancis dan Jerman



21 Percepat Penyediaan Guru Produktif SMK

27 Menguatkan Ruh Pendidikan Bangsa

34 Implementasi Kurikulum 2013

38 Penguatan Bela Negara dalam Kurikulum 2013



42 Negara Hadir Mewujudkan Buku Murah, Bermutu, dan Merata

44 Gerakan Literasi Nasional

47 Gerakan Memberantas Tunaakstra pada Suku Terasing di Papua



52 Apresiasi Orang Tua Hebat

56 Mendulang Prestasi, Berbekal Kejujuran

Perluasan Akses, Peningkatan Kualitas

- 60** Sertifikasi Guru: Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru
- 61** Beragam Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan



- 64** Simposium Guru: Bukan Sekedar Guru Biasa
- 65** Bantuan Pemerintah Kepada KKG/MGMP Tahun 2017
- 67** Perluas Akses dengan Pelibatan Masyarakat untuk Pendidikan yang Merata dan Berkualitas
- 72** Kejar Target Satu Desa Satu PAUD

- 74** Meluaskan Akses Teknologi Pendidikan, Mencerdaskan Anak Bangsa

- 76** Guru Garis Depan Pelopor Pendidikan Daerah 3T

- 79** Sastrawan Berkarya

- 81** Budayakan Kesenian Indonesia hingga ke Pelosok Negeri





82 Model Layanan Kurikulum 2013 di Papua

84 Tugas Mulia di Negeri Tetangga



87 Mencipta Tradisi Prestasi, Menanamkan Budi Pekerti dan Cinta Tanah Air

91 Sistem Zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru: Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia

94 PROGAS 2017: Menciptakan Penerus Masa Depan Yang Cerdas Melalui Gizi yang Sehat



96 DAPODIK: Data Tunggal Basis Berbagai Program

98 Percepatan Pendidikan Non-Formal: Sistem Belajar Online untuk Mengakomodir Kebutuhan Belajar Peserta Didik



100 Beragamnya Peserta UNPK Paket B: dari Buruh Migran Hingga Atlet Nasional

103 Memberi Ruang Kepada masyarakat Untuk memajukan Budaya

105 Revitalisasi Warisan Budaya dan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda

110 Penggiat Budaya, Jembatan Masyarakat dengan Pemerintah



112 Revitalisasi Desa Adat
Membangun Kembali
Kesadaran Akar Tradisi

113 Registrasi Nasional Cagar
Budaya Sebagai Sumber
Informasi Pengembangan
Kebudayaan Nasional



115 Komunitas Budaya Berperan
Dalam Melestarikan Budaya
Bangsa

117 Dialog Nasional
Merawat Keutuhan NKRI



119 Penguatan Pelaku
Kebudayaan Melalui
Anugerah Kebudayaan dan
Maestro Seni Tradisi



122 Belajar Bersama Maestro

125 Gerakan Seniman Masuk
Sekolah Untuk Penumbuhan
Budi Pekerti

127 Europalia Arts Festival
Indonesia Membawa Wajah
Indonesia ke Eropa



129 Peduli Histori Yang Tak
Setengah Hati

131 Dari Palu Untuk Nusantara

132 Warisan Industri Peradaban

133 Pameran Besar Seni Rupa
ke-5 di Ambon





136 Merayakan Kemerdekaan Dengan Menggratiskan Museum dan Cagar Budaya

139 Harmonisasi Musik Kontemporer dan Tradisional dalam Satu Kolaborasi Budaya



140 Kekayaan Arkeologi di Gedung Artefak Banten, Trowulan, dan Pacitan Tahun 2017

142 Rumah Peradaban Sebagai Media Memahami Sejarah Dan Nilai Budaya

146 Mendekatkan Pengayaan Bahasa Melalui Aplikasi KBBI

148 Laboratorium Kebinekaan Bahasa Untuk Merawat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa



150 Peta Khazanah Kebinekaan Indonesia



152 Menebar Bahasa Indonesia Ke Penjuru Dunia



155 FFI 2016 & 2017:
Optimisme Perkembangan
Film Tanah Air

162 Mendorong Interaksi Publik
Melalui Media Sosial

159 Memajukan Dan
Melestarikan
Perfilman Indonesia

168 Pelibatan Publik Dalam
Mengawal Pengelolaan
Pendidikan Oleh Pemerintah
Daerah



171 TV Edukasi : Mengedukasi
Lewat Televisi



173 Rumah Belajar :
Belajar Dimana Saja,
Kapan Saja

Tata Kelola Pendidikan yang Berintegritas

176 Tunas Integritas Sebagai Agen Perubahan

178 Perkembangan Reformasi Birokrasi Internal Di Kemendikbud



182 Konsistensi Kemendikbud Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Tranparansi Pengelolaan Anggaran Pendidikan

184 Kerja Cerdas dengan E-OFFICE

186 Monitoring Online Laporan Keuangan (MOLK) Sistem Informasi Manajemen Keuangan Kemendikbud

189 Penutup

190 Daftar Akronim

191 Kredit Foto

192 Terimakasih



BERUBAH UNTUK MAJU

Memasuki tahun ke-tiga perjalanan pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, Kemendikbud terus berusaha untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan. Tahun pertama pemerintah menyiapkan pondasi yang menyokong pewujudan cita-cita, tahun kedua mempercepat langkah dan bekerja secara nyata mewujudkan cita-cita, maka pada tahun ke-tiga pemerintah berjanji memeratakan hasil-hasil pembangunan, hasil kerja bersama kita. Sinergi dengan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan program-program prioritas, akan berdampak makin banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Buku Kilasan Kinerja Tahun Ketiga ini disajikan dalam tiga tema yaitu Program Prioritas Kemendikbud, Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Pendidikan yang Berintegritas. Semua tema bermuara pada penjabaran implementasi Nawacita. Program Prioritas terkait dengan fokus utama yang diamanahkan kepada Kemendikbud yaitu Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan, dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), termasuk di dalamnya Peninjauan Ujian Nasional.

Tahun ini PIP diperluas target penerimanya dengan memperluas penerima manfaat, menjangkau anak-anak kita yang yatim, yatim-piatu dan mereka yang tinggal di panti asuhan, serta peserta didik non-formal. Ini adalah upaya pewujudan bahwa Negara harus memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan yang kita jalankan adalah upaya menyongsong masa depan Indonesia, menyiapkan generasi yang tangguh berdaya saing mnejawab tantangan pada masa depan. Penyelarasan kurikulum, pemenuhan guru, sinergi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri kita jalankan sesuai rancangan, dan kita berharap akan menuai hasil yang baik pada saatnya.

Karakter sebagai ruh pendidikan harus kita kembali kuatkan melalui Penguatan Pendidikan Karakter merupakan implementasi dari revolusi mental. Banyak yang harus digarap guna mencapai tujuan kita bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak-anak kita tak hanya perlu pintar membaca-menulis-berhitung, melainkan harus dibentuk menjadi generasi yang cerdas berkarakter Indonesia. Ini tak bisa diwujudkan hanya dengan diajarkan di dalam kelas, kare-



nanya kerja bersama antara sekolah, keluarga dan masyarakat perlu diwadahi. Keluarga perlu diperkuat perannya sebagai pendidik yang utama, para guru di sekolah harus menggali potensi setiap anak dan “tut wuri handayani” mendorong tumbuh kembang karakter setiap anak, sedangkan lingkungan masyarakat juga berperan memberikan penguatan karakter setiap anak.

Ujian Nasional masih diperlukan untuk pengukuran kualitas pendidikan kita. Tahun ini ada kebaruan yang kita lakukan, dengan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam penyelenggaraannya. Tak hanya bicara mengenai efisiensi dan efektivitas, Ujian Nasional Berbasis Komputer tentunya berkaitan turun drastisnya praktik-praktik kecurangan yang sebelumnya marak terjadi. Kejujuran adalah buahnya. Indeks Integritas UN naik drastis. Ada lagi yang kita sudah lakukan, yaitu meningkatkan standar ujian sekolah, menjadi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Agar berstandar nasional, ribuan guru telah ditingkatkan kompetensinya dan mereka bekerja keras menyusun soal-soal USBN yang diujikan di setiap wilayah Indonesia.

Kita juga sedang mengupayakan pemerataan mutu pendidikan di sekolah-sekolah kita. Tak boleh ada lagi sumberdaya yang terkumpul pada beberapa sekolah saja; murid-murid terpilih terkumpul di suatu sekolah, guru-guru terbaik ber-

kumpul di suatu sekolah, sarana prasarana yang dicurahkan. Sistem zonasi yang kita terapkan mulai tahun ini, bertujuan untuk pemerataan sumberdaya pendidikan, sehingga pada ujungnya akan terjadi pemerataan kualitas pendidikan.

Usaha pemerintah untuk terus pemeratakan layanan pendidikan dan kebudayaan di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya gerakan literasi nasional, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pembangunan sarana dan prasarana, menghadirkan Negara di wilayah “pinggiran”. Selain itu juga terdapat terobosan Kemendikbud di bidang kebudayaan, bahasa dan perfilman termasuk di dalamnya pengesahan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan serta program-program unggulan di bidang kebudayaan dan bahasa seperti Europalia, Revitalisasi Warisan Budaya, Peluncuran KBBi versi 5, Peta Persebaran Daerah dan program lain yang tidak kalah menarik.

Tata kelola pendidikan yang berintegritas adalah pengejawantahan Kemendikbud dalam reformasi birokrasi. Kemendikbud terus berusaha untuk memperbaiki diri, meningkatkan transparansi dan semakin efektif dan efisien dengan adanya Tunas Integritas, kerja cerdas dengan pemakaian e-office, Monitoring Laporan Keuangan sehingga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan keuangan. ■



26 JANUARI 2017

KEASIAN GAMES
2018
Jakarta Palembang



Presiden Jokowi berdialog singkat dengan beberapa yatim/piatu penerima KIP yang berasal dari panti asuhan.

MEMERATAKAN KESEMPATAN BELAJAR DENGAN PIP

Keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung (miskin) tak boleh luntur, tak boleh menyerah oleh kesulitan untuk menyentuh mereka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Kabinet Paripurna, 3 Januari 2017 menyampaikan fokus kerja pemerintahan saat ini adalah pemerataan. Karena itu, Presiden berharap hasil-hasil pembangunan harus bisa dinikmati oleh masyarakat secara lebih luas. Artinya, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, maupun kelompok masyarakat di desa dan kota harus diupayakan semakin tipis.

Menurut Presiden, manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan

Kartu Indonesia Sehat (KIS), harus bisa menjadi sarana untuk mewujudkannya. Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi pun menyampaikan kepada seluruh menteri agar fokus kepada pemerataan hasil kerjanya. Lebih spesifik, Presiden meminta agar Program Indonesia Pintar (PIP) menyentuh anak yatim di seluruh Indonesia agar menjadi penerima manfaatnya.

Pada 2016 diperkirakan sejumlah 4,1 juta anak tidak sekolah. KIP ternyata hanya bisa menarik sebanyak 24

ribu anak kembali ke sekolah formal maupun non formal. Itu lah hasil evaluasi yang dibahas bersama Komisi X DPR, selang beberapa hari sebelum sidang kabinet. Direkomendasikan untuk mengurangi sasaran penerima PIP, dan mengalihkan sebagian dananya untuk program yang lain.

Argumen lain yang mendukung adalah penurunan angka kemiskinan, sehingga asumsinya masyarakat yang membutuhkan PIP pun berkurang. Namun, hal ini rupanya lain dengan apa



Pesan-pesan Presiden Jokowi saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, awal tahun 2017, dituangkan dalam goresan grafis.



Kini, dana Program Indonesia Pintar disalurkan dalam bentuk Simpanan Pelajar atas nama penerima. Terlihat dalam gambar, seorang anak memperlihatkan buku tabungan yang baru saja diterimanya.

Kartu Indonesia Pintar diberikan agar mereka kembali ke sekolah.



**Pada 2015 terdapat
51.541 anak usia SMP
putus sekolah.**

jumlah besar di antaranya adalah
10.139 anak di Jawa Barat,
4.783 anak di Jawa Timur,
4.119 anak di Sumatera Utara,
2.890 anak di Sumatera Selatan

**Pada 2015 terdapat
68.066 anak usia SD
putus sekolah.**

jumlah besar di antaranya adalah
8.080 anak di Jawa Barat,
3.240 anak di Jawa Timur,
7.621 anak di Sumatera Utara,
4.252 anak di Sumatera Selatan

yang dipikirkan oleh Presiden Jokowi.

Keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung (miskin) tak boleh luntur, tak boleh menyerah oleh kesulitan untuk menyentuh mereka.

Terkait hal itu, Menteri Muhadjir pun, sigap melaksanakan perintah Presiden. Mengingat hal itu adalah bagian dari janji pemerintahan Jokowi - JK.

"Ada 44.507 anak yatim piatu di seluruh Indonesia yang nanti akan mendapat KIP," kata Menteri Muhadjir di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2017). Data tersebut sudah ada di kementerian yang dipimpinnya, namun perlu waktu untuk verifikasi dan validasi. Dia janjikan, satu bulan cukup waktu untuk persiapan menyalurkan KIP kepada anak yatim piatu di seluruh Indonesia. Dia

pun menginginkan Presiden Jokowi berkesempatan untuk menyerahkan KIP secara langsung bulan berikutnya (Februari).

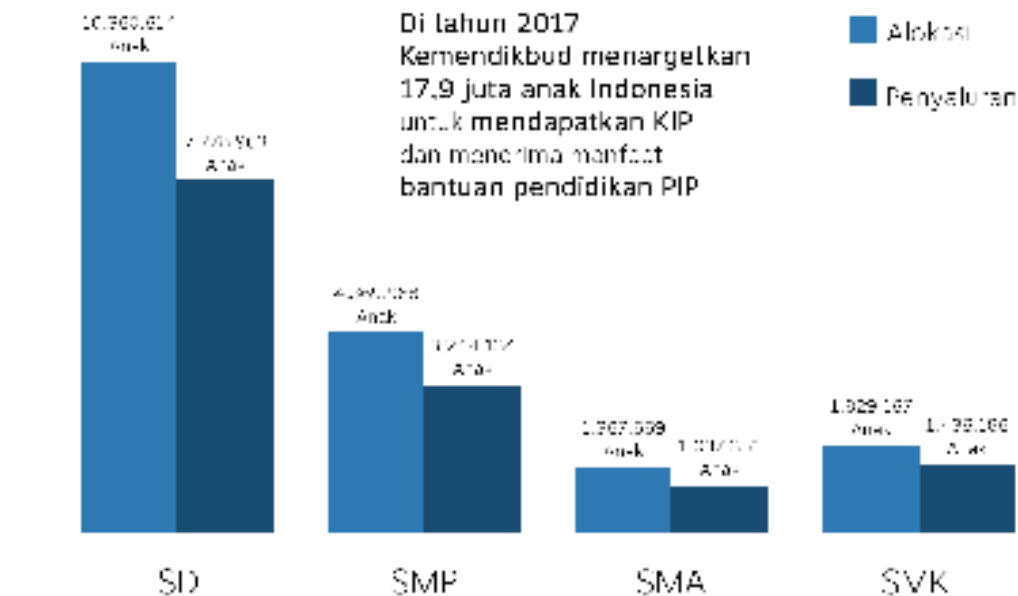
Tak hanya itu, PIP diberikan sebagai upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya warga yang kurang mampu. PIP hadir untuk menjamin keberlangsungan anak usia sekolah agar mendapat layanan pendidikan baik formal maupun nonformal. Contoh, pendidikan formal adalah sekolah dan madrasah, sedangkan nonformal adalah pondok, Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C yang belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan juga Peserta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Pada Oktober 2017 ini Kemendikbud telah berhasil menyalurkan 75% bantuan KIP

dengan terus mempercepat target pencairan dana PIP. "Kami optimis jika akhir tahun 2017 ini target pencairan KIP akan mencapai 90%. Untuk itu sangat diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, pihak Bank sampai Kepala Sekolah," ujar Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Dengan KIP ini saya bisa selangkah lebih maju meraih cita-cita sebagai Polisi Wanita (Polwan)," kata Wenda, salah satu siswa SMPN Negeri 1 Wamena yang mendapatkan KIP yang diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.

Hal yang sama juga disampaikan orangtua Lita, di SMAN 3 Garut yaitu bahwa dengan pemberian KIP dapat membantu meringankan bebannya menyekolahkan anak. "Lumayan, bisa membantu membeli



Status 1. November 2017

perlengkapan anak untuk sekolah,”.

Sedangkan berdasarkan data yang dimiliki Ditjen PAUD dan Dikmas, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, jumlah peserta didik Program Pendidikan Kesetaraan mencapai 775.300 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 500.000 orang adalah target utama pada tahun 2017 sebagai calon penerima PIP, karena usia kurang dari 21 tahun.

Sasaran tersebut pada umumnya adalah masyarakat marginal yang tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti pendidikan di jalur formal atau sekolah karena faktor ekonomi dan juga faktor geografis. Yaitu, yang bertempat tinggal di daerah terpencil, pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, atau wilayah lain yang sulit dijangkau sehingga tidak memperoleh akses layanan pendidikan formal.

Menanggapi masih adanya kendala yang dihadapi beberapa satuan pendidikan nonformal, Ulfah, Ketua PKBM Luthfillah, menduga proses dalam pengurusannya belum

lengkap. Misalnya, harus dilampirkan pula NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Karena ada satuan penyelenggara pendidikan yang tidak terverifikasi NPSN atau mungkin tidak dapat NISN-nya. “Apalagi sekarang sudah menggunakan sistem aplikasi dapodik (data pokok pendidikan). Anak didik kami yang terdaftar sudah di verval (verifikasi dan validasi, red) sebagai peserta didik. Kalau yang dimasukkan data saja, ya tidak ter-cover. Yang ter-cover adalah PKBM yang NPSN dan NISN-nya terverifikasi” ujarnya.

Saat ini, perbaikan PIP juga terus digulirkan. Bantuan yang disalurkan langsung kepada anak-anak kurang mampu ini diberikan dalam bentuk tabungan yang diberi nama Simpanan Pelajar. Ada pesan lain yang tersirat bahwa anak-anak perlu ‘melek’ pengetahuan finansial, perbankan. Dimana, ada pesan ajakan untuk menabung bagi para pelajar seluruh Indonesia. Tentu saja setiap penerima PIP juga harus lebih pintar mengelola dana yang diterimanya, seperti

berulang kali dipesankan Presiden Jokowi “Jangan uangnya dibelikan pulsa. Kalau ketahuan, akan dibatalkan PIP nya. Gunakan untuk hal-hal yang penting, untuk sekolah”.

Di tahun ketiga Pemerintahan Jokowi-JK ini, KIP diberi fungsi lebih dari hanya sekadar kartu identitas penerima PIP saja. Melengkapi tabungan Simpanan Pelajar, kartu KIP sekaligus bisa berfungsi sebagai kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Sehingga, anak-anak pun lebih mudah melakukan transaksi pemanfaatan dana PIP. Mereka pun tak harus lagi antri di teller bank untuk mengambil dana, karena bisa dilakukan di ATM yang lebih mudah dijumpai di berbagai tempat. ■



Simpanan Pelajar bagi penerima PIP adalah tabungan atas nama siswa. Kartu ATM melengkapi setiap Simpanan Pelajar, memudahkan penerima melakukan penarikan dana tanpa harus datang ke kantor bank..







TINGKATKAN DAYA SAING BANGSA LEWAT REVITALISASI PENDIDIKAN KEJURUAN DAN KETERAMPILAN



Menteri Muhadjir mencoba peralatan menjahit di SMKN3 Bengkulu.

Inti kekuatan daya saing sebuah bangsa terletak pada sumber daya manusianya. Tenaga kerja yang berdaya saing tinggi dan terampil seringkali dilahirkan dari pendidikan kejuruan dan keterampilan yang bermutu serta relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus menerus berkembang. Ini artinya, dunia pendidikan tidak punya pilihan kecuali harus mengikuti perubahan dan tuntutan perkembangan jaman.

Pengembangan pendidikan kejuruan dan keterampilan perlu dilakukan untuk menyiapkan tambahan 58 juta tenaga kerja yang memiliki kecakapan Abad ke-21 sehingga pada kurun 15 tahun mendatang mampu menghantarkan Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 dunia pada tahun 2030.

Menyikapi tantangan dimaksud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendapat tugas dari Presiden untuk melakukan Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan sebagaimana Nawacita 6 yang berbunyi "Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya". Secara pragmatis, pendidikan kejuruan dan keterampilan harus mampu menyiapkan lulusan yang siap bekerja secara profesional dan/ atau mampu berwirausaha untuk menggerakkan pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Lulusan berbagai lembaga pendidikan akan menjadi angkatan kerja yang siap memasuki pasar tenaga kerja

untuk mendukung proses pembangunan dan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya. Presiden juga telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia yang menjadi arah pembangunan pendidikan vokasi ke depan.

Menindaklanjuti inpres tersebut, pada tahun 2017, Kemendikbud meluncurkan sejumlah 219 SMK Revitalisasi yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani pada Jumat, 26 Mei 2017, di Halaman Parkir Stadion Manahan, Solo. Menko Puan Maharani optimistis program ini sangat strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia



Indonesia. “Saya apresiasi peluncuran Revitalisasi SMK bisa dilakukan dalam kesempatan ini. Jadi ada *link and match*,” kata Menko Puan.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan pencaanaan program revitalisasi SMK dilakukan terhadap 219 SMK, tahun ini. Sejumlah 219 SMK tersebut terdiri dari SMK bidang prioritas dan bidang keahlian penunjang. “Dari 219 SMK tersebut terdapat 125 SMK bidang-bidang prioritas seperti maritim, pariwisata, pertanian dan industri kreatif, dan juga 94 SMK bidang keahlian penunjang yang menjadi prioritas pembangunan nasional,” kata Menteri Muhadjir dalam sambutannya. Ditargetkan pada tahun 2020 nanti terdapat 1.650 SMK yang dapat menjadi rujukan dalam Revitalisasi.

Sejak peluncuran, masing-masing dari SMK ini membuat peta jalan rencana dan target revitalisasi yang akan dilakukan sampai akhir tahun. Dalam menjalankan peta jalan ini,

SMK Revitalisasi ini didampingi oleh pihak dari Perguruan Tinggi yang memfasilitasi proses revitalisasi yang terjadi di SMK yang menjadi tanggung jawabnya. Kegiatan Revitalisasi yang dilakukan di masing-masing SMK meliputi penyesuaian kurikulum, inovasi pembelajaran, peningkatan kualitas guru, peningkatan lulusan dan akreditasi dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana.

Semua SMK Revitalisasi ini sangat bersemangat dalam melakukan kegiatan revitalisasinya. Sebagaimana dilaporkan oleh Kepala SMKS Sadar Wisata Ruteng, Nusa Tenggara Timur, Bapak Wilhelmus “Kami sedang dalam proses persiapan *Teaching Factory* dari Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi. Ada untuk pembangunan ruang praktik dan kami putuskan RPS-nya bangun Edhotel.”

Namun dalam pelaksanaannya, lanjut Wilhelmus, tidak semua berjalan lancar. “Pembangunan Edhotel agak terhambat karena

di daerah saya ada kasus penambangan pasir yang ditutup dan memengaruhi pembangunan di sekitarnya. Kami masih terus berjuang dan tak akan pernah berhenti berjuang menyukseskan program revitalisasi. Mulai dari menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, bersih, dan ramah lingkungan. Sekarang juga kami masih dalam proses untuk pengurusan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1,” tuturnya.

Untuk mewujudkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 ini Kemendikbud telah memprioritaskan anggaran senilai Rp 5,3 triliun untuk Revitalisasi SMK dengan pembagian Rp 3,4 triliun dari pusat dan Rp 1,9 triliun di daerah lewat DAK. Anggaran ini tertuang dalam kegiatan prioritas seperti pembangunan sarana prasarana di beberapa SMK prioritas, yaitu kemaritiman, pariwisata dan pertanian.

Selain SMK, Kemendikbud juga berfokus meningkatkan revitalisasi di Lembaga

Kursus dan Pelatihan serta SMALB dengan program kemandiriannya. Sejak tahun 2016 Kemdikbud telah memberikan bantuan uji kompetensi kepada 175 Master Penguji dan Penguji. Dan, jumlah tersebut meningkat menjadi 180 Master Penguji dan Penguji di tahun 2017 ini. Begitu juga dengan 800 guru SMALB yang mendapat bantuan untuk sertifikasi kompetensi di tahun 2017.

Selain meningkatkan kompetensi siswa, bagi SMK yang sudah maju dalam melaksanakan revitalisasi menjadi motor peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dan keterampilan di sekitarnya. Seperti yang dialami oleh SMKN 3 Malang yang bergerak di bidang pariwisata dengan sarana prasarana semakin lengkap dengan mempunyai Edhotel sebagai Teaching Factory. Menurut Faizah, Kepala SMKN 3 Malang, sekolah ini terbuka untuk meminjamkan fasilitas yang

ada untuk digunakan oleh lembaga lain seperti kursus atau lembaga lain, “Namun harus melewati proses kerjasama dengan kami terlebih dahulu”.

Mekanisme penggunaan fasilitas bersama ini mendapat dukungan penuh dari Kemdikbud, yang saat ini juga sedang merencanakan pola kerjasama antara SMK, SMALB dan Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan agar dapat bekerja sama sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan kebutuhan sumber daya di daerahnya. “Walau ketiga jenis lembaga tersebut bergerak menangani peserta didik yang berbeda, dengan adanya kerja sama ini, masing-masing lembaga pendidikan bisa saling berinteraksi dan membantu,” ujar Staf Ahli Mendikbud, Bidang Inovasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma Seta. Saat ini proses kerjasama di antara ketiga lembaga tersebut sedang diuji coba di beberapa

lokasi.

Beberapa hasil revitalisasi mulai terlihat, terutama saat siswa mengikuti lomba di bidang kejuruan dan keterampilan internasional dalam ajang *World Skill Competition (WSC)* 2017 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Tim SMK Indonesia meraih 1 perak (atas nama Andre Gilitasha, dari SMKN 3 Malang), di ajang Restaurant Service) dan 1 perunggu (atas nama Rizki Dwi Afrianto, SMKN 1 Purworejo di kategori Prototype Modelling). Dengan perolehan dua medali itu, Indonesia memperoleh nilai 17 dan menempati peringkat 16 dari 59 negara yang ikut serta. Kemampuan pelajar Indonesia dalam ajang World WSC 2017 tersebut menjadi pencapaian yang paling tinggi di antara negara-negara di ASEAN. ■

Kegiatan praktik siswa SMK Leonardo Klaten, Jawa Tengah.





Guru SMK menjalankan magang langsung di dunia usaha dan industri dalam Program Keahlian Ganda

PENYELARASAN KURIKULUM DAN KERJASAMA DUDI

Di tengah polemik pelaksanaan pembelajaran Lima Hari Sekolah, terlihat siswa SMK Raden Umar Said, Kudus tetap tenang untuk melaksanakan praktik di laboratorium multimedia sekolah, meski waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Siswa-siswa di SMK Raden Umar Said Kudus sudah terbiasa pulang malam setelah selesai mengerjakan praktek multimedia yang ditugaskan. Kebiasaan ini sudah lama terjadi, karena siswa merasa nyaman dan lebih fokus bila berada di sekolah.

SMK ini bergerak di bidang Persiapan Grafika, Produksi Grafika, Desain Komunikasi Visual, Animasi dan Rekayasa Perangkat Lunak. Laboratorium Multimedia di SMK Raden Umar Said, Kudus memang disesuaikan dengan standar dunia usaha dan dunia industri yang ada. Sehingga, anak-anak bisa belajar dengan menggunakan alat praktik yang terbaru, sehingga dapat meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDI.

Pendidikan kejuruan dan keterampilan lebih

diarahkan pada pembentukan kemampuan yang diperlukan di dunia kerja sesuai dengan jabatan yang ada di setiap kompetensi keahlian. Untuk mempertajam kesesuaian antara Kompetensi Keahlian/Program Keahlian yang dibuka dengan penghargaan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi di industri (sesuai dengan kebijakan link and match), maka perlu dilakukan pengkajian kompetensi yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat kompetensi dan waktu yang diperoleh baik selama pendidikan di sekolah maupun pelatihan di dunia usaha dan industri.

Untuk pelaksanaan penyelarasan kurikulum (*link and match*), Kemendikbud telah memetakan spektrum keahlian baru yang terdiri dari 8 bidang keahlian, 42 program keahlian dan 142 kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan DUDI. Kemendikbud juga bekerjasama dengan kementerian/lembaga, dunia usaha dan dunia industri untuk menyelaraskan 82% dari 142 spektrum kompetensi keahlian yang ada.

Sisanya sedang dalam proses penyelesaian, sehingga target 2018 semua kompetensi keahlian sudah diselaraskan. Selain penyesuaian kurikulum, Kemendikbud juga telah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan untuk SMK yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana dan Standar Pembiayaan.

Selain penyesuaian kurikulum, dalam pelaksanaannya kurikulum di SMK lebih menekankan pada 30% teori dan 70% praktik di industri. Praktik ini banyak melibatkan kerjasama dengan industri, dengan melaksanakan Praktek Kerja Industri. Beberapa sekolah telah berhasil membangun pelaksanaan praktik industri di sekolah yang lazim disebut dengan *Teaching Factory*. *Teaching Factory* adalah konsep pembelajaran berbasis industri (produk dan jasa) melalui sinergi sekolah dengan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar.

Seperti yang dilakukan oleh Kelas Binaan Auto 2000 di SMK Karya Nasional, Cigugur, Kuningan, dimana ada kelas yang disiapkan untuk dapat mengembangkan kompetensi siswa dengan langsung dihadapkan pada kondisi nyata yang ada di industri berupa perbaikan/ trouble shooting kendaraan. Selain itu, melalui kegiatan seperti ini diharapkan siswa juga dapat mengikuti perkembangan teknologi di industri.

Penyesuaian kurikulum kejuruan yang menekankan pada proporsi praktek yang lebih besar juga harus didukung oleh semua pihak dalam sekolah. Seperti yang dialami di SMKN 1 Batam yang bergerak di bidang Teknologi Rekayasa. "Saya harus menambah jam pelajaran untuk praktek mata pelajaran kejuruan, yang harusnya jam 5 sore sudah pulang, kadang bisa sampai jam 10 malam. Tentu saja ini atas



permintaan dari guru dan siswa agar bisa lebih meningkatkan kompetensi mereka," kata Kepala SMKN 1 Batam, Lea.

Di tahun 2017, Kemendikbud telah bekerja sama dengan 11 kementerian/lembaga dan 16 DUDI untuk bisa lebih menyalurkan kebutuhan lulusan pendidikan kejuruan dengan industri. Selain penyesuaian kurikulum, kementerian/ lembaga/DUDI juga membantu untuk menyusun skema sertifikasi, melaksanakan uji sertifikasi dan meningkatkan kompetensi guru. Di tahun ini, Kemendikbud juga mencoba mendata kerjasama yang dilakukan oleh SMK. Tercatat sudah terdapat 3,574 DUDI yang bekerjasama langsung dengan sekolah dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki.

Selain itu, SMK juga telah memiliki hubungan kerja dengan 85 kawasan industri, yang di dukung oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia untuk menghasilkan tenaga yang terampil dan siap kerja. Untuk meningkatkan akses sertifikasi, bekerja sama dengan BNSP, Kemendikbud memfungsikan SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi. Sampai dengan bulan November 2017, terdapat 431 SMK yang sudah mendapatkan lisensi LSP-P1 dan 450 SMK ditetapkan sebagai TUK dari Honda, Yamaha, Daihatsu, Toyota, Oracle, Apjatel dan LSP Pariwisata.

Chairul Tanjung, Pemilik Chairul Tanjung (CT) Corporation sebagai salah satu DUDI yang bekerja sama dengan Kemendikbud menyatakan bahwa proses kerjasama yang dilakukan perusahaannya hanya merupakan awal. "Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal yang baik, dan tentu bukan cuma Trans Retail, CT Corp banyak perusahaan yang lain. Tadi saya berbicara dengan Menteri Muhadjir, bahkan ada di bidang broadcasting yang nanti bisa kerja di media kita, seperti bidang multimedia dan bidang perfilman. Di bidang *food and beverage* juga bisa. Di banyak bidang nanti bisa kita berikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik," ujarnya.

Penyesuaian dengan DUDI ini membawa dampak positif bagi SMK Revitalisasi yang telah melakukan proses penyesuaian dengan DUDI. "Hubungan dengan DUDI semakin intensif," ujar Urai Muhani, Kepala SMKN 5 Pontianak. Beberapa SMK lain juga menyampaikan hal yang senada dengan yang disampaikan Kepala SMKN 5 Pontianak. ■

Siswi SMK sedang praktik mengelas pipa.

MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA MELALUI PENDIDIKAN KEJURUAN DAN KETERAMPILAN DI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Fungsi lembaga kursus memang memberikan pendampingan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi, bersertifikat, dan masuk dunia kerja atau berwirausaha



Sesuai dengan Nawacita ke-enam, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, Lembaga Kursus dan Pelatihan memiliki peran strategis sebagai lembaga keterampilan di luar pendidikan formal. Perkembangan dan pertumbuhan lembaga kursus dan pelatihan harus diupayakan terus meningkat pesat, baik dalam hal jumlah lembaga maupun dari berbagai jenis pelatihan yang dibuka. Hal ini juga dibarengi dengan meningkatnya keinginan masyarakat akan pendidikan yang bermutu di luar pendidikan formal. Pemerintah terus melakukan upaya-upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dalam rangka pembinaan dan pengembangan kursus.

Merujuk pada data laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia per Februari 2017 mencapai 7,01 juta orang, turun sekitar 20 ribu orang dibanding Agustus 2016, dan berkurang 10 ribu orang dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016. Data per Februari 2017 itu juga menunjukkan jumlah angkatan kerja yang mencapai angka 125 juta orang,

sedangkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ada pada angka 5,61 persen, yang berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja terdapat lima hingga enam orang yang menganggur. Angkatan kerja mencerminkan jumlah penduduk yang secara aktual siap memberikan kontribusi terhadap produksi barang dan jasa di suatu wilayah/negara.

Keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) telah memberi sumbangan positif bagi upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran di Indonesia. Karena itulah lembaga kursus dan pelatihan turut andil dalam menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia.

Berdasarkan data, LKP memiliki peran yang cukup besar dalam menyerap tenaga kerja, yaitu sebanyak 78 persen diterima di dunia kerja, 12 persen berwirausaha, dan sisanya tidak terdeteksi. Hal ini menggambarkan bahwa LKP berperan cukup signifikan dalam mengurangi angka pengangguran.

Fathul Yadi, Ketua Lembaga Kursus Magistra Utama, Malang mengatakan, lembaga kursus dan pelatihan juga menjalin kerja sama dengan dunia kerja dan dunia industri. "Bahkan di Magistra sendiri menyediakan program yang menjembatani lulusan SMK untuk mengikuti pelatihan kesiapan kerja di Magistra sebelum benar-benar masuk ke dunia kerja,"katanya.

Perkembangan keberadaan kursus memang sangat luar biasa. Pada tahun 2010 terdapat 14.315 lembaga kursus dan pelatihan, kemudian terus meningkat hingga tahun 2016 mencapai 19.829 lembaga. Dengan beraneka ragam keterampilan, saat ini ada 224 jenis keterampilan, 76 di antaranya adalah jenis keterampilan yang sudah berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Penilaian kinerja lembaga kursus merupakan salah satu upaya pemerintah

dalam meningkatkan mutu lembaga kursus. Tantangan ini cukup berat karena dari 13.446 lembaga kursus yang ada di Indonesia, baru 11.207 lembaga (83,35%) yang sudah memiliki izin operasi. Sisanya, sebesar 10,20% lembaga sedang dalam proses pengurusan izin dan 6,45% lembaga belum memiliki izin.

Selain itu, agar lebih banyak peserta didik kursus yang bersertifikasi, sejak tahun 2016 Kemendikbud telah memberikan bantuan sertifikasi kepada 68.435 peserta didik. Kemudian pada tahun 2017 ditargetkan 50.000 peserta yang mendapatkan bantuan ini. Tahun ini Kemendikbud juga membantu 265 Lembaga Kursus dan Pelatihan untuk mendapatkan lisensi sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Untuk meningkatkan kualitas lembaga kursus dan pelatihan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan merancang sejumlah strategi, di antaranya melalui penilaian dan penghargaan bagi pemenang Lembaga Kursus dan Pelatihan, serta ajang apresiasi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017. Pada tahun 2017, penilaian dan penghargaan ini diselenggarakan pada saat Gelar Karya Kursus Pelatihan dan Bursa Tenaga Kerja Tahun 2017 di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/9). Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, didampingi Dirjen PAUD dan Dikmas Harris Iskandar dan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Yusuf Muhyiddin. Penghargaan diberikan kepada :

1. Juara 1: LKP Bahasa Inggris English First (EF) Kota Depok, Jawa Barat.
2. Juara 2: LKP Bahasa Inggris Dessy Education Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
3. Juara 3: LKP perhotelan/kapal pesiar Sangkuriang Kota Bogor, Jawa Barat.
4. Juara Harapan Satu: LKP administrasi perkantoran LP3I Kota Surabaya, Jawa Timur.
5. Juara harapan kedua: LKP Bahasa Inggris Quali Internasional, Kota Surabaya, Jawa Timur,
6. Juara harapan tiga: LKP tata rias pengantin Mahardika, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Penghargaan juga diberikan kepada juara untuk sembilan kategori lomba kompetensi peserta didik kursus, dan pelatihan tingkat nasional tahun 2017, yaitu kategori akuntansi, komputer, otomotif, tata busana, membuat,

hantaran, tata rias pengantin, tata kecantikan kulit dan spa.

Selain menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan juga berinisiatif meningkatkan minat peserta didiknya untuk program kewirausahaan. Pada tahun 2010 program ini mulai dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang lebih menekankan pada pendidikan kewirausahaan. Melalui pendidikan kewirausahaan ini diharapkan dapat mengubah mental peserta didik menjadi lebih baik. Program pendidikan kewirausahaan masyarakat didesain agar lulusannya bisa membuka usaha mandiri. Sebagai langkah awal, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan akan membuat proyek percontohan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat di 125 lembaga kursus. Tentu saja lembaga kursus yang bisa menyelenggarakan program ini harus memenuhi syarat standar lembaga penyelenggara pendidikan kewirausahaan berbasis masyarakat.

Pada akhirnya hanya lembaga kursus dan pelatihan yang bermutu yang dapat diterima masyarakat dan dapat bersaing dengan lembaga-lembaga sejenis di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Lembaga kursus bukan lagi sekadar pelengkap dalam dunia pendidikan, tapi telah berhasil menjadi mitra sejajar dengan pendidikan formal. ■



Siswa sedang fokus mempraktikkan kompetensi di tata kecantikan.



Guru yang dikirim ke Perancis berkesempatan untuk berlatih dengan peralatan berteknologi terkini.

PENGIRIMAN GURU PRODUKTIF KE PERANCIS DAN JERMAN

“Pengiriman ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi guru dan dapat ditularkan ke rekan guru lainnya”

Binar bahagia ditunjukkan oleh 18 guru yang namanya masuk ke dalam daftar pengiriman Guru SMK Produktif ke Perancis tahap pertama. Ke-18 guru ini telah melalui proses seleksi dari 43 calon peserta yang mengirimkan permohonan. Seleksi ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kedutaan Besar Perancis. Peserta yang terpilih dikumpulkan untuk mendapatkan persiapan dan pelatihan sebelum keberangkatan (*pre-departure*) selama empat hari, pada 17 – 20 April 2017 di Jakarta. Pelatihan dan pengiriman guru ini merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Tinggi dan Penelitian (MENESR) Republik Perancis.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berharap guru-guru yang berangkat bisa mendapatkan pengalaman belajar di sana. “Setelah kembali, saya harap tidak disimpan sendiri, namun ditularkan ke

teman sejawatnya. Rekan guru juga saya harapkan dapat mendorong penyiapan tenaga-tenaga terampil yang siap untuk lapangan pekerjaan di masa depan,” pesannya saat acara pre-departure.

Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Perancis untuk Indonesia, Emmilienne Baneth menyampaikan bahwa materi yang diberikan nantinya tidak akan terlalu teknis. Peserta akan diberikan materi untuk mengembangkan wawasan tentang tata kelola atau manajemen operasional dan hubungan dengan industri. Nantinya peserta akan disebar ke kota Fécamp, Nice, dan Toulouse.

Dilaksanakan selama dua bulan, sejak 24 April - 17 Juni 2017, pelatihan ini ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi guru produktif SMK agar dapat menggali pengalaman dari sekolah dan industri di Perancis. Kompetensi keahlian yang dilatihkan adalah Energi Baru Terbarukan, Aeronautika, Pariwisata dan Perhotelan dan Jasa Boga. Sebelum diberangkatkan, peserta mengikuti kegiatan

pembekalan (pre-departure) yang difasilitasi oleh narasumber dari Pemerintah Perancis. Pembekalan peserta dimaksudkan agar peserta memahami program pelatihan, tugas-tugas yang harus dikerjakan selama pelatihan. Di samping itu, peserta juga dibekali dengan kemampuan berbahasa Perancis untuk aktivitas keseharian, serta pengetahuan budaya dan sistem pendidikan di Perancis.

Tidak berhenti sampai di situ, Kemendikbud kembali memberangkatkan guru-guru ke Perancis tahap ke-2 pada bulan November ini. Tidak banyak berubah dari tahap pertama, 23 guru produktif SMK yang akan dikirimkan ke Perancis ini juga mengikuti pelatihan untuk bidang energi, aeronautika, perhotelan, tata boga dan tata busana. Pelatihan ini dilakukan selama dua bulan hingga Desember 2017.

Sebelumnya, di tahun 2016, sebagai implementasi kerja sama dengan Pemerintah Jerman, Kemendikbud mengirimkan 45 guru produktif SMK ke beberapa industri Jerman untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan program kejuruan mereka pada bulan Oktober-Desember 2016. Kedua industri yang dituju pada tahun 2016 ini adalah FESTO-Esslingen yang melatih 15 orang guru SMK, dan HWK Koblenz yang melatih 30 orang guru SMK bidang beton dan permesinan/welding. Pada tahun 2017, Kemendikbud melanjutkan untuk mengirimkan kembali 30 guru produktif ke Jerman dengan fokus kompetensi keahlian Teknik Mekatronika dan Elektronika. Guru-guru yang dikirim ini diharapkan dapat mengikuti pelatihan dan menyusun silabus bidang kompetensi keahlian masing-masing yang akan menjadi rujukan bagi guru-guru di Indonesia.

“Saya beruntung sekali bisa mengikuti Pelatihan di FESTO Jerman bidang otomasi. Benar-benar membuka wawasan saya karena magang langsung dengan industri di Jerman, di mana alat-alat di sana sudah *up-to-date*,” ungkap Verga Pandrianti, guru bidang teknik Otomasi Industri dari SMKN 1 Cimahi yang mengikuti pelatihan batch ke-1 di Jerman.

“Di sana kami dilatih oleh instruktur dari Industri FESTO Jerman langsung. Manfaat pelatihannya sangat terasa karena kami menjadi tahu kebutuhan industri sendiri seperti apa,” tambahnya.

Verga dan peserta lain juga melewati proses *pre-departure* yang fokusnya untuk memperdalam kemampuan bahasa Jerman. “Pada tiga hari setelah tiba, kami juga ada fasilitator yang menyampaikan orientasi

bagaimana cara hidup di Jerman sehingga kami bisa lebih mudah beradaptasi dan lebih fokus untuk mengikuti pelatihan,” ungkap Verga.

Di akhir pelatihan, guru-guru diminta untuk membuat modul sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Salah satu modul yang sudah dicetak adalah modul dalam bidang hidrolik dan sudah bisa digunakan secara luas oleh siswa dan guru dari sekolah lain. Sampai saat ini, peserta pelatihan masih aktif untuk menjalin komunikasi dan giat dalam mengembangkan ilmu yang sudah didapat dari Jerman. “Walau berbeda daerah, kami peserta pelatihan masih berkomunikasi satu sama lain, bahkan kami berniat untuk menyelesaikan beberapa modul yang nanti bisa dipakai oleh guru yang akan mengajar dengan kompetensi keahlian yang sama,” tambah Verga.

Pembuatan modul juga dialami dan dilakukan oleh guru-guru yang dikirimkan di batch ke-2. “Kami membuat modul tentang mekatronika dan sudah dipublikasikan oleh Direktorat PSMK. Namun ada baiknya jika modul yang diterbitkan juga bisa diberikan nomor ISBN, agar terdaftar,” ujar Heri Yudanto, Guru Mekatronika SMK Driyorejo.

Namun sayang, dalam pengaplikasiannya, Heri menemukan kesulitan saat mengajar ilmu yang baru didapat di Jerman ke anak didiknya. “Beberapa peralatan kami masih belum semaju yang ada di FESTO Jerman. Ada baiknya jika program ini bisa membuka kerja sama antara SMK yang ada dengan industri yang berada di bawah FESTO Jerman,” tambahnya. ■



Seorang guru Indonesia sedang fokus mendengarkan arahan dari instruktur di Perancis



PERCEPAT PENYEDIAAN GURU PRODUKTIF SMK

Kemendikbud menargetkan untuk merekrut 42.740 guru produktif terutama untuk empat bidang prioritas yaitu agro industri, pariwisata, maritim dan industri kreatif.

Program Keahlian Ganda untuk Guru Produktif merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Merujuk pada data Kemendikbud tahun 2016, Indonesia masih kekurangan guru produktif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sejumlah 91.861 orang, dengan rincian 41.861 orang di SMK Negeri dan 50.000 orang di SMK Swasta (Direktorat Pembinaan SMK, 2016).

Menyikapi kekurangan tersebut, pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan guru produktif di SMK melalui Program Keahlian Ganda, alih daya (*outsourcing*) guru dari Dunia Usaha (DU) maupun Dunia Industri (DI), Program Mahasiswa Magang, dan rekrutmen guru baru pegawai negeri sipil (PNS). Pemenuhan kebutuhan tenaga guru produktif di SMK, mau tidak mau harus menyesuaikan kebutuhan dunia usaha dan industri. Caranya, dengan menyesuaikan program keahlian yang ada agar penyelenggaraan pendidikan di SMK menjadi jawaban atas permasalahan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri.

Tujuan pelaksanaan Program Keahlian Ganda adalah untuk memberikan penguatan atau pendalaman materi bagi peserta pendidikan dan pelatihan (diklat), serta melaksanakan sertifikasi kompetensi keahlian sesuai paket keahlian yang diikuti.

Perubahan tugas mengajar mata pelajaran/program studi lama menjadi baru yang akan diampu guru/peserta dalam program keahlian ganda membutuhkan pengetahuan, pengalaman

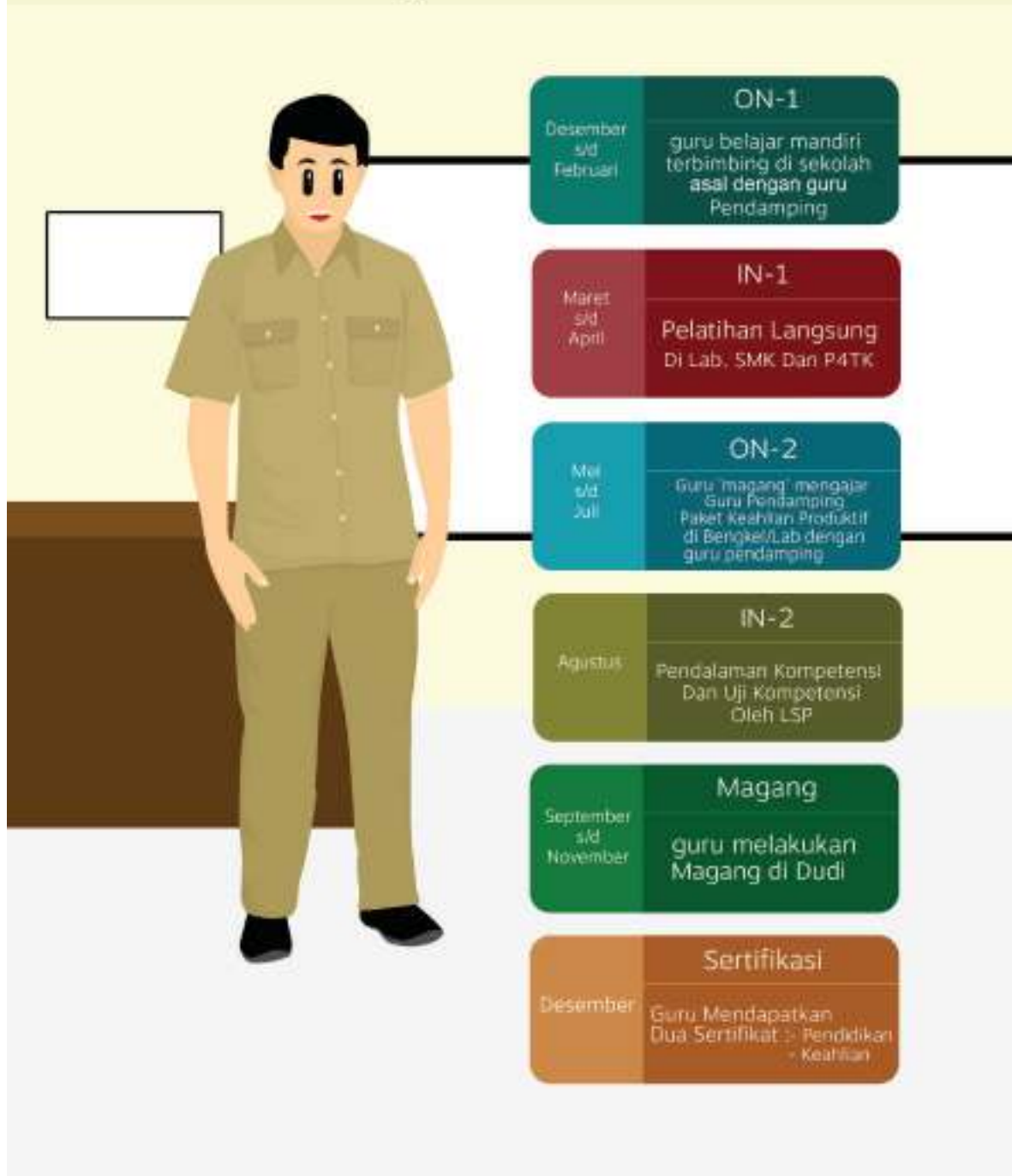
lapangan, dan keterampilan produktif baru. Pengalaman praktik mengajar yang realistis pada situasi sekolah sesungguhnya, akan menjadikan metode mengajar sesuai karakteristik program studi yang diampu guru.

Dengan demikian, diharapkan adanya peningkatan kompetensi keahlian produktif, khususnya pada satu kelompok kompetensi yang didiklatkan dan peserta memiliki kompetensi keahlian yang tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Di tahun 2016, telah terekrut 12.740 guru untuk mengikuti program keahlian ganda. Guru-guru tersebut tersebar di 314 pusat belajar yang ada di seluruh Indonesia. Dalam mengikuti Program Keahlian Ganda, mereka harus mengikuti Diklat ON-1, IN-1, ON-2, IN-2, magang di DUDI, dan melakukan sertifikasi. Sertifikasi yang dimaksud, selain sertifikasi guru adalah sertifikasi kompetensi yang diampu oleh peserta. Sertifikasi ini akan dilakukan di tempat yang telah ditentukan seperti Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) yang sudah disertifikasi menjadi LSP-P2. Berikut detil dari kegiatan diklat yang dilakukan oleh peserta program keahlian ganda.

Karena kebutuhan yang mendesak dalam meningkatkan sumber daya manusia, Program Keahlian Ganda ini menjadi program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempercepat ketersediaan guru produktif. Di akhir 2020 nanti, Kemendikbud menargetkan untuk merekrut 42.740 guru produktif terutama untuk empat bidang prioritas yaitu agro industri, pariwisata, maritim dan industri kreatif.

Kegiatan Diklat Yang Dilakukan Oleh Peserta Program Keahlian Ganda.



Persebaran Guru Keahlian Ganda

Bidang Keahlian	Kompetensi Keahlian	Jumlah Peserta
Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Aneka Ternak	10 Orang
	Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman	95 Orang
	Agribisnis Perikanan	258 Orang
	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	697 Orang
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	255 Orang
	Agribisnis Ternak Ruminansia	109 Orang
	Agribisnis Ternak Unggas	144 Orang
	Kehutanan	9 Orang
	Kesehatan Hewan	14 Orang
	Mekanisasi Pertanian	14 Orang
	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	74 Orang
	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	389 Orang
TOTAL	2068 Orang	
Kemaritiman	Nautika Kapal Niaga	35 Orang
	Nautika Kapal Penangkap Ikan	125 Orang
	Teknika Kapal Niaga	8 Orang
	Teknika Kapal Penangkap Ikan	36 Orang
TOTAL	204 Orang	
Pariwisata	Akomodasi Perhotelan	664 Orang
	Jasa Boga	687 Orang
	Tata Kecantikan Kulit	77 Orang
	Tata Kecantikan Rambut	84 Orang
	Usaha Perjalanan Wisata	278 Orang
TOTAL	1790 Orang	
Seni dan Industri Kreatif	Animasi	46 Orang
	Budidaya Perikanan	9 Orang
	Desain dan Produksi Kriya Kayu	42 Orang
	Desain dan Produksi Kriya Keramik	12 Orang
	Desain dan Produksi Kriya Kulit	13 Orang
	Desain dan Produksi Kriya Logam	15 Orang
	Desain dan Produksi Kriya Tekstil	76 Orang
	Desain Komunikasi Visual	92 Orang
	Seni Karawitan	13 Orang
	Seni Musik Klasik	4 Orang
	Seni Musik Non Klasik	5 Orang
Seni Tari	10 Orang	
TOTAL	337 Orang	
Teknologi dan Rekayasa	Teknik Audio Video	228 Orang
	Teknik Elektronika Industri	76 Orang
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	206 Orang
	Teknik Kendaraan Ringan	788 Orang
	Teknik Mekatronika	21 Orang
	Teknik Otomasi Industri	34 Orang
	Teknik Ototronik	15 Orang
	Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	13 Orang
	Teknik Pemesinan	134 Orang
	Teknik Pengelasan	88 Orang
	Teknik Sepeda Motor	543 Orang
TOTAL	2146 Orang	
Teknologi Informasi dan Komunikasi	Multi Media	1463 Orang
	Rekayasa Perangkat Lunak	435 Orang
	Teknik Komputer dan Jaringan	1606 Orang
	Teknik Produksi & Penyiaran Program Radio & Pertelevisian	1 Orang
	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian	55 Orang
Total	3560 Orang	
TOTAL		10.105 Orang





Ada kebiasaan baru Menteri Muhadjir dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, yaitu menyempatkan untuk mengunjungi sekolah, mengikuti upacara bendera atau apel bendera bersama para guru dan siswa-siswi.

Tampak dalam gambar, Menteri Muhadjir menjadi pembina upacara bendera di SDN 129 Kota Palembang. Upacara bendera diikuti seluruh siswa-siswi sekolah tersebut dan beberapa sekolah di sekitarnya. Pada upacara bendera ini, lagu Indonesia Raya tiga stanza dinyanyikan. Ini adalah bentuk penumbuhan karakter nasionalis kepada generasi muda, dengan mengenal dan menghayati lagu kebangsaan secara utuh.

SDN PERCOBAAN
PALANGKA RAYA

Pukul :

CLUB TAKRAW
"ISEN MULANG"
SDN PERCOBAAN PALANGKA RAYA

CLUB K...
"ISEN M..."
SDN PERCOBAAN...

ANGGAR TARI
"PANATAU"
PALANGKA RAYA

Jadwal Latihan :
Pukul :

Jadwal Latihan :
15:00

M DOKCIL
CILIK

TIM POCIL
LINGKUNGAN SE...



ABHARA

MENGUATKAN RUH PENDIDIKAN BANGSA

“Bersama Mencapai Generasi Emas 2045 melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)”

Perubahan cepat yang terjadi pada dunia saat ini menuntut setiap orang untuk dapat menyesuaikan diri agar tidak tergerus perubahan. Adanya fenomena kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, membuat perubahan yang sangat cepat dalam sendi-sendi kehidupan. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi sumber daya potensial dan strategis di berbagai sektor kehidupan. Di sisi lain, kemajuan teknologi dapat berdampak pada hal-hal negatif bahkan memecah kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tidak dikelola dengan baik.

Negara yang memiliki tanggung jawab dalam mencerdaskan anak bangsa juga memiliki tanggung jawab untuk membekali pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi perubahan. Kecerdasan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kecerdasan intelektual semata, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual yang mampu mencetak insan-insan berkarakter yang berguna bagi bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mendidik dan membina karakter putra-putri bangsa. Mengacu pada konsep Tri Pusat Pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara disebutkan bahwa keluarga dan masyarakat memiliki peranan yang sama pentingnya dengan sekolah dalam mendidik dan membentuk pribadi siswa.

Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa pendidikan tidak melulu soal mengasah kemampuan berpikir, namun secara holistik mengolah empat hal dalam pribadi manusia,

yakni olah pikir (literasi), olah raga (kinestetika), olah karsa (estetika), dan olah hati (etika). Empat hal ini ketika berjalan secara harmonis akan memunculkan putra-putri bangsa yang memiliki pribadi yang sanggup menghadapi perubahan. Untuk itu, selain pembentukan kompetensi, pendidikan nasional juga harus berfokus pada penguatan karakter

Kebijakan untuk mengawal isu pendidikan karakter di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejalan dengan nafas cita-cita pemerintahan Jokowi-JK periode 2015-2019 yang disebut dengan Nawacita. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan penekanan pada pentingnya revolusi mental bangsa Indonesia sebagai upaya yang harus dimulai dan digalakkan untuk menjadi salah satu solusi menghadapi permasalahan bangsa. Poin Nawacita tersebut dijawantahkan oleh Kemendikbud menjadi sebuah program Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter yang diarahkan sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Hal ini merupakan salah satu dasar mengapa Penguatan Pendidikan Karakter menjadi program strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penguatan Pendidikan Karakter sebenarnya bukanlah kebijakan baru, karena sejak tahun 2010 pendidikan karakter di sekolah sudah menjadi Gerakan Nasional. Satuan pendidikan menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki sistem, infrastruktur, dan dukungan ekosistem pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari perkotaan sampai perdesaan. Sudah

banyak praktik baik yang dikembangkan sekolah, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk memastikan agar proses pembudayaan nilai-nilai karakter berjalan dan berkesinambungan. Selain itu, sangat diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan bertumpu pada kearifan lokal untuk menjawab tantangan zaman yang makin kompleks, mulai dari persoalan yang mengancam keutuhan dan masa depan bangsa hingga persaingan global.

Kebijakan ini akan menjadi dasar bagi perumusan langkah-langkah yang lebih konkret agar penyemaian dan pembudayaan nilai-nilai utama pembentukan karakter bangsa dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh.

Pada perkembangannya, tahun 2017 Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Penguatan Pendidikan Karakter yang kemudian disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga, dengan melibatkan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Peraturan Presiden (Perpres) ini semakin menunjukkan bahwa PPK merupakan salah satu isu yang diprioritaskan oleh Presiden.

Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sesuai Perpres Nomor 87 Tahun 2017 di antaranya :

1. Membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
2. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
3. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan

keluarga dalam mengimplementasikan PPK

Ada 4 prinsip Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yaitu memperkuat kurikulum 2013, *broad based curriculum*, *school based management*, dan *student active learning*. PPK bukanlah kurikulum baru. PPK terintegrasi dengan kurikulum 2013 dan menguatkan kurikulum 2013 yang selama ini telah tercakup nilai-nilai karakter di dalamnya. PPK juga memperluas makna belajar bahwa kegiatan pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga saat berinteraksi dengan keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat (*broad based curriculum*). Peran kepala sekolah dan guru sangat penting dalam mengelola kebijakan dan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan dan memperkuat nilai-nilai karakter siswa (*school based management*). PPK juga mempertegas bahwa pusat kegiatan belajar mengajar adalah siswa. Guru berperan aktif dalam memfasilitasi dan mendampingi siswa untuk mengeluarkan potensi dirinya agar mampu memiliki keterampilan abad 21 (*student active learning*).

Sasaran program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada hakikatnya meliputi seluruh ekosistem pendidikan. Kemendikbud percaya bahwa untuk mendidik karakter siswa-siswi Indonesia dibutuhkan teladan dari segenap warga sekolah yang juga berimplikasi pada perilaku para pimpinan daerah serta para pengambil kebijakan negeri ini. Secara konkret dan spesifik program ini menyasar setidaknya beberapa unsur di dalam dunia pendidikan: kepala sekolah, guru, pengawas, siswa dan komite sekolah.

Dari 514 Kab/Kota, 491 Kab/Kota sudah memiliki sekolah rintisan PPK di jenjang Sekolah Dasar (SD). Adapun seluruh 514 Kab/kota sudah memiliki sekolah rintisan PPK di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Implementasi PPK melibatkan seluruh unit utama di Kemendikbud, yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Dikdasmen, Ditjen GTK, Ditjen PAUD Dikmas, Ditjen Kebudayaan, Balitbang, dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Data Sekolah Pelaksana PPK

NO	Kegiatan	2016		2017	
		Jumlah Sekolah	Sekolah Imbas	Jumlah Sekolah	Sekolah Imbas
1	Pelatihan PPK SD	271		812	± 2.710
2	Pelatihan PPK SMP	271		1.352	± 1.355
3	Sosialisasi PPK di KKG/MGMG Pendidikan Dasar			4.592 KKG/MGMG	± 48.520
4	Pewajiban Restitusi untuk guru PPK MGMP Pendidikan Menengah			740 MGMP	± 7.400
5	Sosialisasi PPK di MKKS Pendidikan Menengah			244 MKKS	± 4.502
Total Sekolah		542 Sekolah		2.164 Sekolah	61.507 Sekolah



Sekretariat Jenderal

Kegiatan yang dilakukan Sekretariat Jenderal melalui Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) untuk memperluas implementasi PPK pada tahun 2017 antara lain mencetak tujuh buku seri PPK yang terdiri dari : 1) Buku Konsep dan Pedoman PPK, 2) Buku Panduan Penilaian PPK, 3) Buku Pedoman Pelatihan Calon Fasilitator PPK, 4) Modul Pelatihan PPK Bagi Guru, 5) Modul Pelatihan PPK Bagi Kepala Sekolah, 6) Modul Pelatihan PPK Bagi Pengawas, dan 7) Modul

Pelatihan Bagi Komite Sekolah, serta melakukan pelatihan calon fasilitator PPK yang berasal dari unsur-unsur unit utama Kemendikbud, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud, Sekolah Rintisan PPK, praktisi pendidikan dan perguruan tinggi.

Ditjen Dikdasmen

Kegiatan yang dilakukan Ditjen Dikdasmen untuk memperluas implementasi PPK pada tahun 2017 antara lain : Memberikan bantuan

pemerintah untuk 271 SD dan 271 SMP yang menjadi sekolah rintisan PPK, menyelenggarakan Bimtek PPK, memberikan bantuan pemerintah untuk sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi PPK, membuat media pendukung sosialisasi PPK dalam bentuk Video PPK, dan supervisi, pengawasan (monitoring), dan evaluasi Pelaksanaan PPK.

Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan yang dilakukan Ditjen GTK untuk memperluas implementasi PPK pada tahun 2017 antara lain: Persiapan ToT Fasilitator (Narasumber) Penguatan Pendidikan Karakter (2017), Training of Trainer (ToT) Fasilitator PPK (2017), Pelatihan Guru Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Melalui PPK untuk Guru SD dan Guru SMP, Penyusunan Instrumen Supervisi (Pendampingan) Peningkatan PPK, Supervisi (Pendampingan) Peningkatan Bimtek PPK untuk Tendik, Bantuan Pemerintah untuk MKKS, Sosialisasi PPK pada kegiatan Lokakarya, Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk KS dan PS (modul terintegrasi PPK), Piloting Pengimbasan PPK, Pelatihan Calon Fasilitator PPK, Bimtek PPK untuk Guru, dan Sosialisasi PPK melalui KKG/MGMP.

Ditjen Paud Dikmas

Kegiatan yang dilakukan Ditjen PAUD Dikmas untuk memperluas implementasi PPK pada tahun 2017 antara lain menyelenggarakan ToT Pelatihan Calon Fasilitator dan Bimtek PPK untuk Komite Sekolah.

Balitbang


Kegiatan yang dilakukan Balitbang untuk memperluas implementasi PPK pada tahun 2017 antara lain melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) yakni internalisasi nilai-nilai karakter melalui layanan bimbingan konseling. Model Layanan Program Bimbingan dan Konseling dengan penguatan pendidikan karakter untuk Sekolah (kegiatan tahun 2017 dimulai di tingkat SMP). Siswa dan guru BK SMPN 01 Lembang dan SMPN 12 Bekasi mengatakan bahwa Program Layanan BK dengan PPK membuat guru menjadi lebih baik dan terarah dan siswa menjadi lebih baik karakternya.

Ditjen Kebudayaan

Kegiatan yang dilakukan Ditjen Kebudayaan untuk memperluas implementasi PPK pada tahun 2017 antara lain memberikan bantuan alat-alat musik untuk sekolah, menyelenggarakan belajar bersama mentor, dan seniman masuk sekolah. Kegiatan-kegiatan ini meningkatkan kolaborasi antarsemua unsur dan meningkatkan kreativitas anak.

Semoga dengan semakin gencarnya implementasi PPK di seluruh wilayah Indonesia, tujuan untuk mempersiapkan dan memperoleh generasi emas pada tahun 2045 dapat tercapai. ■





Siswa-siswi SMPN
10 Kota Palembang
melaksanakan sholat
dzuhur berjamaah,
bertempat di halaman
sekolah. Pembiasaan
ini dilakukan setiap hari
sekolah, bagian dari
penanaman karakter
religius.

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

“Kurikulum 2013 sendiri dikembangkan berdasarkan landasan sosial kehidupan masyarakat Abad 21, sehingga diharapkan bisa melahirkan penerus bangsa yang siap menyongsong tantangan di Abad 21”

Keceriaan anak-anak tampak jelas dalam perjalanan menuju ke sekolah. Anak-anak begitu bersemangat menghadapi pelajaran di kelas hari itu yang dibuka dengan pertanyaan interaktif dari guru mengenai akhir pekan dan kabar mereka. Kelas pun dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh seorang siswa dan menyanyikan lagu nasional bersama sebagai bagian dari penanaman nilai Nasionalisme. Lima belas menit selanjutnya dilakukan dengan sesi literasi bersama, sang guru membacakan salah satu cerita pahlawan nasional, sebagaimana tema bulan itu, lalu anak-anak melanjutkan kegiatan membaca buku yang disediakan di Pojok Literasi pada kelas mereka.

Begitulah sebagian cuplikan kondisi kelas yang menggunakan Kurikulum 2013. Sekolah tidak hanya rumah kedua bagi mereka, namun juga sebuah tempat belajar yang menyenangkan, sehingga anak pun senantiasa semangat untuk mengembangkan diri dan belajar secara optimal.

Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Supriano, M.Ed., Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud, “Dengan adanya perubahan kurikulum, proses pembelajaran dapat menjawab tantangan di Abad 21.”, muatan Kurikulum 2013 sendiri memang dikembangkan berdasarkan landasan sosial kehidupan masyarakat Abad 21. Melalui

pembelajaran aktif dengan menggunakan berbagai pendekatan/metode pembelajaran yang relevan dan kontekstual, serta prosedur ilmiah, dapat melatih anak-anak memiliki kemampuan mengamati, menanya, menalar/ mengolah informasi, mencoba, dan membentuk jejaring dengan cara mengomunikasikan/ menyajikan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan penerus bangsa yang memiliki keterampilan abad 21, yaitu “4C skills” (*Creative thinking, Critical thinking, Communication skill, Collaborative learning*). Hal ini juga diungkapkan oleh Drs. Rohmani, M.M., Kepala SMPN 189 Jakarta Barat yang juga Narasumber Nasional Kurikulum 2013, “Peserta didik lebih kreatif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran karena guru memanfaatkan berbagai media dengan metode bervariasi sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21 yaitu 4 C. Pembiasaan pagi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stanza serta sebelum pulang menyanyikan lagu pilihan yang disepakati membuat karakter peserta didik tambah baik”. Sebagai pelaksana Kurikulum 2013, beliau juga mengungkapkan bahwa karakter peserta didik pun menjadi lebih kuat.

Rancangan Kurikulum 2013 memuat Dimensi Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan yang dituangkan mulai dari Standar Kompetensi



Interaksi guru - murid lebih cair, membuat suasana belajar di ruang kelas lebih menyenangkan.

Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar (KD), yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan psikologi siswa, serta diimplementasikan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Penerapan muatan kurikulum pada dimensi sikap pada Kurikulum 2013 dilakukan secara *direct* dan/atau *indirect teaching*. Khusus pada mata pelajaran Pendidikan Agama, Budi Pekerti, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dilakukan secara *direct* (langsung) dan *indirect teaching* (tidak langsung). Pada mata pelajaran lainnya, dilakukan secara *indirect teaching* atau pengajaran tidak langsung. Penerapan dimensi sikap ini dalam rangka melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui intrakurikuler dan kokurikuler. Sehingga dapat dikatakan

bahwa Kurikulum 2013 merupakan gerbang utama dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah. Selain itu penerapan muatan kurikulum juga dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah.

Implementasi Kurikulum 2013 di satuan pendidikan diawali dengan pelatihan Instruktur Kurikulum 2013 oleh Kemendikbud, dilanjutkan dengan pelatihan Instruktur Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Guru Sasaran, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), selaku salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud, di tingkat provinsi.

Hingga tahun 2017, terdapat 134.811

sekolah telah mengimplementasikan Kurikulum 2013. Angka tersebut terus meningkat dan diharapkan dapat memenuhi target penerapan Kurikulum 2013 sebesar 100% pada tahun 2018. Dengan penerapan Kurikulum 2013 yang semakin merata dan kolaborasi semua stakeholder terkait, sepatutnya kita yakin bahwa pendidikan di Indonesia lebih baik, guna menciptakan generasi emas penerus bangsa yang memiliki kecerdasan holistik, baik kecerdasan Intelektual (IQ), kecerdasan

Emosional (EQ), dan kecerdasan Spiritual (SQ), melalui pembelajaran yang utuh dengan mengoptimalkan “olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga”. Selain itu dukungan semua pihak, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat, merupakan sarana efektif sebagai wahana belajar dan kurikulum kehidupan sesungguhnya, sebagaimana Pengertian Kurikulum, menurut Kerr, J.F. (1968), yaitu semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun



Siswa-siswi SMAN 3 Kuningan, Jawa Barat mengerjakan tugas kelompok di selasar sekolah yang bersih dan nyaman. Sekolah ini memiliki koleksi ratusan jenis tumbuhan dari berbagai daerah, juga mengaplikasi tanaman hidroponik di sekeliling sekolah.

berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Akhirnya, melalui Kurikulum 2013, makin kita kuatkan Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia, dan kita jadikan rumah sebagai wahana pendidikan pertama dan utama, sekolah sebagai rumah ke dua yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta lingkungan sekitar sebagai dimensi dominan lain dari kehidupan yang kondusif dan konstruktif. “Yang paling utama dalam implementasi pembelajaran dengan Kurikulum 2013 adalah para siswa berhasil mendapatkan makna dari apa yang telah dipelajarinya sehingga tumbuh pemahaman dan kesadaran. Fase ini merupakan fase terpenting karena di fase

ini diharapkan guru mampu menumbuhkan kesadaran, keyakinan, bahkan kemandirian siswa. Melalui pencapaian yang telah diperoleh para siswa termotivasi untuk mencapai yang lebih baik dalam hal kuantitas dan kualitas diri (personal best).” sebagaimana dirasakan oleh Dra. Yati Suwartini, M.Pd., Kepala SMP Labschool Kebayoran, Jakarta Selatan.



Keberadaan pojok baca sederhana di SDN 19 Tarakan, Kalimantan Utara dimanfaatkan oleh siswa pada saat istirahat.

PENGUATAN BELA NEGARA DALAM KURIKULUM 2013

Secara geografis bangsa Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terpisah jarak, bentang alam, dan lautan. Secara budaya, bangsa Indonesia juga terdiri dari berbagai suku dan agama. Rasa kebangsaan, nasionalisme, dan cinta tanah air, menyatukan keberagaman sebagai satu bangsa NKRI. Persatuan atas perbedaan (kebinekaan) ini yang membesarkan bangsa Indonesia. Kebinekaan dan keindonesiaan adalah identitas kebangsaan yang dibangun secara sadar dari kebinekaan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Saat ini isu dan aksi radikalisme mencuat kembali berkaitan dengan isu SARA karena faktor politik global dan lokal. Radikalisme terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa persepsi dan alasan, seperti ketidakadilan yang dialami rakyat, krisis ekonomi-politik, dan kesenjangan kaya miskin. Aksi radikalisme ini dimanfaatkan oleh kelompok ekstrem sebagai jebakan untuk membuat kegaduhan yang bisa memicu konflik horizontal dan menggunakan agama sebagai politik identitas untuk memperebutkan kekuasaan. Kebinekaan bangsa Indonesia menjadi sasaran empuk bagi sebagian kalangan untuk mengangkat isu-isu primordial di masyarakat, isu-isu sensitif yang menyentuh SARA.

Pada dua hingga tiga tahun terakhir ini penanaman radikalisme terlihat intensif terhadap anak-anak. Peneliti senior The Wahid Institute,

Rumadi Ahmad, mengatakan bahwa penanaman radikalisme terhadap anak-anak dilakukan lewat pendidikan di rumah oleh orang tua dalam berbagai kegiatan radikalisme yang diikutinya. Misalnya dengan cara mengajak anak-anak terlibat berbagai aksi demonstrasi saat pilkada, aksi menghina orang lain yang menebarkan kebencian, dan aksi menentang ideologi Pancasila, serta mendandani anak dengan cara berpakaian yang tidak biasa sebagai ajang penanaman kebencian SARA. (Kompas, 28 April 2017). Semua aksi radikalisme yang ditanamkan pada masa anak-anak nantinya akan berbuah menjadi gelombang gerakan radikal pada 10-15 tahun mendatang.

Memperhatikan kondisi pusan konflik sosial di masyarakat Indonesia saat ini, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) pada tahun 2017 memberikan prioritas kegiatan Pendidikan Bela Negara dalam implementasi Kurikulum 2013 untuk peserta didik PAUD, pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal, dan nonformal. Kurikulum 2013 memiliki tujuan khusus untuk mempersiapkan generasi baru dan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan sebagai pribadi orang dewasa dan warga negara yang religius, memiliki etika sosial tinggi dan kepedulian serta tanggung jawab sebagai warga negara dalam pengembangan kehidupan bermasyarakat,



berbangsa, bernegara, dan menopang perkembangan peradaban dunia. Melalui implementasi Kurikulum 2013 juga dilakukan upaya membangun kehidupan masa kini dan masa depan warga negara yang lebih baik dalam hidup berbangsa dan bernegara di tengah arus globalisasi dan kemajemukan masyarakat Indonesia.

Dengan Penguatan Pendidikan Karakter, Kemendikbud mencoba untuk membangun karakter bela negara melalui kegiatan ekstrakurikuler dan nonkurikuler yang dilakukan dalam kegiatan lingkungan sekolah. Kegiatan Ekstrakurikuler yang dilakukan bisa berupa ekstrakurikuler



Siswa-siswi SMP berkunjung ke Kodam V Brawijaya, disambut oleh Batalyon Yonif Raider 500/Sikatan.

kepramukaan, paskibra, dan palang merah remaja (PMR). Di tahun 2017, Kemendikbud telah melakukan kemah pramuka yang diikuti 5.000 siswa di Gugus Depan dari 34 Provinsi di Indonesia.

Salah satu upaya untuk menguatkan kegiatan nonkurikuler dalam pendidikan bela negara adalah dengan mengeluarkan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Permendikbud tersebut mewajibkan sekolah untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pelajaran dimulai dan menyanyikan lagu

nasional setelah proses belajar selesai. Selain itu, Kemendikbud mengadakan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) yang diikuti 272 siswa pengurus OSIS perwakilan terbaik dari 34 provinsi yang mengandung materi sikap cinta tanah air. Kemendikbud juga bekerja sama dengan berbagai kementerian/ lembaga terkait Pendidikan Bela Negara, Pencegahan Radikalisme/Terrorisme, serta Literasi Media/Digital, salah satunya adalah dengan Kementerian Pertahanan. Bentuk kerja sama lain yang dilakukan Kemendikbud adalah menggelar Diklat

Bela Negara bekerja sama dengan Aliansi Indonesia Damai yang menasar siswa dan guru, serta kerja sama dengan Institute Maarif untuk Pelatihan Jurnalisme Kebinekaan. Usaha-usaha yang telah dilakukan Kemendikbud merupakan wujud pelibatan sekolah dan komunitas dalam meningkatkan karakter Bela Negara pada guru dan siswa di Indonesia. ■





NEGARA HADIR MEWUJUDKAN BUKU MURAH, BERMUTU, DAN MERATA

Sudah sepatutnya kita semakin optimis dengan perkembangan perbukuan dan literasi nasional di Indonesia, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Sistem Perbukuan pada 24 Mei 2017 yang membawa nafas segar dalam sistem perbukuan dan literasi nasional.

“Perlu disadari, bangsa berbudaya literasi yang baik merupakan salah satu ciri bangsa yang cerdas. Sistem perbukuan dapat menjawab berbagai permasalahan dan tantangan perbukuan secara nasional, dalam rangka mendorong tumbuhnya literasi masyarakat agar dapat berperan lebih baik dalam tingkat global,” ungkap Menteri Muhadjir. Harapan untuk menumbuhkembangkan budaya literasi masyarakat ini tercapai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) oleh Presiden Jokowi pada tanggal 24 Mei 2017. UU Sisbuk ini menjadi landasan bagi negara dalam memenuhi salah satu tujuannya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui suatu sistem perbukuan.

Menilik dari sejarahnya, undang-undang yang mengatur perbukuan sudah digagas sejak tahun 1975 oleh Ajip Rosidi yang kala itu menjadi Ketua IKAPI dalam sebuah rapat di depan parlemen. Beliau menjelaskan bahwa diperlukan suatu landasan hukum yang memberikan jaminan kepastian bagi para pelaku perbukuan, suatu hal yang dirasa masih kurang mendapat perhatian saat itu. Selanjutnya, ide mengenai undang-undang tentang perbukuan juga

dicetuskan pada saat Kongres Perbukuan Nasional tahun 1995 yang digagas oleh Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Empat puluh satu tahun setelah ide mengenai UU tentang perbukuan digagas, Pemerintah bersama DPR melahirkan UU Sisbuk.

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Menteri Muhadjir di atas, Ketua Komisi X DPR, Teuku Riefky Harsya dalam laporan Sidang Paripurna mengatakan RUU Sistem Perbukuan disusun berdasarkan kebutuhan dalam menjawab permasalahan dalam pembangunan kompetensi masyarakat, yakni berbasis pengetahuan melalui buku. Pasalnya, minat baca yang rendah masyarakat menjadi potret tersendiri terhadap kualitas sumber daya manusia.

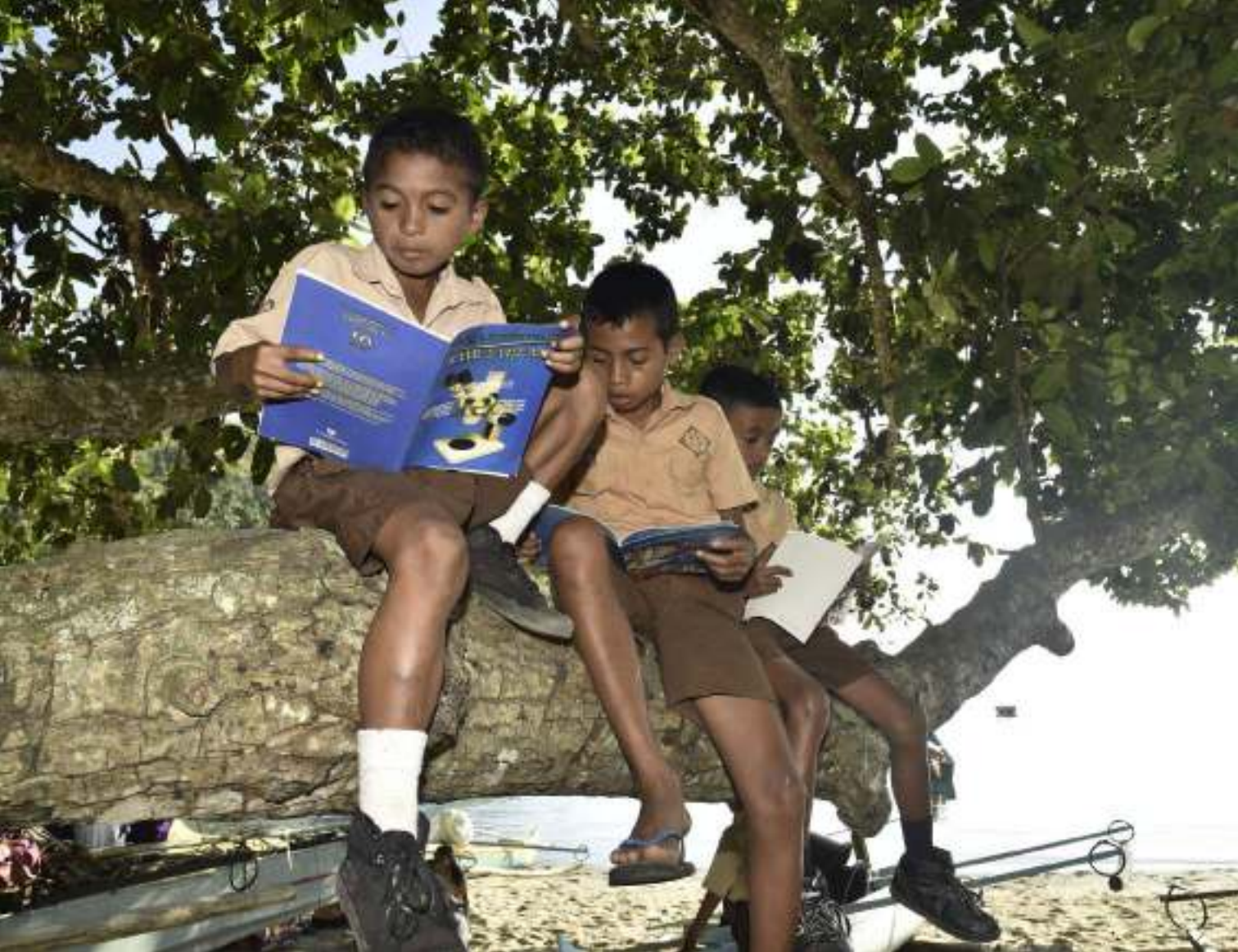
Pernyataan tersebut tidak berlebihan, sebab merujuk hasil kajian UNESCO pada tahun 2012 menyebutkan bahwa minat baca orang Indonesia hanya 0,001. Artinya, hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang memiliki minat baca serius. Dari total 61 negara, Indonesia berada di peringkat 60 dengan tingkat literasi rendah. Padahal menurut UNESCO, literasi rendah mengakibatkan kehilangan atau penurunan produktivitas, tingginya beban biaya

kesehatan, kehilangan proses pendidikan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial dan terbatasnya hak advokasi akibat rendahnya partisipasi sosial dan politik.

Permasalahan tersebut coba dijawab melalui UU Sisbuk yang memiliki konsep utama terjaminnya buku yang murah, bermutu, dan merata (3M). “Konsep 3M ini untuk mendorong peningkatan daya pikat buku yang erat hubungannya dengan daya literasi. Daya pikat itu terdiri atas konten/materi, desain/artistik, dan harga,” ujar Sutan Adil Hendra, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Sistem Perbukuan.

Selanjutnya, UU Sisbuk memperjelas tugas dan fungsi serta kedudukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku perbukuan, dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem perbukuan yang sehat. Dengan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, UU Sisbuk ini diharapkan mampu mendorong pembinaan pelaku perbukuan secara profesional serta keterlibatan aktif dari masyarakat untuk mendukung sistem tata kelola perbukuan yang sistematis, menyeluruh, dan terpadu.

Meskipun menitikberatkan pada pengaturan buku pendidikan, UU Sisbuk juga tetap memperhatikan



UU Sisbuk Perbukuan menjamin buku yang murah, bermutu, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

pengaturan bagi buku umum. Khusus terkait buku pendidikan, Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk menyusun dan menjamin tersedianya buku teks utama untuk pembelajaran bagi peserta didik. Namun demikian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno, menuturkan bahwa UU Sisbuk ini tetap mempertimbangkan keberadaan industri perbukuan dan juga keuangan negara. Terkait dengan

pengawasan buku, UU Sisbuk juga diharapkan mampu menciptakan suatu mekanisme pengawasan terhadap sistem perbukuan dan substansi buku yang melibatkan pemangku kepentingan terkait termasuk Kejaksaan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir, sebab mekanisme pengawasan dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip edukatif dan preventif. UU Sisbuk tidak dimaksudkan membatasi kebebasan berekspresi dan berkreasi, namun mendorong kreativitas

yang bertanggungjawab, berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan jati diri bangsa. Dengan demikian, di masa mendatang tidak akan ada lagi buku-buku yang beredar di masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Saat ini sedang disusun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai mandat dari UU Sisbuk. Peraturan pelaksana ini akan mengatur secara lebih rinci norma-norma yang diatur dalam UU Sisbuk tersebut. ■



GERAKAN LITERASI NASIONAL

Pola peningkatan literasi bangsa perlu dibingkai dalam sebuah gerakan nasional yang terintegrasi, tidak parsial, sendiri-sendiri, atau ditentukan oleh kelompok tertentu.

Gerakan Literasi Nasional (GLN) merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antarunit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. Gerakan ini dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak, mulai dari ranah keluarga sampai ke sekolah dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pola peningkatan literasi bangsa perlu dibingkai dalam sebuah gerakan nasional yang terintegrasi, tidak parsial, sendiri-sendiri, atau ditentukan oleh kelompok tertentu. Gerakan literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, pegiat literasi, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan publik dalam setiap kegiatan literasi menjadi sangat penting untuk memastikan dampak positif dari gerakan peningkatan daya saing bangsa.

Pada tahun 2017, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diberi amanah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Koordinator GLN. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain penajaman konsep GLN, Diskusi Kelompok Terpumpun dengan pakar dan pegiat literasi, lokakarya penyusunan peta jalan, panduan, dan materi pendukung GLN, Diskusi Kelompok Terpumpun dengan Kementerian/Lembaga, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan lintas unit utama, dan persiapan pencanangan GLN yang digelar bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2017 di Plaza Insan Berprestasi, Gedung Ki Hajar Dewantara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Beberapa kegiatan GLN yang telah diselenggarakan antara lain: lokakarya untuk mendukung implementasi gerakan literasi nasional, membangun gerakan bersama untuk memajukan literasi, menumbuhkan literasi di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan penyediaan bahan bacaan literasi.

Lokakarya untuk Mendukung

Implementasi Gerakan Literasi Nasional

Lokakarya yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bersama Ditjen GTK ini dilaksanakan pada tanggal 15 -18 Mei 2017. Lokakarya ini menghasilkan naskah buku yang akan menjadi rujukan dan panduan bagi sekolah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan GLN.

“Literasi merupakan tanggung jawab bersama, semua pihak baik kalangan usaha, masyarakat, dan pemerintah pusat/daerah perlu didorong untuk peduli dan terlibat di dalamnya,” ujar Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab, yang hadir pada penutupan lokakarya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Dadang Sunendar mengatakan bahwa GLN merupakan millik bersama. “Berdasarkan data dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas), ada ribuan orang menunggu 80 judul buku di Perpusnas. Artinya minat baca masyarakat itu luar biasa. Selain itu sejak diluncurkan 28 Oktober 2016, sampai saat ini jumlah pengunjung KBBI daring sudah mencapai 3.4 juta pengunjung, hal ini menunjukkan tingginya minat baca orang Indonesia terlepas dari kepentingan penggunaannya,” ujar Dadang.

Membangun Gerakan Bersama untuk Memajukan Literasi

Gerakan ini dilakukan salah satunya dengan menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Gerakan Literasi Nasional (GLN) di Aula Gedung A, Kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Maret 2017. DKT ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai kalangan, profesi, dan pegiat literasi yang sudah malang melintang di dunia literasi.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Mendikbud Bidang Inovasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma Seta menyebutkan bahwa beberapa usulan program inovasi terkait literasi adalah, (1) Gerakan Cinta Membaca dengan penyediaan pojok baca di fasilitas umum dan sekolah, Bandara, Stasiun KA, terminal bus, rumah sakit, tempat ibadah, balai desa, dsb, (2) Pemilihan Duta Literasi dari siswa SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Guru, dan tokoh yang memenuhi kriteria sebagai agen literasi, (3) Gerakan menulis buku cerita/testimoni/upaya menumbuhkembangkan literasi termasuk “Satu

Desa Satu Cerita”, saat ini banyak desa atau kota yang mempunyai cerita lokal (sejarah tentang desa/kota) tetapi masyarakat belum

mengetahui cerita tersebut, (4) Membuat situs khusus literasi, (5) Memperkuat perpustakaan daerah, (6) Olimpiade literasi untuk siswa SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan Guru, (7) Gerakan menulis 500 buku nonteks per tahun, dan (8) Memasukkan gerakan literasi nasional dalam program KKN mahasiswa, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan pengabdian masyarakat (dosen).

Peserta diskusi berjumlah 150 orang yang terdiri dari perwakilan unit utama di Kemendikbud, kementerian dan lembaga negara, akademisi, pakar pendidikan, penulis, pegiat pendidikan, pihak swasta dan pelaku usaha, serta pegiat literasi.

Menumbuhkan Literasi di Desa Kohod

Desa Kohod terletak di Kampung Sejahtera binaan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (Oase-KK) di Kampung Pintu Air, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Desa Kohod memiliki Taman Baca Masyarakat (TBM) yang bernama TBM Gatra. TBM ini didirikan dan dikelola oleh sosok muda Desa Kohod yang bernama Muhammad Yusup atau biasa dipanggil Yusup. Menurut Yusup, masyarakat bisa leluasa membaca bermacam-macam buku fiksi dan nonfiksi melalui TBM yang ia dirikan tahun lalu.

Yusup adalah sosok generasi muda Desa Kohod yang mempunyai perhatian penuh terhadap pendidikan dan literasi. Ia berupaya untuk memajukan pendidikan dan menumbuhkan literasi di Desa Kohod. Keinginannya untuk memajukan pendidikan di Desa Kohod dimulai pada tahun 2009, ia mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Anak Bangsa di teras rumahnya.

Saat ini, PAUD tersebut telah menghasilkan produk berbasis ekonomi kreatif yakni kerupuk dan stik ikan lele yang juga ikut dipamerkan pada acara itu.

Kemudian, pada tahun 2012, ia mendirikan SMP Garuda Teknologi Pantura dengan menggunakan tenda masjid. Selanjutnya, pada tahun 2015, ia baru mengantongi izin





untuk mendirikan gedung. Pada tahun 2016, ia mendirikan SMK Garuda Teknologi Pantura dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Gatra. Semangatnya untuk memajukan pendidikan tidak berhenti, pada awal tahun 2017, ia membuka Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Gatra dan kursus komputer.

Pada kesempatan yang sama, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kemendikbud yang diwakili oleh Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas, Nilam Suri memberikan bantuan berupa buku bahan bacaan literasi kepada TBM Gatra.

Penyediaan Bahan Baca Literasi

Salah satu hal yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan dalam menyukseskan Gerakan Literasi Nasional adalah penyediaan bahan bacaan literasi. Pada tahun 2016 Pusat Pembinaan telah menghasilkan 165 bahan bacaan yang berupa cerita rakyat Indonesia yang telah mendapatkan SK Kelayakan dan Penjenjangan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk). Bacaan tersebut telah diunggah di laman Badan Bahasa dan di laman Rumah Belajar Pustekkom Kemendikbud sehingga masyarakat bisa mengunduhnya secara cuma-cuma. Delapan judul di antaranya

terdapat dalam versi android yang dapat diunduh melalui *Google Playstore*. Sejumlah 165 cerita rakyat Indonesia ini telah dicetak oleh Direktorat SD, SMP, dan SMA untuk disebarluaskan di sekolah-sekolah. Di samping itu, 28 judul di antaranya telah dipilih oleh Sekretariat Kepresidenan untuk dicetak sebanyak 30 ribu eksemplar dan disebarluaskan kepada masyarakat dalam kunjungan-kunjungan Presiden RI.

Tahun 2017, penyediaan bahan bacaan literasi memiliki lima tema yaitu, lanskap dan perubahan sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan, kekayaan bahasa daerah, pelajaran penting dari tokoh-tokoh Indonesia, kuliner Indonesia, dan arsitektur tradisional Indonesia. Metode yang digunakan dalam penyediaan bahan bacaan tersebut adalah sayembara. Di samping itu, tema cerita rakyat juga dimunculkan oleh Balai/Kantor Bahasa. Tercatat sejumlah 138 bahan bacaan literasi telah lolos penilaian kelayakan dan penjenjangan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan pada tahun 2017 ini. ■

GERAKAN MEMBERANTAS TUNAAKSARA DI PAPUA

Angka rata-rata warga tunaaksara di Papua dan Papua Barat terbilang masih cukup tinggi. Bahkan di daerah tertentu, angka tersebut mencapai hingga 80 persen. Permasalahan ini terkait dengan kemiskinan sehingga diperlukan percepatan program keaksaraan terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2014, Papua dan Nusa Tenggara Barat adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Indonesia. Papua menjadi provinsi dengan persentase jumlah tunaaksara terbanyak di Indonesia berdasarkan jumlah penduduknya, yakni 28 persen dari total penduduk Papua.

Data Kemendikbud tahun 2016 dalam skala nasional menyebutkan Papua berada di peringkat pertama untuk angka tunaaksara, yakni sebesar 34,8 persen atau setara dengan 607.879 jiwa. Provinsi Papua memiliki angka tunaaksara dengan rentang usia 15-59 tahun sebesar 28,75 persen, di mana angka ini merupakan angka tunaaksara tertinggi di Indonesia. Hal ini berarti jumlah tunaaksara di Papua lebih

banyak jika dibandingkan rata-rata nasional.

Dilihat dari sebaran di masing-masing wilayah, sebanyak 16 kabupaten/kota di Papua memiliki angka tunaaksara di atas 30 persen. Wilayah yang memiliki angka tunaaksara tertinggi adalah Kabupaten Intan Jaya, yaitu sebesar 70,73 persen. Wilayah yang memiliki tunaaksara terendah adalah Kota Jayapura, yaitu sebesar 5,07 persen. Jika dilihat dari perbedaan gender, tampak bahwa perempuan memiliki angka tunaaksara lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki, kecuali pada Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Deiyai.

Upaya memberantas angka tunaaksara di Papua dan Papua Barat kini semakin menjadi prioritas. Untuk mempercepat layanan pendidikan keaksaraan, sedikitnya separuh anggaran pemberantasan tunaaksara pemerintah pusat difokuskan untuk Papua dan Papua Barat. Selain dari pemerintah pusat, dukungan anggaran yang cukup dari Pemerintah Papua dan Papua Barat dibutuhkan

untuk pemberantasan tunaaksara dalam 4-5 tahun mendatang.

Kemendikbud secara khusus telah merumuskan Program Afirmasi Pendidikan Keaksaraan (APIK) untuk pengentasan tunaaksara di Papua.

Pendekatan yang dilakukan dalam program ini juga memperhatikan kearifan lokal. Implementasi APIK dilakukan dengan mengembangkan strategi yang utuh dan menyeluruh, melibatkan semua satuan pendidikan baik formal maupun nonformal, di antaranya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus dan pelatihan (LKP), sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi sosial/keagamaan. Untuk Perguruan Tinggi bahkan dikembangkan program Kuliah Kerja Nyata Tematik yang dikhususkan bagi pemberantasan tunaaksara di Papua dan Papua Barat.

Persoalan tunaaksara di Papua juga bukan hanya dialami orang dewasa, tetapi juga dialami anak usia sekolah. Karena itu diperlukan gagasan integrasi pendidikan formal dan nonformal agar anak-anak putus sekolah mendapatkan layanan pendidikan. Untuk



Siswa tingkat SMP yang masih kesulitan dalam menulis

itu sejak tahun 2013, Ditjen PAUD dan Dikmas telah mengembangkan program layanan khusus percepatan pengentasan tunaakhsara di Papua dan Papua Barat. Program ini diklaim berhasil menurunkan masalah keaksaraan menjadi 34,38 persen. Wilayah yang menjadi prioritas program layanan khusus adalah di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Memberamo Tengah. Sementara di Papua Barat, di antaranya Kabupaten

Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kota Sorong.

Persoalan tunaakhsara di Papua seringkali terkait dengan kemiskinan, keterisolasian, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Faktor kemiskinan masih menjadi kendala utama dalam pemberantasan tuna aksara di Papua. Pemberantasan buta aksara pun tidak hanya berorientasi pada kemampuan menulis dan membaca, tetapi perlu diawali dengan pemetaan yang baik dan pemberdayaan SDM dalam prosesnya.

Pemetaan wilayah sasaran dilakukan dengan melihat medan atau geografis, dan mengklasifikasikan wilayah-wilayah yang sangat terpencil, terpencil, pinggiran kota, dan kota, sehingga penuntasan tunaakhsara menjadi lebih jelas. Pemetaan yang baik akan membantu mengatasi

soal mobilisasi yang menjadi kendala selama ini.

Hal kedua yang penting adalah pemberdayaan SDM kampung setempat. Dinas terkait di kabupaten dapat melakukan pemberdayaan kepada mereka sehingga mereka menjadi tenaga siap, tidak hanya mengajari, tetapi juga menghidupkan kampung dengan berbagai kegiatan atau dengan mengoptimalkan pendidikan vokasi sebagai pendekatan pemberantasan tunaakhsara di Indonesia, khususnya Papua.

Pendekatan vokasi berbasis kewirausahaan jauh lebih diminati masyarakat tunaakhsara, khususnya yang sudah berusia lanjut. Belajar membaca, menulis, dan berhitung (calistung) bagi tuna aksara berusia lanjut umumnya hanya diminati untuk ikut sekali atau dua kali pembelajaran. Dengan (vokasi) kewirausahaan, peserta bisa mendapat nilai lebih, yakni keahlian.

Selain mengajarkan calistung kepada masyarakat, pendekatan vokasi berbasis kewirausahaan juga memberikan pengalaman dan pengetahuan berwirausaha kepada para peserta. Para peserta bisa memilih bidang vokasi sesuai minat mereka.

Pendekatan vokasi telah digagas sejak tahun 2011. Sejauh ini, program penuntasan aksara itu telah bergulir di 25 kabupaten di Indonesia yang rencananya akan terus bertambah setiap tahunnya. Banyak cara diterapkan untuk penuntasan tunaakhsara, tapi pendekatan yang memiliki potensi ekonomi masih menjadi yang paling menarik masyarakat. ■

Salah satu peserta APIK memberanikan diri maju menjawab salah satu pertanyaan dari guru





Ibu Wida Muhadjir (tengah) membacakan dongeng untuk anak-anak PAUD KM O pada sebuah acara. Kegiatan mendongeng mengajak anak berimajinasi sambil belajar tentang budi pekerti dari tokoh dongeng.



Ibu negara, Iriana Jokowi menyuapkan makan kepada salah seorang anak pada salah satu acara Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS)



Sujatmi Notomiharjo, ibunda Presiden Jokowi, menerima anugerah Orangtua Hebat karena dinilai sosok yang berhasil mendidik, mengasuh, dan membimbing sang putra menjadi sosok berkarakter dan berprestasi.

APRESIASI ORANG TUA HEBAT

Telah diyakini dari dulu, bahwa keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama (madrasatul ula) bagi setiap anak. Setiap anak mendapatkan didikan dan bimbingan pertama kali dari keluarganya. Dikatakan juga bahwa pendidikan di keluarga merupakan pendidikan yang paling utama karena sebagian besar kehidupan anak adalah di dalam keluarga. Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga terdekat lainnya.

Sebagaimana disampaikan Ki Hadjar Dewantara bahwa di alam kehidupan seorang anak terdapat alam keluarga, perguruan, dan pergerakan atau masyarakat. Jadi baik buruknya akhlak seseorang dan tinggi rendahnya kecakapan atau keahlian seseorang dipengaruhi oleh tiga lingkungan pendidikan yakni keluarga, sekolah dan masyarakat yang dikenal dengan istilah Tri Pusat Pendidikan.

Bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat di mana dia mampu menjadi diri pribadi atau diri sendiri. Keluarga juga merupakan wadah bagi anak untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi

sosialnya. Di samping itu, keluarga merupakan tempat belajar bagi anak dalam segala sikap untuk berbakti kepada Tuhan sebagai perwujudan nilai hidup yang tertinggi. Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang pertama dan utama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anak adalah orang tua. Di lingkungan keluarga yang baik, maka akan lahir anak-anak yang memiliki masa depan yang baik pula.

Di tengah masalah generasi bangsa yang menunjukkan pengikisan jati diri dan moralitas, dengan ditandai maraknya tawuran, narkoba, dan pergaulan bebas, urgensi pendidikan keluarga

sangat dibutuhkan. Keluarga harus segera kembali pada posisinya dan bukan hanya menyerahkan pendidikan kepada sekolah semata. Keluarga harus turut serta dalam membentuk karakter anak-anak di masa depan.

Demi terwujudnya pendidikan keluarga, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) memberikan apresiasi terhadap model peran orang tua dalam pembentukan anak di keluarga. Apresiasi tersebut diberikan kepada orang tua yang telah menjalankan fungsi dan perannya dalam mendidik, mengasuh, membimbing anak-anaknya, sehingga menghasilkan anak yang berkarakter dan berprestasi. Untuk pertama kalinya, Kemendikbud menyelenggarakan Pemilihan Sepuluh Orang Tua Hebat dalam Acara Apresiasi Pendidikan Keluarga yang diselenggarakan di Taman Izmail Marzuki pada Rabu, 9 Agustus 2017.

Sepuluh orang tua hebat itu dinilai telah berhasil memberikan teladan yang baik dan mengantarkan putra dan putrinya menjadi orang yang sukses, sehingga pemerintah memberikan penghargaan kepada mereka. Dengan diberikannya penghargaan ini diharapkan orang tua hebat tersebut dapat menularkan praktik terbaiknya kepada orang tua lainnya, sehingga akan semakin banyak tumbuh orang tua-orang tua hebat di Indonesia.

Salah satu penerima Apresiasi Pendidikan Keluarga untuk Orang Tua Hebat adalah Ibu Sujiatmi Notomiharjo, yakni Ibunda dari Presiden Republik Indonesia, Joko

Widodo. Ibunda Presiden diberikan apresiasi dengan pertimbangan keberhasilannya dalam mendidik, mengasuh, dan membimbing anaknya sehingga menjadikan anaknya yang berkarakter dan berprestasi hingga berhasil menjadi seorang presiden. Ibunda Presiden tentu saja dapat menjadi teladan bagi orang tua lainnya. Ibu Sujiatmi dinilai sebagai keluarga hebat karena berhasil mengantarkan anaknya menjadi orang nomor satu di Indonesia.

"Anak saya bisa menjadi presiden itu anugerah dari Allah. Allah memberi kemudahan dan kemurahan kepada keluarga saya yang begitu besar dan hebat. Saya sebagai orang tua ya banyak-banyak bersyukur. Saya senang mendapat penghargaan ini, tapi perasaan saya tidak hebat, orang tua lain yang dapat penghargaan yang lebih hebat," kata Sujiatmi merendah.

Selain Ibunda Presiden, Apresiasi Orang Tua Hebat juga diberikan kepada Ngadiyo dan Lasiyem, pasangan tukang sayur dari Sleman, Yogyakarta. Di tengah keterbatasannya, mereka mampu mendidik putranya, Janu Muhammad, hingga berhasil menjadi orang hebat. Janu saat ini berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan magisternya di Inggris.

Selanjutnya Apresiasi Orang Tua Hebat diberikan kepada La Maeni dan Wa Jaharia dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara; Miftahuddin dan Marmina dari Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan; Amran dan Dahlia dari Kabupaten Indragiri Hilir, Riau; I Wayan Karma dan Ni Nyoman Mariani dari Kabupaten Tabanan, Bali;

Misiyanto dan Siti Suswanti dari Kota Semarang, Jawa Tengah; (Alm) La Salenda dan Hj. Wa Ipo dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara; Basarudin dan Samsilah dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu; serta Amin Usman dan Maria Erry Susanti dari Kota Depok Selatan, Jawa Barat.

Apresiasi Pendidikan Keluarga 2017 mengangkat tema "Gerakan Pendidikan Keluarga untuk Mengembangkan Karakter dan Budaya Prestasi Anak". Apresiasi ini diselenggarakan untuk menyebarkan informasi kepada orang tua, peserta didik, kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya pelibatan keluarga dalam pendidikan anak. ■



Ratusan pelajar kota Ambon,
Maluku berkumpul di Lapangan
Merdeka, menyatakan kesiapannya
menghadapi Ujian Nasional dan
bertekad menjunjung tinggi
kejujuran.





MENDULANG PRESTASI, BERBEKAL KEJUJURAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyebut pada tahun 2017 ini, Indonesia mencatat sejarah baru dalam penggunaan teknologi melalui penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). UNBK tahun 2017 digelar di 30.577 sekolah/madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dengan total peserta 3.731.099 siswa. Bahkan pada jenjang SMK terdapat beberapa provinsi yang telah

100% menjalankan UNBK, yaitu Bangka Belitung, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan (Plaza Insan Berprestasi, Kemendikbud 2/5/2017).

Pelaksanaan UNBK di sekolah menggunakan sistem semi daring, yaitu soal dikirim dari server pusat secara daring (online) melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal sekolah. Kemudian saat ujian berlangsung, siswa dilayani oleh server lokal (sekolah)

secara luring (*offline*). Hasil ujian kemudian dikirim kembali dari server lokal ke server pusat secara daring dengan mengunggah (*upload*). Setiap peserta tes mendapatkan paket soal tes yang berbeda beda, sehingga dengan UNBK ini bias diperoleh hasil tes yang valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelenggaraan UNBK dilaksanakan dalam waktu yang berbeda beda untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK.



Peserta UN Tahun Pelajaran 2016/2017					
Jenjang/ Satuan Pendidikan	Peserta UNKP		Peserta UNBK		Jumlah
	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	
SMP	2.064.918	64.34%	1.144.320	65.66%	3.209.238
MTs	79.715	79.38%	205.424	20.62%	996.139
SMA	451.428	32.04%	957.631	67.96%	1.409.059
MA	216.313	53.68%	186.663	46.32%	402.976
SMK	150.885	11.37%	1.144.294	63.15%	1.327.246
Paket B/Wustha	115.631	85.08%	20.282	14.92%	135.913
Paket C	207.549	83.71%	40.388	16.29%	247.937
Jumlah Total	3.997.409	51.72%	3.731.099	48.28%	7.728.508

Data di atas menunjukkan bahwa persentase peserta Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) sebesar 51,72 persen sedikit lebih



besar dari peserta UNBK (48,28 persen) di tahun 2017 ini. Diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang jumlah peserta UNBK dapat lebih ditingkatkan lagi, sampai pada suatu

saat nanti bisa mencapai 100 persen.

Terkait penyelenggaraan UNBK yang lebih baik, Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Kiki Yulianti



menegaskan tidak terjadi kebocoran soal dan kunci jawaban. "Pihak Kemendikbud memastikan tidak terjadinya kecurangan tersebut karena pelaksanaan UNBK sudah berbasis sistem sehingga keamanan pun dijamin karena soal ujian baru bisa diakses atau diunduh 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Sedangkan untuk masalah teknis seperti listrik, di beberapa tempat sudah bisa diatasi apabila ada mati listrik mendadak langsung disediakan genset. Hal ini juga karena

Kemendikbud sudah menjalin kerja sama dan perjanjian dengan PLN," katanya.

Penyelenggaraan UNBK, Memperkuat Integritas Siswa Penyelenggaraan UNBK membawa dampak yang cukup signifikan terhadap

pengembangan karakter siswa. Menteri Muhadjir mengatakan, sekolah-sekolah yang tahun lalu menerapkan UNBK dan memiliki indeks integritas tinggi, tahun ini indeks integritasnya meningkat sebesar 3,39 poin. Sementara sekolah yang tahun lalu mengikuti UNKP dengan indeks integritas rendah, kemudian tahun ini mengikuti UNBK, memiliki peningkatan indeks integritas. Hasil tersebut menjadi indikator bahwa UNBK adalah moda pengadministrasian tes yang lebih menjamin integritas pelaksanaan dan memberi gambaran capaian yang sesungguhnya.

Hasil yang menggembirakan juga ditunjukkan oleh tiga provinsi yang pada tahun-tahun sebelumnya sudah memiliki indeks integritas tinggi, kemudian di tahun 2017 seluruh sekolah di wilayahnya beralih metode menjadi UNBK, yaitu Bangka Belitung, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Nilai UN di ketiga provinsi itu meningkat, yaitu di Provinsi Bangka Belitung meningkat 4,31 poin; DI Yogyakarta meningkat 4,2 poin; dan DKI Jakarta meningkat 2,07 poin.

Sementara itu beberapa sekolah merasakan hasil yang positif dengan pelaksanaan Ujian Nasional pada tahun 2017 ini, baik yang masih menggunakan UNKP maupun UNBK. Apalagi, sejak tahun 2015, pelaksanaan UN tidak lagi menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikannya untuk dapat naik ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Hal ini dapat dilihat dari hasil Ujian Nasional di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Magelang. Kepala SMAN 1 Kota Magelang Suchyho

Wibowo mengatakan di sekolah yang dipimpinnya itu terdapat 283 siswa kelas XII yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK) yang terdiri atas 176 siswa jurusan IPA dan 117 siswa jurusan IPS. Sebanyak 23 siswa di antaranya meraih nilai 100 untuk mata uji Matematika. "Dari 23 siswa peraih nilai sempurna tersebut, terdiri atas 21 siswa jurusan IPS dan dua siswa jurusan IPA. Jumlah Nilai rata-rata tertinggi di SMA Negeri 1 Kota Magelang untuk jurusan IPA 379,0 dan terendah 262,0 dan untuk jurusan IPS tertinggi 372,0 dan terendah 291,0," katanya.

Ada juga beberapa sekolah yang berpendapat UNBK lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dengan ujian secara tertulis. Hal itu diutarakan oleh Panitia UNBK SMAN 4 Jakarta, Tetty Helena. "Lebih hemat, karena tidak perlu menggunakan kertas, bayangkan berapa banyak pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas ujian. Selain itu, penyelenggaraan UNBK juga lebih praktis dan tidak menyita waktu karena UN tertulis lebih menyita waktu saat persiapan ujian karena harus memastikan soal dapat tersimpan dengan baik sebelum ujian dimulai serta para panitia bisa sampai bergadang untuk menyimpan soal ujian. Kalau UNBK persiapannya lebih ringkas karena soal sudah ada di server, kemudian pengawas yang dibutuhkan pun lebih sedikit, kalau dahulu polisi juga ikut terlibat mengamankan ujian, kalau sekarang enggak, untuk satu ruangan hanya diawasi oleh dua orang guru," tuturnya.

SMKN 38 Jakarta yang menyelenggarakan UNBK juga

merasakan hal yang sama dengan SMAN 4 Jakarta. Kepala Sekolah SMK Negeri 38 Jakarta, Siti Habibah, mengatakan, penyelenggaraan UNBK lebih ekonomis, dan dapat meningkatkan integritas siswa dalam menjalani ujian, karena siswa tidak dapat menyontek saat ujian. "Setiap ID siswa akan mengerjakan soal yang berbeda dengan siswa yang lain. Integritas ini lebih penting dibandingkan dengan nilai ujian yang tinggi. Apalagi saat masuk ke ruang ujian baik peserta maupun pengawas ujian tidak diizinkan membawa ponsel, sehingga penyelenggaraan ujian menjadi lebih baik dan bersih," katanya.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, H Noor Fahmi. "Sebanyak 21.942 siswa tingkat MTS itu mengikuti Ujian Nasional yang berlangsung di Provinsi Kalimantan Selatan. Sejauh pantauan kami berjalan lancar, bahkan saya juga sudah memantau langsung ke beberapa sekolah dan untuk sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebanyak 21 MTs. Pantauan kami MTs yang melaksanakan UNBK sangat bagus, ini perlu ditingkatkan jumlahnya pada tahun depan, namun memang saat ini hanya sedikit MTs yang melaksanakan UNBK secara mandiri atau memiliki fasilitas komputer sendiri, selebihnya menginduk ke sekolah lain atau minjam fasilitas ke SMA/SMK. Tapi meskipun banyak yang minjam tempat fasilitas komputer ke sekolah lain, tapi kita pantau siswa tetap bisa dan tenang-tenang saja mengerjakannya. Sedangkan untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA) UN berjalan sukses dan beberapa



Searah jarum jam, dari pojok kiri atas pesan-pesan menjelang pelaksanaan Ujian Nasional SMA/SMK 2017 disampaikan antara lain oleh Anggunpiputri, Benny Kainama dan Najelaa Shihab.

MA menggelar UNBK. Kita targetkan UN kali ini 100 persen lulus, bahkan harus ada yang mendapatkan nilai tertinggi secara provinsi hingga nasional,” ujarnya.

Meski begitu, Kemendikbud tidak memaksa dan memberatkan satuan pendidikan dengan mewajibkan sekolah mengimplementasikan UNBK. Jika fasilitas sekolah dinilai tidak mendukung dalam pelaksanaan UNBK, bahkan tidak memiliki fasilitas UNBK, satuan pendidikan dapat

direkomendasikan bergabung dengan satuan pendidikan lain yang melaksanakan UNBK. Bahkan di beberapa sekolah, orang tua secara sukarela meminjamkan laptop yang ada di rumah agar dapat dipakai dalam pelaksanaan UNBK.

Selain UNBK, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, mata pelajaran dan kondisi satuan pendidikan, penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) tetap diperlukan. Sebagai sebuah instrumen penentu kualitas belajar siswa, pelaksanaan US ditingkatkan mutunya melalui pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), yaitu penilaian hasil belajar di tingkat satuan

pendidikan yang dilaksanakan secara nasional dan dilakukan penilaian terhadap mata pelajaran tertentu. USBN dilaksanakan sepenuhnya oleh guru dan kepala sekolah, melalui instrumen soal ujian mata pelajaran tertentu berbentuk pilihan ganda dan esai yang disusun oleh pemerintah pusat (20-25 persen) bersama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan persentase 75-80 persen. MGMP adalah suatu organisasi guru yang dibentuk untuk menjadi forum komunikasi yang bertujuan untuk menjadi

forum komunikasi dan memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam tugasnya sehari-hari di lapangan.

UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan peserta didik. Kelulusan peserta didik ditentukan oleh nilai US dan USBN. Dengan begitu diharapkan sekolah dapat lebih objektif dalam menentukan kualitas siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan proses belajar siswa. Untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), peserta didik bisa memilih satu mata pelajaran sesuai dengan minatnya sehingga dapat memberikan pilihan bagi siswa untuk memberikan usaha terbaiknya di mata pelajaran yang mereka sukai.

Sebagai variasi instrumen penilaian hasil belajar siswa, baik UN, US maupun USBN merupakan kebijakan yang telah melalui serangkaian proses pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan yang bertujuan untuk mengukur ketercapaian hasil belajar siswa yang diharapkan dapat memberikan pemetaan hasil belajar siswa secara nasional serta diharapkan dapat meningkatkan pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun dan memiliki derajat mutu yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, maupun integritas siswa dalam setiap proses pembelajaran, salah satunya peningkatan daya berpikir kritis/*critical thinking* dan kreativitas siswa. ■

SERTIFIKASI GURU: UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN GURU

"Guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa" – Ki Hajar Dewantara



Dalam perannya memegang jabatan profesional yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik di pendidikan formal, guru dituntut memiliki kepribadian, kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Maka dari itu juga, guru harus disiapkan melalui program pendidikan akademik minimal setingkat S-1/D-IV lalu dilanjutkan dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Bagi yang sudah berstatus guru, Program PPG dalam Jabatan dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip menjaga mutu, dimulai sejak seleksi, proses pembelajaran dan penilaian, hingga uji kompetensi. Dengan

demikian, diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, serta cinta tanah air. PPG diharapkan dapat menjadi upaya konkrit untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru sehingga, tentunya, dapat meningkatkan kualitas pendidikan bangsa ini.

Dalam kurun waktu 10 tahun, proses sertifikasi guru yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) telah mencapai angka signifikan. UUGD diberlakukan sejak tanggal 30 Desember 2005 dan sejak itu Kemendikbud mulai meningkatkan sertifikasi guru

secara berkelanjutan. Langkah persiapan dilakukan pada tahun 2006 dan sertifikasi dimulai pada tahun 2007.

Namun, dalam perjalanannya, jumlah guru terus bertambah sehingga belum semua guru dapat tersertifikasi, walaupun apabila dilihat dari berdasarkan angka statistik, data guru tahun 2005 telah tuntas tersertifikasi. Di sisi lain, pemerintah masih memerlukan guru profesional dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, pemerintah akan membiayai sertifikasi guru yang diangkat hingga 2015. Pihak pemerintah, melalui Kemendikbud, berkomitmen akan menyelesaikan dan menuntaskan proses sertifikasi guru hingga tahun 2019. Untuk semua itu, pemerintah harus menyiapkan anggaran terlebih dulu dan pihak Kemendikbud harus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti), terkait kapasitas Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) yang akan melaksanakan proses sertifikasi guru melalui PPG. Sejak tahun 2007 hingga 2017, total guru yang telah tersertifikasi mencapai 1.471.812 orang guru. ■



BERAGAM APRESIASI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Urgensi Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan

Lahirnya UU Guru dan Dosen merupakan bentuk penghargaan Pemerintah bagi guru. UU Guru dan Dosen mengamanahkan bahwa guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Demikian juga, guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Penghargaan Pemenang Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Guru Berdedikasi Tingkat Nasional

Menjadi guru berprestasi adalah dambaan bagi semua guru, namun untuk dapat meraihnya bukanlah hal yang mudah. Untuk mampu mengikuti lomba guru berprestasi tidak bisa dilakukan dengan instan, butuh persiapan yang sangat panjang serta integritas yang tinggi.

Sistem penilaian untuk menentukan peringkat guru berprestasi dilakukan secara ketat, yaitu melalui uji tertulis, tes kepribadian, presentasi karya akademik, wawancara, dan penilaian portofolio dengan tahapan lomba mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Guru yang mampu mencapai prestasi terbaik melalui beberapa jenis teknik penilaian inilah yang akan memperoleh predikat sebagai guru berprestasi tingkat nasional.

“Dapat berada di antara guru-guru berprestasi dari seluruh Indonesia adalah impian saya. Selain sebagai ajang berlomba, kegiatan ini sekaligus ajang untuk memupuk rasa persatuan dengan guru-guru berprestasi dari seluruh Indonesia. Kami dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pendidikan, bercerita tentang sekolah dan daerah kami” ucap I Made Nuryata Pemenang Guru Berprestasi Tingkat SMK.

Guru berprestasi merupakan guru yang menghasilkan karya kreatif atau inovatif, antara lain melalui: pembaruan (inovasi) dalam pembelajaran atau bimbingan; penemuan teknologi tepat guna dalam bidang pendidikan;

Regulasi Penghargaan dan Perlindungan UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

Pasal 14

Dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalitas Guru Berhak:

- b. Mendapat Promosi dan Penghargaan Sesuai Dengan Tugas dan Prestasi Kerja
- c. Memperoleh Perlindungan Dalam Melaksanakan Tugas dan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pasal 37

- 3. Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

Pasal 36

- 1. Guru Yang Berprestasi, Berdedikasi Luar Biasa, dan/atau Bertugas Di Daerah Khusus Berhak Memperoleh Penghargaan
- 2. Guru Yang Gugur Dalam Melaksanakan Tugas Di Daerah Khusus Memperoleh Penghargaan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dan/Atau Masyarakat.

Pasal 39

- 1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- 2. Perlindungan meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3. Perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- 4. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/ pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- 5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

penulisan buku fiksi/nonfiksi di bidang pendidikan atau sastra Indonesia dan sastra daerah; penciptaan karya seni; atau karya atau prestasi di bidang olahraga. Mereka juga merupakan guru yang secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

“Saat berkompetisi di Jakarta hal yang pertama saya rasakan adalah merasa menjadi guru yang sangat beruntung. Di Jakarta saya bertemu dengan guru-guru hebat dengan berbagai latar belakang ilmu pengetahuan. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Saya banyak belajar dari mereka tentang pengalaman mengajar” ucap Ryan Aminullah Yassin, Salah seorang Pemenang Guru Berprestasi.

Mendikbud Muhadjir menyampaikan pesan pada Pemberian Penghargaan Guru Berprestasi “Tularkanlah pengalaman selama di sini kepada kawan sejawat di tempat masing-

masing. Hadirnya Bapak Ibu di sini berarti telah menyandang guru yang terpilih diantara yang terpilih. Bapak Ibu adalah contoh dari tempat masing-masing. Siapapun guru, dia menjadi tempat untuk bercermin, tempat belajar, dan tempat konsultasi. Ini tanggung jawab yang tidak ringan, sangat berat, tidak imbang dengan tiket dan fasilitas yang disediakan panitia selama di sini,” jelas Pak Menteri.

Pesan tersebut sangat berkesan bagi Robert Pabotak, salah seorang pemegang Lomba Guru Berprestasi “Saya akan terus berbagi, memberi inspirasi dan motivasi kepada rekan-rekan guru dan siswa, tidak hanya dengan kata-kata tetapi dengan kerja nyata, kerja keras dan disiplin. Karena menurut saya pemberian motivasi dan inspirasi akan lebih nyata lebih nyata dengan kerja keras, kerja nyata dan disiplin”, ujar Robert. ■





SIMPOSIUM GURU: BUKAN SEKEDAR GURU BIASA

Simposium guru juga ajang berkumpul, mempererat persaudaraan, dan berbagi pengalaman antar guru dari seluruh pelosok Indonesia

Guru dan Tenaga Kependidikan memiliki peran strategis dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Guru merupakan faktor yang sangat penting dalam konteks peningkatan mutu pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, dan sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dan berinteraksi dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar.

Simposium Nasional Guru dan Tenaga Kependidikan (Simposium GTK) mulai diperkenalkan sejak pertengahan September 2015. Simposium dilaksanakan pada November 2016 untuk memeriahkan puncak peringatan Hari Guru Nasional. Melalui kegiatan simposium ini, berbagai karya ilmiah dan inovasi pembelajaran guru dan tenaga kependidikan yang telah diseleksi melalui berbagai jenjang dipresentasikan.

Penyelenggaraan Simposium GTK Tingkat Nasional diharapkan dapat menjadi wahana yang berguna untuk menuangkan ide, gagasan dan mencari pemecahan isu atau permasalahan strategis tentang pendidikan dengan melibatkan unsur pakar perguruan tinggi, praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan,

LSM pendidikan, serta GTK PAUD & Dikmas Berprestasi Tingkat Nasional.

Disamping itu, simposium guru bukan hanya menjadi ajang pemberian penghargaan bagi guru berprestasi saja, namun juga ajang berkumpul, mempererat persaudaraan, dan berbagi pengalaman antar guru dari seluruh pelosok Indonesia. Seperti halnya yang diungkapkan Wahyu Nurdiyati dari Surabaya, “Alhamdulillah, pada Simposium GTK Tingkat Nasional 2016, saya berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman guru dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia. Kami dapat belajar bersama, dapat berbagi tentang pengetahuan baru dan pengalaman mengajar. Ilmu yang saya dapatkan dari teman-teman menginspirasi saya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Tentu saya berharap tahun-tahun mendatang masih punya kesempatan utk mengikuti kegiatan serupa.”

“Simposium Guru yang diselenggarakan pada tahun 2016 sangat menambah wawasan dan membuat saya lebih termotivasi. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan akhirnya menambah teman dan persaudaraan,” kata Abdul Zabar, peserta dari Kota Medan. ■



BANTUAN PEMERINTAH KEPADA KKG/MGMP TAHUN 2017

Salah satu program prioritas sesuai dengan Renstra Kemendikbud adalah peningkatan kompetensi, kinerja, dan karier guru. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai program tersebut adalah upaya untuk memantapkan struktur pengembangan mutu guru pada tingkat lokal melalui kegiatan pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) / Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Sehubungan dengan upaya pemberdayaan kelompok

kerja/musyawarah kerja guru tersebut, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar menyediakan bantuan pemerintah yang akan diberikan kepada KKG/MGMP. Pemanfaatan bantuan dana dari Pemerintah secara tepat dan terprogram akan menjadikan KKG/MGMP sebagai wadah yang tepat bagi peningkatan mutu dan profesionalisme guru.

Kegiatan KKG/MGMP diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kompetensi guru, khususnya

dalam hal penyusunan soal Ujian Sekolah SD/ Ujian Sekolah Berstandar Nasional (US-SD/USBN) dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Di samping itu, kegiatan-kegiatan KKG/MGMP juga dapat membantu guru dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan kariernya, juga memperoleh pemahaman dan kesadaran tentang perlindungan guru. Melalui KKG/MGMP, guru akan berkolaborasi dengan guru lain dalam membangun pengetahuannya dan

memecahkan masalah secara bersama-sama. Pada akhirnya sangatlah diharapkan bahwa melalui KKG/MGMP guru menyiapkan anak didik yang tangguh, kreatif, kritis, dan terampil.

Sampai saat ini masih terdapat beberapa KKG/MGMP yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan profesionalisme dan kinerja guru pendidikan dasar. Di sisi lain, KKG/MGMP yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru masih perlu dibentuk di setiap kabupaten/kota.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Purnomo Saputro (KKG Mayor Elang Subandar, Tasik Malaya, Jawa Barat). "Meningkatkan kompetensi penulisan soal sangatlah diperlukan oleh guru-guru, karena kompetensi guru tentang penulisan soal masih minim. Kebiasaan buruk yang sering terjadi adalah guru menyusun soal bukan berdasarkan kisi-kisi tetapi

soal terlebih dahulu kemudian kisi-kisi"

Pada tahun 2017, Direktorat Pembinaan Guru Dikdas telah memberikan bantuan 1657 paket bantuan kepada KKG/MGMP yang terpilih. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi pelaksanaan program di KKG/MGMP seperti yang disampaikan Asmanelli, M.Pd (KKG Gugus I Kec. BASO, Kab. Agam, Sumatera Barat)

"Dengan adanya bantuan tersebut anggota KKG kami dapat memperoleh ilmu tentang teknik penyusunan soal yang langsung diberikan oleh narasumber dari kabupaten yang telah terlatih dan kompeten tentang penyusunan soal. Sehingga kami pun bisa melahirkan soal-soal US/M yang berstandar nasioanal. Disamping itu kami juga sudah dapat melahirkan soal-soal tes formatif yang mengandung unsur HOTS. Dengan adanya bantuan Pemerintah yang kami terima anggota KKG kami juga dapat terbantu dalam

perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Karena dalam programnya kami juga mendatangkan narasumber tentang penilaian angka kredit, sehingga guru-guru di KKG kami sudah mampu membuat Dupak dan menghitung nilai angka kredit kenaikan pangkat sendiri."

Hal serupa juga diungkapkan oleh Maria Theresia Roslin S.Lana (MGMP PPKN KOMODO, Kupang, NTT) "Berkat bantuan dana pemerintah tersebut komunitas MGMP Komodo dapat mengembangkan diri dalam meningkatkan kompetensi profesional kami. Kami juga dapat menghimpun para Guru PPKN kota Kupang untuk berbagi dengan pola ASAH, ASIH, ASUH. Selain itu, kami dapat mengembangkan kompetensi penyusunan soal dengan bimbingan fasilitator dari LPMP NTT dan dapat menyusun soal USBN PPKN tingkat Kota Kupang" ■

PERLUAS AKSES DENGAN PELIBATAN MASYARAKAT UNTUK PENDIDIKAN YANG MERATA DAN BERKUALITAS

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Hal tersebut berupaya diwujudkan oleh Kemendikbud dengan memperluas akses pendidikan, termasuk di dalamnya memperbanyak infrastruktur pendidikan.

Kedatangan Menteri Muhadjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, disambut oleh kondisi infrastruktur yang masih berantakan, pascagempa berskala 6,5 skala richter (SR) pada 7 Desember 2016. Beberapa petugas telah berusaha membersihkan beberapa reruntuhan di jalan. Namun, perbaikan yang menyeluruh perlu dilakukan agar semua bisa kembali seperti semula. Gempa ini juga mengakibatkan beberapa infrastruktur yang terkait dengan pendidikan terganggu. Terdapat 65 sekolah yang mengalami kerusakan, terdiri dari 35 Sekolah Dasar (SD), 11 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 13 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan enam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu, 81 fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga mengalami kerusakan.

Kemendikbud menganggarkan Rp. 68,2 miliar untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan terkait dampak gempa Aceh. Pada tahun 2016 disalurkan sebesar Rp25,8 miliar, kemudian pada tahun anggaran 2017 dialokasikan sebesar Rp42,4 miliar. Tidak hanya mengandalkan anggaran dari Negara, Kemendikbud juga berusaha melibatkan masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana.

“Bantuan terhadap sekolah yang rusak dilakukan melalui swakelola oleh Komite Gotong Royong Sekolah. Kemendikbud juga melibatkan pihak perguruan tinggi untuk melakukan uji mutu dan kelayakan rehabilitasi sekolah yang rusak,” kata Menteri Muhadjir dalam rapat koordinasi penanganan gempa di Banda Aceh.

Membangun Infrastruktur, Perluas Kesempatan Belajar

Tidak hanya untuk daerah bencana, pembangunan infrastruktur pendidikan

juga menjadi agenda tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, diwujudkan oleh Kemendikbud dengan memperluas akses pendidikan, termasuk di dalamnya memperbanyak infrastruktur pendidikan.

Di tahun 2017, Kemendikbud sendiri telah membangun 169 unit sekolah baru (USB) dan 2.046 ruang kelas baru (RKB) yang tersebar di seluruh Indonesia. Penentuan ini didasarkan pada kebutuhan dan data-data yang masuk ke Kemendikbud melalui sistem data pokok pendidikan (dapodik) dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Selain membangun USB dan RKB, Kemendikbud juga memberikan bantuan untuk rehabilitasi ruang belajar yang rusak dan renovasi sekolah. Dampak usaha memperluas akses ini terlihat dengan adanya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah di tahun 2017. Hal ini terlihat dari grafik berikut.

Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, Kemendikbud juga berusaha melengkapi sekolah yang sudah ada dengan membangun perpustakaan, laboratorium dan ruang praktik bagi siswa. Tahun ini secara total, Kemendikbud mendirikan 2.358 ruang laboratorium/ruang praktik siswa dan 745 ruang perpustakaan. Selain itu, Kemendikbud juga menyalurkan 15.405 paket bantuan peralatan pendidikan seperti komputer, buku dan peralatan penunjang pelajaran.

Peran serta masyarakat dan keluarga dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan sangat penting. Hal ini terlihat salah satunya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, tidak hanya Kemendikbud yang terlibat tetapi juga melibatkan *stakeholder* atau pemangku

Jenis Bantuan Sarana Prasarana Kemendikbud
Januari-Oktober 2017

Unit Sekolah Baru 169 Unit
Pembangunan Ruang Kelas Baru 2.046 Ruang
Rehabilitasi Ruang Belajar 223.456 Ruang
Sekolah Yang Direnovasi 298 Unit
Bantuan Peralatan Pendidikan 15.405 Paket





SMPN Bulango Selatan, di kab. Bone Bolango. Pembangunannya dilaksanakan oleh Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru yang merupakan perwakilan warga masyarakat setempat.

kepentingan lain, misalnya dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dan orang tua. Sebagai contoh di SMK, banyak bantuan peralatan dan ruang praktik yang berasal dari kalangan DU/DI.

Salah satu wujud nyata implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah adanya keterlibatan orang tua dalam proses belajar mengajar siswa di sekolah. Keterlibatan orang tua dalam pemenuhan sarana prasarana di sekolah, contohnya terlihat di SDN 5 Lembang Cina, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

“Ini pengadaan AC (*Air Conditioner*) bukan merupakan keinginan kami, tetapi inisiatif dari orang tua. Akhirnya kami membiarkan orang tua untuk berdiskusi membahas dan menyiapkan apa yang diperlukan lewat Paguyuban Kelas,” ujar guru di SDN 5 Lembang Cina.

Paguyuban kelas ini memiliki jadwal kumpul rutin dan wadah komunikasi yang berbentuk *whatsapp group*. Perkumpulan rutin dan *whatsapp group* ini dimanfaatkan orangtua dan wali kelas untuk saling berkomunikasi mengenai perkembangan putera-puterinya di sekolah dan sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan dan bisa didukung oleh orang tua untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar di sekolah.

“Pengadaan AC ini sifatnya sukarela, iuran dari orang tua karena mereka menganggap suhu yang panas dapat menurunkan konsentrasi putera-puteri mereka dalam belajar. Sama sekali tidak ada paksaan dari sekolah,” lanjutnya. ■



Ruang Kelas yang direnovasi dengan melibatkan orangtua murid di SDN 5 Lembang Cina







KEJAR TARGET SATU DESA SATU PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program prioritas pembangunan pendidikan nasional, yang diarahkan demi mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan bertumpu pada prinsip: ketersediaan lembaga PAUD yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, keterjangkauan layanan PAUD sesuai dengan kemampuan masyarakat, kualitas layanan PAUD dalam mendidik dan mengasuh anak usia 0-6 tahun, kesetaraan layanan PAUD untuk setiap kelompok masyarakat, dan kepastian setiap anggota masyarakat dalam memperoleh layanan PAUD.

“Target Agenda Pendidikan 2030 untuk PAUD adalah memastikan seluruh anak memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan dan pendidikan pra-SD (PAUD) yang bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar,” ujar Ella Yulaelawati, Direktur Pembinaan

Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen PAUD DIKMAS Kemendikbud.

Ada tujuh persoalan mendasar terkait dengan pelaksanaan PAUD di daerah perbatasan. (1) masih rendahnya angka partisipasi anak usia dini, terutama usia 3-4 tahun yang memperoleh layanan PAUD di berbagai lembaga PAUD. (2) terbatasnya sarana, prasarana, dan fasilitas yang tersedia di lembaga layanan PAUD, serta pada umumnya belum sesuai standar yang ditetapkan. (3) masih terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan, serta pada umumnya belum memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan penghargaan yang memadai. (4) belum semua desa di daerah perbatasan memiliki lembaga layanan PAUD. (5) terbatasnya dukungan dana untuk mendukung perluasan layanan PAUD di daerah perbatasan. (6) masih terbatasnya

sosialisasi pentingnya layanan PAUD berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dan (7) persoalan kemiskinan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan.

Melihat persoalan tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Tahun ini, pemerintah telah menyiapkan dana alokasi khusus bantuan operasional PAUD (DAK BOP PAUD) sebesar Rp 3,5 triliun yang ditujukan untuk 5,5 juta anak-anak usia dini yang ada di Indonesia. Anggaran itu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2,2 triliun. Selain itu, ada beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan di atas. (1) Program penuntasan 1 Desa 1 PAUD, terutama bagi desa-desa yang belum terdapat layanan PAUD.

(2) penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas PAUD untuk daerah-daerah 3T, termasuk di wilayah perbatasan, antara lain dalam bentuk alat permainan edukatif dan pembangunan unit gedung baru PAUD. (3) perintisan program PAUD baru bagi desa-desa yang belum terdapat layanan PAUD. (4) memberikan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD bagi 180 ribu lembaga PAUD, termasuk yang berada di daerah-daerah perbatasan. (5) mendorong pemanfaatan dana desa untuk pembinaan PAUD.

Menyediakan PAUD yang berkualitas untuk setiap anak berarti menyediakan tempat yang aman bagi anak untuk tumbuh dan belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mewujudkan target Agenda Pendidikan 2030 dengan mulai memberikan DAK BOP PAUD sebesar Rp 600 ribu per tahun untuk 190.158 lembaga. Bantuan ini diprioritaskan bagi peserta didik PAUD usia 4-6 tahun. Upaya lainnya ditempuh dengan menyalurkan bantuan alat permainan edukatif melalui dana dekonsentrasi dan meningkatkan mutu guru melalui diklat berjenjang.

Upaya mewujudkan PAUD berkualitas juga dilakukan melalui penumbuhan budi pekerti anak sejak dini. Ada beragam cara yang ditempuh. Di antaranya melalui komik, lagu, dongeng, cerita rakyat, buku-buku berbasis bahasa ibu, pedoman guru tentang pelaksanaan kurikulum 2013, serta pedoman pengawasan penggunaan bahan pembelajaran, dan Alat Permainan Edukatif (APE). Anggaran Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2017 ini juga dialokasikan untuk rehabilitasi lembaga PAUD serta bantuan sarana dan prasarana termasuk bantuan Alat Permainan Edukatif.

Untuk meningkatkan akses dan layanan

pendidikan PAUD terutama pada daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) atau desa yang jumlah anak usia dininya terbatas. Akan digelontorkan sebanyak Rp 24,1 miliar untuk 183 lembaga PAUD. Kebijakan program PAUD ini, diharapkan tidak hanya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tetapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota.

Dalam penuntasan Satu Desa Satu PAUD pun, Kemendikbud merangkul sejumlah organisasi mitra yang dapat menjangkau hingga daerah 3T. Diantaranya bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut, juga memberdayakan rumah ibadah sebagai lokasi pengembangan program PAUD.

Dukungan untuk mengimplementasikan program PAUD pra SD sudah diberikan oleh beberapa kepala daerah, di antaranya Bupati Banyuwangi, Wali Kota . Upaya mendorong kepala daerah lainnya terus dilakukan untuk bisa terus mendorong program 1 PAUD 1 Desa bisa berjalan sesuai dengan tujuan yakni anak-anak usia dini yang ada di Indonesia bisa terus menerima pendidikan untuk bekal mereka masuk ke pendidikan lanjutan, dalam hal ini SD. Semoga layanan PAUD terus meningkat kualitasnya. ■



MELUASKAN AKSES TEKNOLOGI PENDIDIKAN, MENCERDASKAN ANAK BANGSA

Dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi, maka anak-anak kita dari kawasan pinggiran dapat memiliki masa depan yang sama dengan anak-anak yang hidupnya di kota besar.



Pendidikan kita saat ini, merupakan wajah dari masa depan Indonesia. Mengapa demikian? Karena pola pembelajaran, sistem pendidikan dan kultur yang tumbuh dari ruang belajar anak-anak kita, merupakan cermin masa depan negeri ini. Kalau ingin melihat Indonesia pada dua puluh, tiga puluh atau satu abad nanti, kita bisa melihatnya dari apa yang sedang dipelajari generasi muda saat ini. Maka, sangatlah penting bagi kita semua untuk mengelola pendidikan dengan kesungguhan hati, dengan keteladanan, sekaligus cinta.

Saat ini, kita hidup pada era *cyber*, kita bergelut pada zaman teknologi. Kita memasuki lorong "*disruption era*", zaman disrupsi yang mendorong setiap pihak harus berpikir kreatif dan bekerja keras untuk *survive*. Teknologi

telah mendisrupsi banyak lini kehidupan, baik politik, ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Kita bisa melihat, di sisi pertumbuhan ekonomi, transportasi online demikian tumbuh pesat.

Di tengah gelombang pertumbuhan teknologi, pendidikan kita juga harus berubah. Bukan karakter dan kultur yang harus berubah, namun sistem, cara kerja, dan metode kita mencerdaskan anak bangsa. Pertumbuhan teknologi jangan sampai menghilangkan identitas asli bangsa ini, dengan kebhinekaan, kekuatan moral dan kecerdasan budaya.

Di tengah perubahan ini, Kemendikbud khususnya Pustekkom telah membuktikan diri berada di garis depan pertumbuhan teknologi, dengan program dan karya kreatif untuk pendidikan.

Program USO (*Universal Service Obligation*) yang dirintis bersama Kemenkominfo, telah mendorong - sampai saat ini - 670 sekolah di penjuru Indonesia untuk mendapatkan akses internet.

Di sini, penerima bantuan USO mendapatkan pendampingan berupa peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK untuk guru dalam pengelolaan jejaring dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran di sekolah. Dimana, sekitar 300 - 400 sekolah USO telah mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan jejaring dan penerapan TIK dalam pembelajaran.

Program ini tidak sekedar memberikan perangkat teknologi, namun sejatinya membuka kesempatan dan peluang bagi semua lapisan generasi negeri ini. Terutama,



Sebaran 670 sekolah penerima bantuan USO dalam kegiatan Peningkatan Kompetensi TIK Guru dalam Pembelajaran berbasis Multimedia dan Web.

mereka yang ada di pelosok negeri ini, di kawasan 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar) yang selama ini miskin akses pengetahuan. Program peningkatan akses teknologi untuk pendidikan, berkontribusi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di negeri ini. Rovina Timisela, pendidik di Miyambaw, Manokwari, Papua Barat, menegaskan betapa akses teknologi pendidikan sangat penting.

"Kami merasa terbantu dengan hadirnya program USO dari Pemerintah, dari Kemenkominfo dan Kemendikbud. Saat ini, anak didik kami di pedalaman Papua mendapat kesempatan berharga untuk menjelajahi informasi dan pengetahuan di internet," ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Gabriel Sori, pendidik di SMAN Tanjungbunga, Flores Timur. "Kami sangat senang dengan program akses internet melalui USO, ini sangat membantu. Kami juga berterima kasih kepada tim Pustekkom

Kemendikbud yang sangat membantu dalam proses pembelajaran dan penggunaan teknologi informasi," jelasnya.

Sedang Ambresius Murjani, pengajar di sebuah sekolah menengah di Sintang, Kalimantan Barat, merasakan manfaat besar dari program akselerasi akses internet untuk sekolah di kawasan perbatasan. "Beberapa tahun lalu, siswa-siswi kami tidak memiliki harapan masa depan. Bahkan, beberapa penduduk secara ekonomi tergantung dengan penjual dari Malaysia, mereka masuk dari wilayah perbatasan. Dengan adanya program akses teknologi internet, siswa-siswi kami sangat bergairah belajar, mereka mendapatkan kemudahan menjelajahi dunia," jelasnya. Saat ini, tambah Murjani, ada beberapa lulusan sekolahnya yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi di Jawa, sesuatu yang sebelumnya tidak ada dalam bayangan.

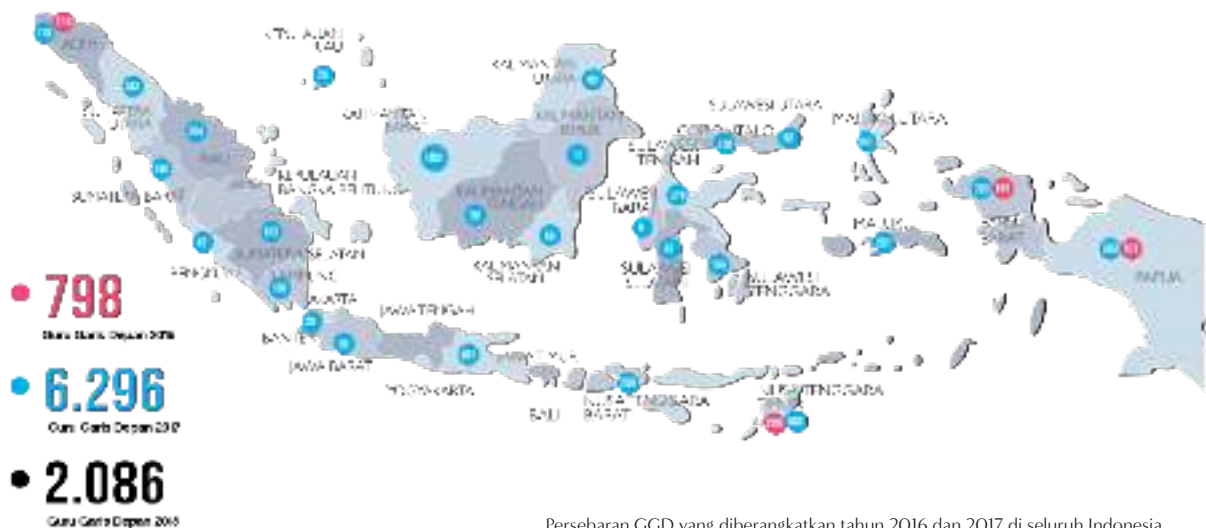
Sementara Ardiansyah, guru dari SMPN 3 Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa

Tenggara Barat, merasakan bahwa dengan memanfaatkan jaringan Patrakom untuk belajar secara online mencari bahan belajar sambil berdiskusi di luar kelas lebih mudah. "Anak-anak SMKN 3 Manggelawa tidak perlu selalu di kelas atau bergantung kepada guru untuk mencari ilmu pengetahuan baru," ujarnya. Selain itu, dengan adanya USO mempermudah Bapak-Ibu guru dalam mencari bahan pembelajaran dan pembuatan perangkat pembelajaran.

Pada tahun 2017 ini, Pustekkom telah memberikan bantuan perangkat untuk mendukung pembelajaran terhadap 164 sekolah di 29 provinsi di Indonesia (Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, dan DKI Jakarta tidak menerima bantuan perangkat) dalam rangkaian kegiatan Peningkatan Kompetensi TIK Guru dalam Pembelajaran Berbasis Multimedia dan Web untuk 34 provinsi. ■

GURU GARIS DEPAN PELOPOR PENDIDIKAN DAERAH 3T

Guru Garis Depan (GGD) bukan hanya sekedar guru tetapi juga agen perubahan di tempat tersulit Indonesia.



Persebaran GGD yang diberangkatkan tahun 2016 dan 2017 di seluruh Indonesia

Saat ini, distribusi guru yang tidak merata menjadi masalah yang dialami oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi geografis yang bervariasi membuat beberapa daerah kesulitan untuk dicapai dan berakibat pada kualitas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, salah satunya adalah dalam hal pendidikan. Maka dari itu, sejak tahun 2015, Kemendikbud terus berupaya mengatasi kesenjangan ketersediaan guru dengan mengirimkan GGD ke daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal).

Pada tahun 2015, Kemendikbud berhasil mengirimkan 779 guru ke 28 kabupaten yang tersebar di empat provinsi yaitu: Nusa Tenggara Timur, Papua,

Papua Barat dan Aceh. Di tahun 2016, Kemendikbud berusaha untuk merekrut 7.000 GGD yang formasinya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dari 7.000 formasi ini, hanya 6.296 GGD yang lulus. Baru tanggal 15 Agustus 2017 SK GGD diterbitkan, dan pada September 2017 GGD dilepas ke tempat tugas. Sebanyak 300 GGD dilepas secara simbolis oleh Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Sedangkan sisanya, sebanyak 5.996 GGD berangkat secara mandiri dari tempat tinggalnya masing-masing menuju daerah penempatan.

Pada acara pelepasan secara simbolis itu, dilangsungkan juga

penyematan rompi dan topi GGD kepada enam orang GGD. Mereka adalah Juniar Sinaga (penempatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau), Sain Widiyanto (di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur), Rika Purwanti (di Kabupaten Belu, NTB), Fransiscos Perry Ariska (di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah), Retno Widianingrum (di Kabupaten Aceh Selatan, NAD), serta Hironimus Kantur (di Kabupaten Manggarai Barat, NTT).

Kepada para GGD yang telah resmi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini, Menteri Muhadjir berharap agar mereka dapat menjadi pelopor, pembaharu, dan pencerah di mana pun ditugaskan.

Bagaimana bertahan di daerah yang kering, jika tidak ada air untuk di minum, cari tumbuhan yang bisa mengeluarkan air. “Jangan pulang sebelum menjadi pemenang, jangan pulang sebelum memberikan sesuatu yang bermakna di

sebagai Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T); PPG S1 PGSD berasrama; PPG Basic Science dan PPGT yaitu program PPG yang terintegrasi dengan program S1 akademik, berkewenangan tambahan dan

selama dua hari melewati hutan dan lembah. Hal tersebut tidak menyurutkan semangat Megawati untuk mengajar.

“Untuk mengajar di Papua yang harus dilakukan pertama yaitu menarik minat belajar anak-anak Papua dan membuat mereka mencintai gurunya agar mereka semangat untuk pergi ke sekolah,” tutur Megawati.

GGD lainnya, Sopiya, asal Ciamis, Jawa Barat, akan ditempatkan di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Di sana, ia akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Kepada rekan-rekan sesama CPNS GGD 2016, ia berpesan agar tetap semangat dan mampu untuk menyesuaikan diri di tempat masing-masing agar membawa keberhasilan untuk daerahnya.

Kemendikbud terus berupaya untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan salah satu program prioritas terkait hal tersebut adalah GGD. Terlepas dari kondisi dan infrastruktur di daerah 3T, GGD diharapkan bisa menginspirasi anak didiknya untuk meningkatkan kualitas diri. Selain itu, GGD juga diharapkan bisa juga menjadi motor yang menggerakkan masyarakat di sekitarnya untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan. ■

daerah tersebut,” ujar Menteri Muhadjir memberi semangat.

Sementara dalam arahannya, Hamid Muhammad, Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyampaikan agar GGD bisa mempelajari budaya setempat berkaitan dengan budaya birokrasi dan budaya masyarakat. Para GGD harus bisa membawa diri dan menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat di daerah penempatan.

Dirjen Hamid juga mengatakan bahwa CPNS GGD terpilih dari latar belakang dan pengalaman yang berbeda dari berbagai pelosok Tanah Air, seperti dari Pendidikan Profesi Guru (PPG) SM-3T, yaitu program yang pesertanya telah mengikuti pengabdian

berasrama yang mengambil peserta dari lulusan SMA daerah 3T. GGD dari luar daerah yang diterjunkan ke daerah penempatan agar bisa memotret permasalahan pendidikan yang mendasar di daerah 3T. “Bukan hanya sebagai guru, tapi juga agen perubahan, motivator,” tegasnya.

Salah satu CPNS GGD 2016 tersebut adalah Megawati, yang akan bertugas di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Megawati akan mengajar di SDN Aurimi Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, untuk mengabdikan sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai GGD. Ia menuturkan, untuk mencapai lokasi tempat mengajar, memerlukan waktu dua hari menggunakan speedboat atau berjalan kaki







SASTRAWAN BERKARYA

“Kita mengetahui bahwa masyarakat yang berada di daerah pedalaman harus diakui masih tertinggal dan memerlukan pembangunan fisik untuk membuka daerah-daerah isolasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, sosial ekonomi yang berpihak pada penduduk lokal. Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Keppres ini mengatur mengenai penetapan 111

pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Di wilayah Kabupaten Raja Ampat yaitu pulau Fani sebelah utara berbatasan dengan Republik Palau.” - Rama Prambudhi Dikimara

Sebagai upaya konkrit untuk mengimplementasikan Nawa Cita, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran” dan “memperteguh kebinekaan” sebagaimana terdapat dalam Nawa Cita ke-3 dan ke-9, sub-bidang Bantuan Teknis, Bidang Pemasyarakatan, Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan

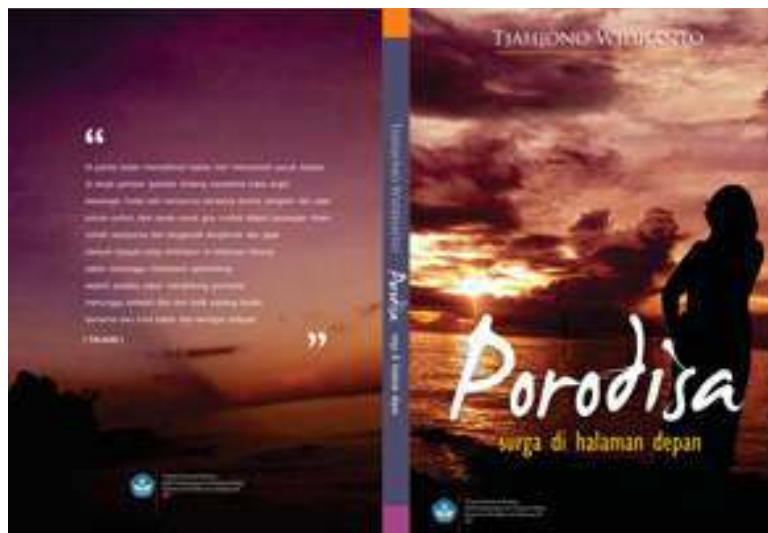
Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) meluncurkan Sastrawan dikirim ke daerah-daerah tersebut dengan harapan dapat mengangkat warna lokal daerah dan memperkenalkannya ke dunia yang lebih luas melalui sastra.

Dengan tinggal selama kurang-lebih dua puluh hari di daerah penugasan bersama masyarakat lokal, para sastrawan berkesempatan merasakan, memaknai dan menghayati langsung di daerah-daerah yang dituju. Mereka berkomunikasi, berinteraksi, dan berdiskusi dengan berbagai lapisan masyarakat, komunitas, dan pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan tradisi, modal sosial, perubahan masyarakat, dan masalah-masalah terkini yang sedang terjadi. Sekembali dari daerah penugasan, selama kurang lebih dua bulan, sastrawan menuliskan pengalaman, pengamatan, dan pengetahuannya ke dalam buku yang diberi tajuk “Catatan Jurnalisme Sastrawi” dari daerah pinggirannya. Dengan begitu para sastrawan diharapkan tidak hanya sekedar datang bertamu ke daerah 3T tersebut, namun juga berkesempatan untuk menjadi penutur kembali atas kisah-kisah yang mereka alami selama di daerah tersebut. “Buku yang berjudul Morotai: Menyusuri Jejak Moro, Jenderal MacArthur, Nakamura dan Trikora merupakan penuturan kisah yang

diharapkan dapat membangkitkan kenangan dan memulangkan ingatan bahwa peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa itu, bukan sekadar kisah isapan jempol yang hanya dikenang sesaat lalu hilang terhapus oleh waktu dan beragam peristiwa “kekinian”. Kisah-kisah itu merupakan kejadian nyata, peristiwa yang pernah terjadi puluhan tahun silam; kiprah manusia di dalam mempertahankan dan membela kedaulatan negaranya.” sebagaimana disampaikan salah seorang peserta kegiatan Sastrawan Berkarya yang dikirimkan ke Morotai. Fanny J. Poyk.

Pada tahun 2016 program ini dilaksanakan dalam dua sasaran, yaitu ke daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) dan ke luar negeri. Sastrawan yang terpilih untuk dikirim ke luar negeri (Meksiko) ialah Azhari Aiyub, dan sastrawan yang dikirim ke daerah 3T, yaitu F. Rahardi (Merauke), Okky Madasari (Belu), Linda Christanty (Jailolo), Wayan Jengki Sunarta (Sabang), dan Ni Made Purnamasari (Nunukan).

Untuk tahun 2017, sastrawan hanya dikirim ke daerah 3T. Sastrawan yang terpilih tersebut ialah, antara lain, Jamal Rahman Iroth (Natuna), Dino Umahuk (Bengkayang), Heryus Saputra (Dompu), Rama Prambudhi Dikimara (Raja Ampat), Tjahjono Widiyanto (Talaud), dan Fanny J. Poyk (Morotai). ■





BUDAYAKAN KESENIAN INDONESIA HINGGA KE PELOSOK NEGERI

Indonesia terdiri dari ribuan pulau, baik yang besar maupun kecil yang tersebar ke seluruh penjuru arah mata angin.

Hal tersebut tentunya membuka kemungkinan akan adanya pengaruh seni dan budaya dari negara tetangga yang masuk ke dalam masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Rentannya arus pengaruh yang masuk ke Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya akulturasi atau asimilasi budaya di dalam masyarakat. Dengan demikian, penanaman dan penekanan kembali seni dan budaya Indonesia menjadi wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut.

Melalui Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud melaksanakan kegiatan Seniman Mengajar 2017 yang dibagi dalam 2 gelombang waktu pelaksanaan. Para seniman bangsa yang terpilih dalam kegiatan ini dikirim untuk membantu pemerintah melakukan sosialisasi kembali dan mengenalkan kembali tentang kearifan lokal Indonesia. Mereka mengemban

tugas mulia ke daerah-daerah 3T yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahap I pelaksanaan kegiatan Seniman Mengajar, para seniman yang memiliki rentang usia 30 – 50 tahun itu ditempatkan di beberapa daerah, yaitu Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau, Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, dan Kabupaten Belu di Nusa Tenggara Timur. Ketiga daerah ini dipilih karena merupakan daerah terluar di Indonesia dan memiliki jarak yang sangat dekat dengan negara tetangga, sehingga potensi hilangnya akar budaya asli Indonesia sangat besar terjadi.

Tahap II pelaksanaan kegiatan Seniman Mengajar dilaksanakan di daerah yang berbeda. Sebanyak 7 kabupaten 3T di 7 provinsi di Indonesia menerima kehadiran para seniman yang sudah siap berbagi, yaitu Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah di Bengkulu, Kabupaten Wakatobi di

Sulawesi Tenggara, Kabupaten Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Morotai di Maluku Utara, Kabupaten Tanjung Lesung di Banten, dan Danau Toba di Sumatera Utara. Para seniman yang dikirim ke daerah 3T tersebut bertugas untuk mengembalikan dan mengenalkan kembali jati diri bangsa yang belum atau hilang ditelan arus zaman.

Kegiatan Seniman Mengajar diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas ekspresi seni dan penguatan identitas bangsa. Selain itu, tidak hanya menebar manfaat kepada masyarakat daerah 3T yang dikunjungi, namun juga diharapkan memberikan kesempatan dan dorongan kepada para seniman untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang dimiliki mereka kepada masyarakat daerah 3T. Kegiatan ini juga diharapkan dapat melahirkan suatu hubungan dan dampak positif yang berkelanjutan dengan terjalinnya kerja sama dengan para seniman lokal. ■

MODEL LAYANAN KURIKULUM 2013 DI TANAH PAPUA

Tanah Papua

Trio Ambisi

Di sana pulauku yang ku puja slalu
Tanah Papua, pulau indah
Hutan dan laut Mu
Yang membisu slalu
Cenderawasih, burung emas

Gunung-gunung, lembah-lembah
Yang penuh misteri
Yang ku puja slalu
Keindahan alam mu yang mempesona
Sungai Mu yang deras
Mengalirkan
Sio ya Tuhan, trima kasih

Tanah Papua terkenal dengan keindahannya yang begitu memukau sebagaimana disampaikan dalam lagu Tanah Papua di atas. Daratan yang luas, pulau-pulau indah, gunung yang menjulang dan alam yang kaya tersebut tidak hanya menyihir mata kita dengan keindahannya, namun juga melahirkan banyak tantangan bagi masyarakat setempat dalam mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

“Kita juga bisa pintar, tapi jangan karena kita sudah pintar, lalu kita lupa dengan budaya (bahasa dan kearifan lokal) di mana kita besar dan tumbuh. Infrastruktur juga sangat mempengaruhi pendidikan, misalnya jika jalan bagus, guru akan rajin masuk

kelas. Karena jalanan susah maka guru malas pergi ke sekolah yang jaraknya jauh dan ditempuh dengan jalan kaki,” ungkap Konstan, Ketua Komite SD Banyu Kecamatan Jayapura, menjelaskan kebutuhan dan tantangan bidang pendidikan di Tanah Papua.

Kemendikbud pun berusaha menjawab dan mengantisipasi tantangan tersebut. Salah satunya, upaya Pusat Kurikulum dan (Puskurbuk) dalam menyediakan model layanan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan keadaan, karakteristik, dan kebutuhan masyarakat di Tanah Papua (Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua) agar tepat sasaran. Hal ini juga disampaikan oleh Martha Helena, guru TK Bakti Kota

Raja, “Di tempat saya, masyarakatnya berburu dan anaknya dibiarkan main begitu saja. Kami sudah mendatangkan guru-guru dari Kalimantan, Jawa untuk mengajari anak-anak di situ. Anak-anak sering mengambil mainan, sehingga kami selalu membeli mainan. Kami bawa mereka di danau, ngajarin mancing, mewarnai. Ada tiga bahasa di sana, Melayu, Papua, dan Fiji (Bahasa Papua Nugini). Di TK, kami mengajarkan karakter sendiri selama 20 menit.”

Maka dari itu, dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif mengenai setiap wilayah di Tanah Papua untuk mampu melahirkan model pendidikan yang khusus bagi masing-masing

model masyarakat. Dengan hadirnya model pendidikan bagi masyarakat pemburu dan peramu (*Remote Education*), model pendidikan bagi masyarakat pedesaan (pertanian/perikanan), serta bagi masyarakat perkotaan maka diharapkan bisa menjawab tantangan masing-masing, sehingga bisa tercapainya akses pendidikan yang berkualitas dan merata.

Arah dan aliran kebijakan pendidikan di Tanah Papua harus merupakan proses yang alami dalam kerangka pikir transformasi budaya. Kebijakan pendidikan di Tanah Papua pun harus mampu meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di sana sesuai dengan perkembangan tuntutan kehidupan yang memerlukan berbagai jenis literasi dasar, keterampilan, dan keahlian di segala bidang. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan tersebut diperlukan kerja sama yang sinergis antara keterlibatan sekolah/ lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Kebijakan pendidikan pun diharapkan mampu menyesuaikan antara kondisi peserta didik dengan kebutuhan yang mereka perlukan, sebagaimana diungkapkan oleh Roteah, Kepala Sekolah SMPN 12, terkait pelaksanaan pendidikan di Tanah Papua.

"Kita juga harus tahu kemampuan siswa kita. Kita harus melihat dan memisahkan nilai anak yang 5 atau 6 atau 7. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan anak. Guru tidak sekedar mengajar tapi harus mendidik. Di SMPN 12, guru ASN hanya 4, dan

sebagian banyak guru honor. Anak SMP di kota Jayapura juga banyak yang belum dapat membaca. Jadi jam pelajaran kami tambah sampai jam 4 sore setelah dikoordinasikan dengan orang tua siswa. Kita juga perlu tahu, anak tersebut ternyata bekerja hingga malam, ketika pagi di sekolah siswanya sudah ngantuk sehingga tidak fokus lagi. Jadi kami tawarkan paket pelajaran siang hari." ungkap guru Roteah.

Masing-masing pemerintah daerah dapat merancang kurikulum, sebagaimana dikategorisasikan ke dalam tiga kelompok masyarakat (perambah dan peramu, pedesaan, dan perkotaan), yang dalam penyusunan konten maupun strukturnya pun memiliki landasan yang kuat secara filosofis, pedagogis, dan teori dalam menetapkan desain kurikulum. Melalui desain kurikulum pendidikan khusus seperti itu, fungsi mengembangkan diri kemampuan peserta didik di tengah masyarakat, diharapkan mampu memecahkan masalah di tengah lingkungan yang terus berubah dan penuh kompetisi.

Pembaruan dan sistem pembelajaran harus dilakukan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, transparan, dan demokratis, serta berorientasi pada kebutuhan belajar bagi masyarakat. Disamping itu, seluruh pemangku kepentingan pendidikan juga harus mampu berperan secara aktif di lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Seluruh pihak harus menyadari peran masing-masing dan bertindak sesuai perannya tersebut, untuk

terlibat dalam peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Papua. Pemerintah daerah sendiri harus bertanggung jawab merumuskan kebijakan pendidikan yang bersifat strategis, antara lain, dengan menetapkan kurikulum yang berdiversifikasi sesuai konteks karakteristik masyarakatnya. ■



TUGAS MULIA DI NEGERI TETANGGA

dengan semangat berbakti dan berkontribusi untuk negeri, mereka siap untuk memberikan segala daya dan upaya untuk mendidik anak bangsa sesuai dengan tugas mereka sebagai guru

Setelah dilaksanakan pertama kali pada tahun 2006, pengiriman guru untuk pendidikan anak-anak Indonesia ke Malaysia pada tahun 2017 ini sudah memasuki tahap ke-8. Acara pengukuhan serta pelepasan guru tersebut telah diselenggarakan di Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2017. Pada tahap ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengirim sebanyak 83 guru

yang tersebar ke berbagai lokasi di Malaysia, yaitu ke Negeri Bagian Sabah sebanyak 73 orang, Sarawak sembilan orang dan Johor Bahru satu orang.

Pada acara pelepasan yang berlangsung khidmat tersebut, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suara gegap gempita. Selanjutnya, salah seorang guru, Yana Mulyana, S.Pd.SD. mewakili rekan lainnya memimpin sumpah setia sambil mencium dan menggenggam bendera Merah Putih erat-erat.

Para guru menyatakan

siap menjalankan tugas di tempat pengabdian yang baru. Yana Mulyana, pria kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, 12 Februari 1987 terpanggil untuk berangkat ke Malaysia karena prihatin dengan nasib anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di sana. “Ketika mendengar kondisi putra-putri bangsa sangat memperhatikan, karena harus tinggal bersama orangtuanya yang menjadi buruh di ladang sawit di Malaysia, saya merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan segenap jiwa raga saya bagi negara,”



kata Yana, anak semata wayang dari pasangan Ayi Aminah dan Jaenudin.

Hanya tekad bulat dalam hati Yana yang menjadi penyemangat selama menjalankan tugas jauh dari keluarga. 'Demi negara, demi kemanusiaan, demi keluarga' adalah kalimat yang senantiasa bergema dalam hatinya. Ia pun ikhlas ditugaskan di Ladang Genting, Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Secara mental ia telah menyiapkan diri sejak berangkat dari rumah, meninggalkan istri yang belum lama dinikahinya. Sebelumnya ia sudah memilih profesi guru yang telah dijalani sejak 2006.

Jika Yana bertugas di tengah ladang sawit, guru lain, Deviyana Innamaya Sakir ditempatkan di Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB), yang berada di pusat kota, tepat berada di belakang kantor KJRI Johor Bahru "Para siswa adalah anak dari para

imigran pekerja Indonesia di Johor Bahru. Sebagian besar orang tua mereka bekerja di sektor perladangan, kilang, manufaktur, atau sebagai pekerja rumah tangga," kata Devi, panggilan akrab Deviyana Innamaya Sakir, kelahiran Jeneponto, Sulawesi Selatan, 7 Desember 1991.

Di sekolah yang baru berdiri 2015 itu, Devi mengajar seni budaya. "Mungkin terdengar sederhana. Akan tetapi melalui pembelajaran seni budaya, saya justru bisa mencoba menanamkan kepada anak-anak didik bagaimana bekerjasama, berdisiplin, belajar berkarya, menghargai, dan memelihara kebudayaan Indonesia", kata wanita yang menyelesaikan gelar sarjana Jurusan Pendidikan Sendratasik (Seni Drama Tari dan Musik) di Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan pada 2013.

Berdasar data Agustus 2017, jumlah guru Indonesia

yang sedang bertugas di Malaysia sebanyak 321 orang. Sedangkan jumlah siswa di Malaysia yang sudah tertampung sebanyak 26.435 anak tersebar di 360 lembaga pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan untuk anak TKI ini tidak lepas dari peran guru dan pendiri *community learning centre* (CLC) di Malaysia. Terdapat tiga CLC yang dikunjungi dalam menyiapkan guru-guru yang akan dikirim ke Malaysia. Pertama, adalah CLC St Thomas, di Kampung Sawah, Tuaran, Kinabalu, Malaysia. Pendiri CLC St Thomas, Florence Dominus Eden, menyatakan ide membuat tempat belajar muncul karena prihatin dengan para orang tua yang begitu ingin menyekolahkan anak-anaknya, tetapi fasilitasnya tidak ada. "Saya berpikir apa yang bisa dilakukan untuk mereka? Akhirnya saya membuka hati

untuk mereka“, kata Florence Dominus Eden.

Kawasan sekitar sekolah dikelilingi perkebunan getah, jagung dan sayur sayuran. Pekerjaan orangtua rata-rata sebagai petani, buruh dan rumah tangga. Anak yang bersekolah di CLC St.Thomas datang dari kawasan Tamparuli, Tuaran, dan Telipok. Kebanyakan jarak rumah dan sekolah kurang dari satu kilometer. Mereka datang dengan naik bus, diantar orang tua, naik sepeda, atau jalan kaki. Kini sekolah tersebut memiliki delapan kelas, terdiri dari kelas 3M, kelas 1 sampai dengan 6, dan kelas 7. Seluruhnya menggunakan 5 ruang. Jumlah murid sudah mencapai 114 anak.

CLC kedua SD Cempaka dan CLC SMPT Kundasang yang baru berdiri tahun lalu di wilayah Kundasang dan Ranau, Sabah Malaysia. Pengelola CLC tersebut, Rafika, S.Pd., Dia

menceritakan pada umumnya orang tua menginginkan anak-anaknya sekolah. Rafika, sebagai guru yang dikirim pemerintah Indonesia ke Malaysia akhirnya memelopori pembentukan CLC pada tanggal 20 April 2016. “Ketika pertama kali didirikan, jumlah siswa tidak sampai 100 anak untuk SD dan SMP,” katanya. Per Agustus 2017, jumlah siswa sudah mencapai 300 siswa. Siswa yang belajar di CLC SD Cempaka adalah 214 siswa sedangkan siswa SMP berjumlah 86 anak.

CLC yang terakhir adalah CLC Bhineka Tunggal Ika yang terletak di Jalan Balai Polis, Pekan Kundasang, Kg. Gimán, Gundasang Ranau, Sabah-Malaysia. Posisinya berada di kaki gunung Kinabalu. CLC ini berdiri atas keprihatinan Yuliana Pai Atawolo ketika melihat anak-anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan. Awalnya Yuliana

mendirikan bimbingan belajar di salah satu rumah warga Indonesia yang bermukim di Kundasang. Bimbingan belajar inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya CLC Bhineka Tunggal Ika. Sampai akhirnya, CLC ini diresmikan pada 14 Oktober 2016 oleh Konsul Jendral Republik Indonesia dengan 30 siswa.

Perjuangan guru-guru Indonesia ini masih panjang. Mereka harus mendidik anak bangsa sendiri di negara orang lain. Namun dengan semangat berbakti dan berkontribusi untuk negeri, mereka siap untuk memberikan segala daya dan upaya untuk mendidik anak bangsa sesuai dengan tugas mereka sebagai guru. ■



Proses Belajar-Mengajar pada salah satu CLC di Malaysia

MENCIPTA TRADISI PRESTASI, MENANAMKAN BUDI PEKERTI DAN CINTA TANAH AIR

“Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita.”

Berpegang pada ajaran Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, maka pemerintah memasukkan ketiga komponen tersebut, yaitu afektif, kognitif dan psikomotorik, dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut juga tercermin dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan Kemendikbud, sebagaimana diimplementasikan melalui kegiatan olimpiade siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), serta Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).

OSN, O2SN dan FLS2N adalah perhelatan lomba dan festival di bidang sains, olahraga, dan seni tingkat nasional yang diikuti oleh peserta didik dari seluruh Indonesia setelah lolos seleksi pada olimpiade dan festival tingkat provinsi. OSN, O2SN dan FLS2N diharapkan menjadi wadah untuk membina kreativitas, sportivitas, inovasi, dan menanamkan rasa cinta kepada peserta didik dalam bidang sains, olahraga dan

seni. Selain itu OSN, O2SN dan FLS2N memberikan wadah bagi peserta didik untuk berkompetisi dan unjuk kemampuan di bidang sains, olahraga, dan seni. Keikutsertaan dalam OSN, O2SN dan FLS2N juga dapat mengasah kepekaan siswa dalam menghargai prestasi orang lain.

OSN, O2SN dan FLS2N juga mempertemukan peserta didik dari seluruh penjuru Indonesia sehingga diharapkan dapat menumbuhkembangkan semangat persaudaraan antar anak bangsa serta membangun karakter bangsa yang cinta tanah air dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945. “Mereka datang dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggas sampai Rote dengan membawa kekhasan masing-masing. Mereka bersatu padu di sini, bersama-sama untuk membangun kebangsaan, merespon kebinekaan, bersatu dalam Bineka Tunggal Ika. Ini akan kita perjuangkan terus sehingga anak-anak kita ini, ketika kelak mereka sudah menjadi sarjana, pejabat, dan atau konglomerat, mereka nanti akan saling menyapa bahwa mereka pernah berkumpul di Kupang dan Surabaya untuk satu tujuan; bagaimana kita istiqomah menyatukan NKRI,” tegas



Prastya Gunawan, peraih medali emas cabang olahraga renang tingkat SMK

Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, pada acara Pembukaan FLS2N X di Millennium Ballroom, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin, 25 September 2017.

Selaras dengan pernyataan Dirjen Dikdasmen, Gubernur NTT juga mendukung pelaksanaan olimpiade yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Saya setuju dengan Pak Dirjen. Negeri ini luas, bangsa ini besar dan harus kita jaga bersama. Karena itu persaudaraan harus terus-menerus kita rajut supaya sesama anak bangsa merasa bersaudara. Tidak boleh saling menyakiti satu dengan yang lain, apa lagi mau berpisah dari satu dengan yang lain!”



Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita.



foto upacara penutupan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional 2017 di Kupang, NTT.

SISTEM ZONASI DI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU: PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

“Penerapan sistem zonasi pada PPDB merupakan upaya melakukan pemerataan yang berkualitas. Ke depan diharapkan tidak ada lagi sekolah yang dianggap favorit dan tidak favorit.”



Anak-anak berangkat sekolah berjalan kaki, ini terjadi di banyak daerah. Tak sedikit di antara mereka yang menempuh perjalanan cukup jauh, karena minimnya sarana transportasi.

Masa libur sekolah di bulan Juni 2017, kondisi SMAN 1 Kupang tetap ramai dikunjungi banyak orang. Hal ini dikarenakan proses penerimaan peserta didik baru tahap 2 yang sedang dijalani lembaga sekolah formal di Kupang. SMAN 1 Kupang belum menerapkan penerimaan secara online, sehingga orang tua dan siswa harus datang langsung ke sekolah.

“Tidak apa-apa walau harus datang langsung, sekolahnya kan dekat dari rumah. Sekarang nggak boleh daftar sekolah jauh-jauh,” ungkap Maria, salah satu orang tua calon peserta didik yang sedang mengikuti proses mendaftar.

Hal ini dikarenakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat, yang mulai diterapkan pada Tahun Ajaran 2017/2018.

Keluarnya Permendikbud ini mengatur tentang zonasi menjadi patokan dalam penerimaan peserta didik. Di Permendikbud ini, jarak peserta didik ke satuan pendidikan harus menjadi

bahan pertimbangan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong terwujudnya pemerataan kualitas sekolah melalui sistem zonasi.

“Pada PPDB tahun ini, urutan zona lebih diprioritaskan daripada nilai hasil ujian. Sistem zonasi diharapkan dapat mempermudah akses



Jarak yang dekat membuat anak bisa berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah

pada layanan pendidikan, disamping juga mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan,” tutur Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Hamid Muhammad dalam Diskusi Media yang diselenggarakan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) di Jakarta, Selasa (11/7).

Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pemda) wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat

ditetapkan oleh Pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.

Kemudian, kuota sebanyak 10 persen dari total jumlah peserta didik yang dapat diterima sekolah dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Perlu diingat, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Serta, domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Sebelumnya, dalam acara Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah beberapa waktu lalu, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa penerapan sistem zonasi pada PPDB merupakan upaya melakukan pemerataan yang berkualitas. Ke depan diharapkan tidak ada lagi sekolah yang dianggap favorit dan tidak favorit. Semua sekolah didorong untuk terus meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan peran pemangku kepentingan di antaranya seperti Komite Sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) ataupun Kelompok Kerja Guru (KKG). Implementasi juga ditegaskan untuk tetap memperhatikan keberagaman situasi dan kondisi setiap daerah.

Hal ini dikarenakan bisa saja satu daerah mengalami kelebihan atau kekurangan peserta didik. Kelebihan peserta didik dialami oleh Kepala SMP Negeri 2 Kupang, Justus Antonius. Dimana, jumlah kuota siswa yang dapat diterima oleh sekolahnya lebih kecil dibandingkan banyaknya siswa kelas 1 SMP dari zonasi tersebut.

Akibatnya, tambah Justus, banyak orang tua yang protes karena anaknya tidak diterima, padahal karena ketentuan rombongan belajar (rombel) yang sudah ditetapkan sesuai dengan Permendikbud. “Sehingga, kami tidak bisa menerima lebih banyak peserta didik. Sebelum penerimaan, akan kami bicarakan dengan Dinas Pendidikan, mungkin akan ada perubahan kuota dari dinas pendidikan (Kota Kupang, red.)

Ketentuan jumlah peserta didik dalam suatu rombel dan jumlah rombel pada suatu sekolah diberlakukan hanya untuk peserta didik baru kelas 1 (pada Sekolah Dasar), kelas 7 (pada Sekolah Menengah Pertama), dan kelas 10 (pada Sekolah Menengah Atas/Kejuruan). Bilamana di dalam analisis kebutuhan sekolah pada provinsi/kabupaten/kota menyatakan belum dapat menampung peserta didik tersedia sesuai ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam suatu rombel dan juga ketentuan tentang jumlah rombel pada suatu sekolah, maka ketentuan tersebut dilakukan secara bertahap.

Sekolah yang telah melakukan penerimaan peserta didik baru, sebelum terbitnya Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dapat meneruskan proses penerimaan peserta

didik baru sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelum terbitnya Permendikbud.

ANTISIPASI PRAKTIK PENYIMPANGAN PPDB

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Sesuai dengan pasal 29, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda, dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah maupun Pemda dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik. Permasalahan sistem dalam jaringan (daring) atau online terkait kapasitas server dan keamanan data, kebijakan penambahan kuota melalui jalur perjanjian kerja sama, serta adanya kebijakan penambahan poin nilai di beberapa daerah menjadi keluhan dan pengaduan masyarakat yang ditangani Inspektorat Jenderal (Itjen).

Inspektur Jenderal Kemendikbud, Daryanto mengungkapkan keluhan terkait PPDB di berbagai daerah telah ditindaklanjuti oleh tim. Ia juga menganjurkan agar orangtua siswa tidak mengikuti arahan dari pihak sekolah jika memang dianggap mengandung pungutan liar. Beberapa respon positif terdengar mengenai implementasi dari sistem zonasi ini. Salah satunya adalah

dari Alwanih, Kepala Sekolah SMPN 1 Cisauk, Banten yang mengatakan bahwa, terdapat manfaat saat ada sistem zonasi. Yaitu, penyebaran siswa lebih baik di seluruh sekolah sehingga tidak ada sekolah yang berlebihan atau kekurangan siswa.

Hal ini membuat pembelajaran di sekolah lebih efektif. “Anak juga mempunyai waktu yang lebih banyak untuk fokus belajar dibandingkan dihabiskan untuk berangkat atau pulang dari sekolah,” tambahnya. ■



Ibu Wida Muhadjir, aktif dalam kegiatan ProGAS di SD Naskat Mathias 3 Langgur.

PROGAS 2017: MENCIPTAKAN PENERUS MASA DEPAN YANG CERDAS MELALUI GIZI YANG SEHAT

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa gizi memiliki peranan penting bagi perkembangan anak, terutama terkait kecerdasan.

“Melihat anak-anak ini saya optimis dengan masa depan bangsa kita. Dengan kesehatan, kecerdasan, dan karakter mereka kelak akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia,” ungkap Suryan Widati, Ketua Dharmawanita Kemendikbud yang juga istri Menteri Muhadjir pada peluncuran ProGAS di SD Naskat Mathias 3 Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.

Manfaat sarapan bagi pendidikan dan kualitas anak begitu besar, sebagaimana terdapat dalam Pesan ke-6 dari 10 Pesan Gizi Seimbang. Lahir

dari kebutuhan tersebut, maka diperlukan suatu Program Gizi Anak Sekolah (ProGAS) yang lebih komprehensif yang menggabungkan pemberian sarapan sehat serta pendidikan gizi dan karakter. Program ini bertujuan agar sarapan sehat menjadi suatu kebiasaan bagi siswa sebelum mengikuti kegiatan belajar di sekolah dalam rangka mewujudkan siswa sehat beprestasi sebagai generasi penerus bangsa. ProGAS diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi dan perilaku hidup bersih dan sehat, serta kemampuan belajar dalam

upaya membentuk karakter insan Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, tangguh, dan berdaya saing.

ProGAS 2017 dilaksanakan untuk melanjutkan kesuksesan ProGAS 2016 yang sudah berhasil dilaksanakan pada empat kabupaten. Pada tahun 2017 ini diharapkan ProGRAS bisa menyentuh lebih banyak penerima manfaat sebagaimana sudah dirasakan oleh empat kabupaten tersebut di tahun 2016. Wowon Widaryat, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud menyampaikan bahwa sasaran ProGAS tahun

ini adalah siswa-siswi SD dari 563 sekolah di 11 kabupaten. “11 kabupaten tersebut berada di lima provinsi yaitu Banten, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua Barat, dan Papua,” jelas beliau. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pemilihan lokasi sasaran ProGAS didasarkan pada kategori daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta termasuk dalam kategori 1 dan 2 pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) pada tahun 2015.

“Kurangnya asupan sarapan itu berdampak pada status gizi buruk, konsentrasi belajar menurun, dan ketahanan fisik menurun. Akibatnya kualitas belajar anak menurun,” ujar Wowon Widaryat. Kehadiran ProGAS diharapkan menjadi salah satu bentuk intervensi Kemendikbud untuk menjawab permasalahan banyaknya anak-anak sekolah yang tidak mendapatkan asupan sarapan yang memadai.

ProGAS tidak dikelola sendiri oleh Kemendikbud, namun berhasil terlaksana bersama sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian

Pertanian, Badan Pengawasan Obat dan Minuman, Seameo-Refcon, Institut Pertanian Bogor (IPB), Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia serta WFP yang secara berkelanjutan mendukung mengawal kegiatan ProGAS dari awal sampai akhir. ProGAS juga didukung oleh beberapa kegiatan pendukung, yaitu workshop dan lokakarya, kampanye ProGAS, dan Bimbingan Teknis bagi pelaksana ProGAS di masing-masing sekolah. Kerja sama seluruh pihak ini juga merupakan bukti konkrit bahwa ikhtiar mencerdaskan anak bangsa adalah usaha bersama sesuai dengan peran dan bidang masing-masing pihak. ■

DAPODIK: DATA TUNGGAL BASIS BERBAGAI PROGRAM

Melalui data yang berasal dari satu sumber pendataan yang komprehensif (individual), relasional dan longitudinal, berbagai kegiatan, program dan kebijakan dapat dijalankan secara efektif, efisien, selaras dan tepat sasaran.

Data Pokok Pendidikan atau DAPODIK adalah sistem pendataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan/ pembelajaran, yang bersumber dari satuan pendidikan dan terus menerus diperbaharui secara online.

Kehadiran DAPODIK berawal dari pemikiran perlunya pergeseran paradigma dalam kegiatan pendataan yang selama ini dilakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pergeseran paradigma ini mengubah orientasi pendataan, dari agregat berubah menjadi individual; dari parsial-sporadis menjadi relasional; dan dari snapshot menjadi longitudinal.

Perubahan paradigma kegiatan pendataan itu, diiringi dengan penunjukan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar saat itu (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang) sebagai *pilot project* untuk merancang dan membangun sistem pendataan pendidikan yang efektif dan efisien. Penunjukan ini diformalkan melalui penerbitan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan.

Selanjutnya menyikapi perkembangan yang menggembirakan, pada tahun 2015, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Penerbitan

Permendikbud ini menegaskan kembali tentang penting dan perlunya DAPODIK. Pada Pasal 8 ayat (2) ditegaskan bahwa, hasil pengumpulan data melalui DAPODIK merupakan satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan yang didata. Artinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mentolerir adanya pengumpulan data selain dari DAPODIK.

Dalam Permendikbud itu, juga ditegaskan bahwa tata kelola DAPODIK menggunakan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, serta melibatkan Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, unit kerja eselon I, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan enam penugasan. Pertama, merancang prosedur pengumpulan data dengan memanfaatkan mekanisme yang berlaku pada Direktorat Jenderal. Kedua, melakukan sosialisasi formulir dan prosedur yang dihasilkan untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ketiga, membangun sistem pengumpulan dan penyimpanan data yang cepat dan efisien. Keempat, mengoordinasikan pengumpulan

semua DAPODIK dari satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kelima, menyediakan layanan *helpdesk* DAPODIK; dan keenam, menginformasikan kepada unit kerja mengenai semua atribut yang ingin didata terkait dengan entitas pendidikan yang menjadi bahan kebijakannya.

Dengan ditetapkannya DAPODIK sebagai satu-satunya sumber data, maka seluruh program dan kegiatan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus merujuk dan menggunakan data dari DAPODIK. Untuk memaksimalkan penggunaannya, mekanisme penggunaan data DAPODIK harus bersifat transaksional dengan program dan kegiatan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini terbukti ketika DAPODIK digunakan sebagai tools untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Ujian Nasional (UN), Evaluasi Satuan Pendidikan Penerima DAK, Kurikulum 2013, dan aneka tunjangan guru. Hasilnya, program dan kegiatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan sebelumnya.

Efektivitas dan efisiensi itu juga dirasakan oleh komponen di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana disampaikan Asep Supriadi, Kepala Sekolah SD Negeri Sukamanah, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. "Setelah adanya DAPODIK kepemilikan NPSN tertata lebih rapi dan tidak bentrok lagi. Lokasi sekolah juga dapat diketahui secara latitude maupun longitude, sehingga pencitraan lokasi tepat dan akurat", ujar Asep, yang dihubungi via elektronik, Rabu, 18 Oktober 2017.

Lebih jauh, DAPODIK juga sangat bermanfaat bagi Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/ Kota, sebagaimana diutarakan Ahmad Maulana Mahendra, dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Jawa Barat. Menurutnya, DAPODIK mempermudah dinas pendidikan mengetahui jumlah pasti pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) serta peserta didik (PD) yang terdapat di sekolah. Kepastian data ini sangat membantu Maulana saat menyusun perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dan program Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

Asep dan Maulana juga sependapat bahwa DAPODIK juga meringankan beban satuan pendidikan terkait pendataan yang dibutuhkan untuk beberapa program pendidikan.

Menurutnya, sekali melakukan pendataan, data yang dihasilkan dapat digunakan untuk beberapa program pendidikan.

"Kerusakan sarana dan prasarana pun dapat diketahui melalui manajemen DAPODIK, sehingga dalam pemberian bantuan pun tidak akan salah sasaran lagi karena setiap data yang masuk ke DAPODIK merupakan data segar yang langsung dikirim oleh pihak satuan pendidikan. Data siswa calon penerima KIP pun dapat dengan mudah diusulkan melalui DAPODIK, asalkan siswa yang bersangkutan dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari dinas sosial setempat," tegas Maulana, saat dihubungi via elektronik, Rabu, 18 Oktober 2017.

Selain itu, lanjut Maulana, semua guru juga merasakan manfaat DAPODIK. Data PTK yang tidak sesuai dengan linieritasnya terkait dengan tunjangan profesi misalkan, menjadi lebih terkontrol. DAPODIK juga mengatur ketentuan mengajar 24 jam, mengajar sesuai SK di sekolah induk maupun non induk, dan dapat melakukan monitoring terhadap keaktifan guru.

Senada dengan Maulana, Yundra Yani, guru SDS Arrayan, Jambi, yang dihubungi pada saat yang sama, juga menyatakan bahwa DAPODIK sangat membantu guru dalam bekerja. Menurut guru yang memperoleh sertifikasi profesi ini, DAPODIK mendukung transparansi antara kinerja dengan penghasilan. "Memang diperlukan pengawasan dan penilaian yang handal serta akurat sehingga adil," ujarnya.

Dengan entitas data yang sedemikian besar, data dalam DAPODIK sangatlah bermanfaat. Sebagaimana pernyataan Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), DAPODIK sangat diapresiasi banyak pihak sebagai pendataan yang terbaik yang pernah ada di Indonesia. Dengan kekayaan data yang dimiliki DAPODIK, niscaya perencanaan program pembangunan pendidikan dapat berjalan dengan lebih cepat dan lebih baik sebagaimana kebijakan pemerintah menuju *One Data*. ■

PERCEPATAN PENDIDIKAN NON-FORMAL: SISTEM BELAJAR ONLINE UNTUK MENGAKOMODIR KEBUTUHAN BELAJAR PESERTA DIDIK

“Teknologi bisa menjadi salah satu solusi untuk belajar dengan mudah, efisien dan efektif bagi masyarakat yang membutuhkan”



Siswa kesetaraan fokus mengerjakan soal di kelas

Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu bentuk wujud kehadiran pemerintah untuk mengakomodir peserta didik yang tidak bisa bersekolah di sekolah formal dengan berbagai macam alasan. Awalnya diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah berumur lebih tua dan tidak sekolah, pendidikan kesetaraan saat ini makin melebarkan pelayanan ke peserta didik lain dengan memanfaatkan teknologi. UPT Ditjen PAUD dan Dikmas Jawa Tengah kini menerapkan sistem pembelajaran online untuk pendidikan nonformal.

Kepala PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah, Jayeng Baskoro menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengembangkan proses belajar mengajar melalui online dengan basis

gadget dan komputer. Menurut Jayeng, hal ini didasarkan karena beberapa sekolah di Indonesia menghadapi kesulitan untuk menarik siswa melanjutkan pendidikan mereka dengan alasan berbagai masalah, seperti keuangan, jarak yang jauh antara sekolah dan rumah, atau karena kurangnya dukungan orangtua.

“Pendidikan itu kan suatu keharusan, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Semua warga negara harus mendapatkan akses pendidikan secara merata. Karenanya harus dilakukan terobosan untuk mengatasi permasalahan pendidikan di masyarakat, seperti arak sekolah yang jauh, faktor biaya dan lainnya. Namun, teknologi saat ini bisa menjadi salah satu solusi untuk belajar dengan mudah, efisien

dan efektif bagi masyarakat yang membutuhkan. Terkadang kita lihat masyarakat sangat aneh, buat pendidikan tidak ada biaya, sementara buat handphone atau internet bisa. Itulah dasar kami kembangkan proses belajar secara daring, pengajaran interaktif berbasis internet,” papar Jayeng.

Menurut Jayeng, setiap orang punya gaya belajar dan minat yang bervariasi. PP PAUD Dikmas Jawa Tengah juga tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan tatap muka dan sistem modular, ada yang melalui kursus. Sedangkan untuk proses belajar daring, di UPT yang terletak di jalan Diponegoro, Ungaran ini menyediakan ruangan virtual, ruangan khusus belajar mengajar dengan basis internet melalui perangkat multimedia seperti tablet, ponsel, dan komputer.

“Ini artinya, kita berikan pilihan kalau memang masyarakat punya potensi untuk melaksanakan online silahkan. Tapi yang masih ingin secara reguler melalui modul, kita siapkan juga. Yang terpenting bagi kami adalah siapapun bisa belajar,” ungkapnya.

Proses belajar melalui daring ini, lanjut Jayeng, pihaknya menyediakan web dengan beberapa fitur antara lain e-journals, ebook, online chatting, mobile apps, parental control, dan lain-lainnya. Selain lebih cepat dan hemat, fitur-fitur tersebut membantu pihak pengelola, pamong dan orang tua untuk melakukan pengecekan forum komunikasi bagi guru, murid, dan orang tua, berjalan atau tidak,” paparnya.

Selain itu, kata Jayeng, pihaknya juga tengah memaksimalkan peran ponsel. Pelajaran disebarkan lewat aplikasi ponsel Android yang disebut Edmodo yang bisa diakses guru dan murid. Dia menambahkan, dirinya cukup menerima update informasi apapun yang terjadi lewat aplikasi WhatsApp. Hal itu menurutnya sangat mudah dan membantu. “Hanya tinggal membuat grup per daerah atau per pelajaran. Jadi, fungsi alat komunikasi digital ini benar-benar kita manfaatkan,” ujarnya.

Ditambahkan, keuntungan pengembangan pendidikan melalui online, proses mengajar dan materi pendidikan yang disampaikan lebih interaktif, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan memfasilitasi penguasaan keterampilan dasar dengan mudah. Seperti diketahui, melalui internet masyarakat bisa mendapat informasi lebih banyak dibanding di kelas. Sehingga satu materi pelajaran, siswa bisa mendapatkan materi dan pengalaman yang lebih banyak.

“Ilmu pengetahuan tidak hanya tergantung

dari guru atau tutor, karena sistem online sudah pasti dengan internet sebagai sumber belajar yang luar biasa. Tidak perlu tergantung guru. Kalau tidak ada guru, dengan internet itu pun materi sudah tersedia. Tetapi bagus juga harus ada tutor atau pendamping, khawatirnya disalahgunakan dan untuk mengarahkan cara menggunakan teknologi yang benar dan manfaatnya besar,” paparnya.

Penerapan belajar online di UPT Jawa Tengah untuk sementara dipraktekkan kepada siswa Paket C. Namun, beberapa Paket B sudah ada yang mengikuti. Hal ini terkait kendala sarana dan prasarana serta kesiapan siswa paket C.

“Saat ini sudah digalakkan di siswa Paket C, dan diterapkan ke beberapa siswa Paket B. Karena mental siswa Paket C sudah matang, hal ini sebagai antisipasi penyalahgunaan internet sebagai sumber belajar,” ungkapnya.

Meski baru diterapkan di Paket B dan C, PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah sudah mempersiapkan dan menerapkan proses belajar online ini untuk semua pendidikan nonformal. Adapun sebaran penggunaan belajar online di PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah ini telah diterapkan di 40 PKBM. Bahkan, diakui Jayeng, pihaknya didatangi Pengurus Pondok Pesantren Munir Karang Anyar, yang meminta lembaga yang dipimpinnya memberikan solusi pengajaran berbasis internet. Karena pihak pesantren merasa memiliki santri yang hanya belajar mengaji atau agama saja. Tetapi tidak memiliki kecakapan pendidikan umum dan formal.

“Pengurus Pesantren mengaku kalau banyak warga dan anak asuhnya hanya nyantri saja. Sementara sekolahnya tidak diurus atau putus sekolah. Mereka meminta saya untuk menerapkan belajar paket A, B dan C dengan sistem online,” cerita Jayeng.



BERAGAMNYA PESERTA UNPK PAKET B: DARI BURUH MIGRAN HINGGA ATLET NASIONAL

UNPK paket B 2017 juga diikuti oleh peserta yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti pendidikan

Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) tidak hanya diikuti oleh peserta didik yang putus sekolah karena kekurangan ekonomi dan tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal saja, namun juga diikuti oleh peserta yang memiliki keterbatasan waktu jika mengikuti pendidikan formal seperti atlet nasional.

UNPK Paket B Gelombang Pertama dilaksanakan pada 13, 14, dan 20 Mei 2017 dan Gelombang Kedua Paket B dijadwalkan pada 7, 8 dan 14 Oktober 2017. Dengan 6 mata pelajaran yang diujikan, yaitu Bahasa Indonesia,

Bahasa Inggris, Matematika, Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, dan IPS. Disamping itu, UNPK Paket B juga diikuti peserta didik dari berbagai profesi dan status sosial yang beragam. Mulai peserta didik dari kalangan pesantren, karyawan hingga profesional.

“Alhamdulillah, pelaksanaan UNPK berjalan sukses dan seluruh peserta sangat antusias. Mereka telah mempersiapkan diri untuk UNPK dan mendapat ijazah guna kehidupan mereka,” ujar Harris, saat meninjau langsung UNPK Paket B di wilayah Jakarta Barat.

Di samping itu, Harris juga meninjau

pelaksanaan UNPK Paket B di Lapas IIA Salemba. Di kesempatan tersebut ia menghimbau kepada PKBM untuk segera mengurus akreditasi agar bantuan operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat tersalurkan.

“Pendidikan itu sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan. Ijazah adalah pelengkap dan syarat agar kita mendapat pekerjaan. Sehingga anak-anak muda jangan kalah, harus semangat dalam mencari ilmu guna bekal kehidupan kelak,” papar Kuswara (62 tahun), peserta tertua UNPK Paket B yang lahir pada 1 April 1955.

Di Jakarta, UNPK Paket B ini diikuti oleh pemain sepak bola Persija Selatan U-17 dan atlet tenis meja nasional. Atlet tenis meja nasional itu di antaranya Rina Sintia, Desy Ramadanti, Satria Candra Kirana, Az Zahra Umul Uya. Mereka belajar di PKBM 06 Meruya Utara Jakarta Barat. “Rina Sintia dan Desi Ramadanti adalah atlet DKI Jakarta yang meraih emas pada Pekan Olahraga Nasional Indonesia (PON) XIX/2016 di Jawa Barat lalu. Mereka akan mengikuti TC di Beijing, Cina pada Juni mendatang,” ungkap Meri Emiliawati, Ketua PKBM 06 Meruya Utara, Jakarta.

Menurut Meri, meski sibuk dalam berlatih dan bertanding demi mengharumkan Indonesia, namun semangat belajar mereka sangat tinggi. “Mungkin karena belajar di pendidikan formal tidak bisa diikuti, maka mereka memilih belajar di PKBM yang bisa disesuaikan waktu belajarnya. Bahkan, mereka juga minta kepada kami untuk

privat pelajaran Matematika,” papar Meri. Bahkan peserta UNPK Paket B juga diikuti oleh ABK (anak berkebutuhan khusus) seperti di Kota Depok dan Bogor.

Tak hanya itu, peserta UNPK Paket B juga diikuti oleh peserta didik dari tenaga kerja di luar negeri seperti di Hongkong dan Taiwan. UNPK di Taiwan digelar pada tanggal 20 Mei bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, diikuti oleh 47 warga belajar Kejar Paket A dan Paket B. Peserta UNPK di Hongkong diikuti oleh 212 warga belajar Kejar Paket B dan C.

“UNPK di Taiwan kali ini masih berbasis kertas dan pensil, mempertimbangkan kesiapan infrastruktur yang ada meskipun di dalam negeri sudah menerapkan ujian berbasis komputer. Secara riil semua peserta sudah terdaftar di data pokok pendidikan. Dan, dari 6 lokasi di luar negeri, di Taiwan inilah yang paling siap untuk gelombang pertama. Dan, diharapkan untuk UNPK gelombang kedua nanti bisa UNBK,” papar Erman Syamsudin, Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang berkesempatan hadir untuk meninjau kelancaran pelaksanaan UNPK di Taiwan. ■



MEMBERI RUANG KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEMAJUKAN BUDAYA

Undang-undang ini sudah digagas sejak 35 tahun lalu, akhirnya disahkan dalam Sidang Paripurna MPR/DPR pada 27 April 2017 yang lalu

Saat ini, Indonesia sudah memiliki undang-undang tentang kebudayaan yang diatur dalam UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Budaya). Lantas, apakah tujuan dari UU Pemajuan Kebudayaan dan bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pemajuan kebudayaan di Indonesia? Berikut ini beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk implementasi dan sumbangsih terhadap pemajuan kebudayaan Indonesia.

UU Pemajuan Kebudayaan memungkinkan adanya ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi nyata dengan menyumbang pokok pikiran kebudayaan daerah kepada perwakilan ahli yang ditunjuk di masing-masing daerah. Pokok pikiran yang disampaikan ke perwakilan-perwakilan tersebut akan menjadi rujukan penyusunan strategi kebudayaan dan rencana induk pemajuan kebudayaan oleh Pemerintah Pusat.

Kemajuan suatu budaya tidak terlepas dari keterbukaan akses informasi dan dokumentasi sehingga

melahirkan apresiasi dan membuka kesempatan untuk memajukan serta mengembangkan budaya tersebut. Maka dari itu, akan dilakukan pencatatan dan dokumentasi objek kebudayaan melalui suatu sistem pendataan kebudayaan terpadu. Sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat ini nantinya akan terbuka untuk masyarakat umum sehingga seluruh masyarakat dari mana pun dapat mengakses sistem kebudayaan ini.

Selain itu, pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan secara berkelanjutan juga memiliki peranan penting. Data objek kebudayaan akan melalui proses verifikasi dan validasi data terlebih dahulu oleh tim ahli di bidang masing-masing yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Dengan begitu data objek pemajuan kebudayaan yang tersedia pun selalu terkini dan aktual.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan objek kebudayaan, masyarakat pun diharapkan dan dituntut untuk berperan aktif untuk mengamankan dan memelihara

objek-objek kebudayaan. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari terjadinya klaim kebudayaan dari pihak asing. Masyarakat harus sadar dan waspada terhadap setiap kemungkinan kesalahpahaman atau klaim kebudayaan secara sepihak dari negara lain.

Tentunya, kita semua tidak ingin kebudayaan kita diakui sebagai milik negara lain bukan? Masyarakat juga sebaiknya turut berkontribusi untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang ada di lingkungan sekitarnya sebagai upaya untuk pencegahan akan terjadinya kerusakan, hilang, atau bahkan musnahnya objek kebudayaan di Indonesia.

Kita juga diharapkan untuk turut berperan aktif menyelamatkan objek pemajuan kebudayaan melalui revitalisasi, repatriasi, atau restorasi dalam rangka mengembangkan objek pemajuan kebudayaan melalui penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman.

Yang terakhir, peran serta masyarakat dalam memajukan budaya Indonesia diharapkan turut mempublikasikan segala



informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Hal ini tentunya mudah untuk dilakukan masyarakat millennial yang cenderung aktif menggunakan teknologi dan sosial media. Publikasi dengan menggunakan media apapun tentunya dapat membantu upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia sehingga dapat dikenal, tidak hanya di negeri sendiri, namun juga di kancah internasional.

Dengan disahkannya

UU Pemajuan Kebudayaan ini, tidak hanya diharapkan dapat membawa angin segar dalam pemajuan Budaya di Indonesia, namun juga teriring harapan agar semakin majunya kebudayaan kita dan menjadi awal langkah nyata untuk memajukan kebudayaan Indonesia.

Mengutip perkataan Presiden Jokowi, "DNA masyarakat Indonesia adalah kebudayaan," maka tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat Indonesia sangat erat hubungannya dengan nilai luhur budaya dan tradisi.

Sejak lahir, dibesarkan hingga wafat, kehidupan setiap masyarakat Indonesia selalu berlandaskan dengan warisan luhur dan tradisi nenek moyang terdahulu.

Mengingat hal tersebut, sudah sepatutnya kita turut melestarikan kekayaan budaya yang kita miliki dan bangga mengakuinya sebagai identitas asli masyarakat Indonesia. Mari bangga menjadi masyarakat Indonesia yang berbudaya dan menghargai budaya kita sendiri! ■

REVITALISASI WARISAN BUDAYA DAN PENETAPAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA

Mengembalikan Fungsi dan Derajat Warisan Budaya Benda

Esensi revitalisasi bukanlah sekadar pembangunan fisik agar semua terlihat lebih menarik, namun juga dimaksudkan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang ada sehingga dapat dirasakan kehadirannya oleh pancaindera. Termasuk di dalamnya merevitalisasi warisan budaya benda, sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yaitu menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus bergerak aktif menggali, mewujudkan dan mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Kemendikbud melakukan sejumlah langkah strategis untuk mempertahankan aset bangsa tersebut. Langkah strategis itu dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, dan pembinaan terhadap warisan budaya benda. Perlindungan terhadap budaya bangsa ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Bab II dalam UU No. 5 Tahun 2017 adalah inti dari UU tersebut, yaitu mengatur tentang Pemajuan 10 Objek Kebudayaan yang harus dimengerti sebagai sebuah taksonomi, bukan sebagai daftar kegiatan atau benda kebudayaan. Semua itu dapat ditelaah dan dipelajari di dalam UU Pemajuan Kebudayaan,” ujar Direktur

Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid.

Ia mengatakan, warisan budaya benda ialah warisan yang dapat diinderakan dengan mata ataupun tangan. Misalnya berbagai artefak atau situs yang tersebar di penjuru Nusantara, seperti candi, arsitektur kuno, sebilah keris, hingga gerabah sekalipun.

Tahun ini Kemendikbud melakukan revitalisasi terhadap warisan budaya benda. Revitalisasi ini terjabarkan dalam pembangunan museum, pemugaran candi-candi, hingga daerah-daerah temuan benda purbakala (situs). Langkah ini dilakukan lantaran arus tantangan zaman yang semakin deras menggeser nilai-nilai dalam sebuah warisan budaya. Revitalisasi dibutuhkan untuk mengembalikan semuanya.

Aktivitas revitalisasi ini melibatkan beberapa kegiatan yang di dalamnya termasuk kegiatan pelestarian cagar budaya. Salah satunya yakni pemugaran Candi Perwara, sebagai warisan budaya benda, yang dilakukan dengan mengembalikan komponen asli bangunan. Batu-batu komponen asli bangunan dikembalikan dengan teknik takik berdasarkan hasil susun coba yang telah dilakukan. Susun coba dilakukan per bagian candi (kaki, tubuh, atap) dan ditempatkan pada lokasi di sekitar pemugaran agar mudah dijangkau.

Usia candi yang sudah hadir sejak ratusan tahun lamanya juga menjadi prioritas untuk melindungi relief-relief yang ada. Candi



Pada tahun 2012 dengan terbentuknya Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, maka kegiatan pencatatan WBTB ditangani oleh direktorat ini.

Sampai saat ini pencatatan WBTB Indonesia belum berhasil dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan antara lain karena kurang melibatkan unsur komunitas, kelompok sosial, dan perseorangan. Namun inventarisasi WBTB sudah banyak dilakukan oleh pemangku kepentingan, baik dengan cara manual maupun daring oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, maupun Perseorangan.

Sejak Indonesia menjadi Negara Pihak Konvensi 2003 tentang Perlindungan WBTB, sesuai dengan pasal 11 dan 12 Konvensi 2003, Indonesia diwajibkan untuk mengatur identifikasi dan inventarisasi WBTB yang ada di wilayah Indonesia. Dengan dibantu perkembangan teknologi web 2.0, para pengguna dapat melakukan pendaftaran secara daring sekaligus melakukan pencatatan WBTB dengan memuat informasi tentang karya budaya di halaman portal yang disediakan. Pencatatan WBTB ini kemudian akan dinilai oleh dewan pakar/tim

penilai yang memiliki keahlian di bidang WBTB. Jika lolos, langkah selanjutnya adalah melakukan penetapan WBTB nasional.

“Ini langkah konkret perlindungan warisan budaya,” ujar Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, dalam acara Perayaan dan Penyerahan Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda Tahun 2017 di Gedung Kesenian Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017.

Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia merupakan upaya untuk perlindungan warisan budaya tak benda yang ada di wilayah Indonesia, melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi objek pemajuan kebudayaan dengan melibatkan pemerintah daerah, komunitas, dan akademisi.

Tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penghargaan kepada Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai provinsi yang paling banyak mendapatkan Sertifikat Penetapan WBTB Indonesia tahun 2017, dengan tujuan agar provinsi sebagai pemilik kebudayaan daerah yang lain terpacu untuk mengusulkan kekayaan budayanya untuk ditetapkan dan melakukan pelestariannya. ■



Rumah Adat Bailelo Maluku



Jaran Kecak Jawa Timur



Lodho Jawa Timur





Melalui Sidang ke-12 Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO di Pulau Jeju, Korea Selatan, Pinisi: Seni Pembuatan Perahu di Sulawesi Selatan (*Art of boatbuilding in South Sulawesi*) akhirnya resmi ditetapkan ke dalam Warisan Budaya Takbenda UNESCO.

Terdapat beberapa tahap dalam pembuatan kapal tradisional Sulawesi Selatan. Proses pembuatannya berbeda dengan kapal modern karena memiliki keunikan tersendiri. Tahap pertama adalah pemilihan kayu dihutan. Kayu yang digunakan adalah kayu besi (ulin). Para pekerja memilih sendiri pohon-pohon yang hendak ditebang.

Tahap selanjutnya adalah ritual sambung lunas. Ritual Sambung Lunas adalah menyambung kayu pertama (lunas) yang akan menjadi kerangka kapal. Selanjutnya adalah proses pembuatan kapal. Dalam pembuatannya, seorang Panrita Lopi tidak membutuhkan design atau cetak biru maupun alat ukur. Mereka mengerjakan berdasarkan kebiasaan dan perasaan.



PENGGIAT BUDAYA, JEMBATAN MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH

Pernahkah terbesit, berapa banyak kebudayaan yang dimiliki Indonesia? Berapa banyak bahasa, tarian, hingga pelaku/pengelola kesenian yang ada di setiap wilayah Indonesia? Kemudian muncul pertanyaan lain, bagaimana caranya agar semua itu tercatat dan tidak hilang? Bukankah setiap karya dan penciptanya harus diapresiasi?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui program Pegiat Budaya memiliki misi khusus, yakni menjadi corong antara masyarakat dengan pemerintah dan sebaliknya. Program ini bertujuan agar masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, bahkan di pelosok, mendapatkan perhatian dan mampu menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, pun pemerintah dapat mengetahui daerah mana saja yang memiliki potensi budaya namun belum teridentifikasi. Melalui Pegiat Budaya, Kemendikbud berharap dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Terluar

dan Terdepan (2T).

Program ini dibuka untuk masyarakat umum yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), dan memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi untuk negara. Sebab, tugas para Pegiat Budaya tidak main-main, mereka bertanggung jawab pada pencatatan data dengan tingkat akurasi tinggi, maka tak bisa dipungkiri mereka harus memiliki ketahanan fisik yang kuat, dan mampu beradaptasi dengan daerah penempatan. Kriteria ini jelas harus dimiliki oleh para Pegiat Budaya, sebab di lapangan, mereka dihadapkan pada situasi yang tidak bisa diprediksi.

Secara garis besar, para Pegiat Budaya bertugas menyampaikan informasi-informasi kebudayaan, mengonsolidasi hal-hal tentang kebudayaan, dan melakukan pencatatan data kebudayaan. Program ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia berkontribusi untuk negara dalam bidang seni dan budaya.

Tahun ini Kemendikbud membuka dua kali seleksi

Pegiat Budaya yang dilakukan pada April dan Oktober 2017. Seleksi yang diselenggarakan pada April 2017 merupakan perekrutan pegiat budaya untuk jangka waktu selama tujuh bulan. Mereka yang tersaring ditempatkan pada 164 kabupaten/kota yang tersebar di ke 32 provinsi di seluruh Indonesia, dengan predikat 2T. Sementara pada seleksi yang digelar pada Oktober 2017, masa kerja para pegiat budaya yang lolos proses seleksi berlangsung sejak November 2017 hingga Mei 2019. Pada seleksi kedua ini, para pegiat pendidikan ditempatkan pada 10 kabupaten/kota.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid mengatakan, tugas penting pegiat budaya ialah memperluas informasi budaya ke masyarakat. "Maksudnya agar di daerah yang selama ini dibidang kurang optimal, bisa lebih dioptimalkan kembali," katanya saat pembukaan Pegiat Budaya 2017 di Jakarta.

Sebelum melaksanakan tugas di daerah penempatan masing-masing, para penggiat budaya menerima pembekalan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. Peserta mendapatkan pembekalan seputar kebudayaan, seperti dasar-dasar kebudayaan, pemanfaatan media sosial, pengenalan aplikasi manajemen Penggiat Budaya, hingga pengenalan masing-masing program dari Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Kemendikbud menggunakan strategi pelibatan masyarakat ini dalam rangka menjaga, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang berkolaborasi dengan putra-putri daerah terpilih. Berbagai upaya dilakukan untuk melestarikan dan merawat warisan budaya yang ada di Indonesia, baik benda maupun tak benda. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar budaya yang ada tidak luntur dan tergerus zaman. Oleh karena itulah, penggiat Budaya menjadi sarana yang cukup penting dalam mendongkrak kembali semangat muda untuk terus menggalakan cinta budaya.

Program Penggiat Budaya

juga sejalan dengan Undang-Undang (UU) tentang Pemajuan Kebudayaan yang baru disahkan bulan April 2017 yang lalu. Ada 4 pokok di dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan, yaitu Perlindungan dan Perawatan, Pemanfaatan, Pengembangan, serta Pembinaan yang berkaitan dengan SDM. Para Penggiat Budaya ini melaksanakan keempat pokok pemajuan kebudayaan tersebut di wilayah kerja masing-masing.

Pencatatan Aset Kebudayaan melalui Registrasi Nasional Cagar Budaya

Pendaftaran Cagar Budaya adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran Cagar Budaya di wilayahnya. Oleh karena sebagian besar

Cagar Budaya berada di tangan masyarakat, perlu pula diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan pendaftaran, sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Masyarakat mempunyai peran yang dominan dalam pendaftaran, masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai cagar budaya.

Dengan demikian Cagar Budaya berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian dapat dicatat dan diberi perlindungan hukum terhadapnya. Berkas pendaftaran dan dokumentasi yang dibuat terhadap Cagar Budaya disimpan sebagai arsip untuk kepentingan masa depan serta sumber informasi pengembangan kebudayaan nasional.

Selama tahun 2017 jumlah objek yang didaftarkan sebanyak 8.997 buah. Untuk jumlah keseluruhan sejak tahun 2013, terdapat sebanyak 60.384 objek yang didaftarkan dan ini dapat dilihat di <http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id>. ■

REVITALISASI DESA ADAT MEMBANGUN KEMBALI KESADARAN AKAR TRADISI

“Revitalisasi Desa Adat bukan sekadar memperbaiki fisik bangunan. Lebih dari itu, Revitalisasi Desa Adat dimaknai sebagai membangun kembali kesadaran akar tradisi yang sudah mendarah daging di masyarakat adat”



Revitalisasi Desa Adat di Kampung adat Ratenggaro-Nusa Tenggara Timur

Keberadaan desa adat sebagai pewaris, pelestari sekaligus pelaku aktif kearifan lokal sangatlah potensial dalam mempertahankan identitas budaya serta membangun kesadaran akan keragaman budaya di Indonesia. Hanya saja, jika ditarik benang merah antara fungsi desa adat dengan kondisi fisik desa adat yang ada saat ini sangat jauh berbeda.

Masyarakat hukum adat juga mengalami risiko sosial yang menyebabkan terjadinya kerentanan sosial. Salah satu penyebabnya adalah hilangnya fungsi bangunan adat dalam konteks pengikat kesatuan sosial dan menjadi faktor penting dalam memelihara sistem budaya para penghuninya. Selain itu, banyak bangunan adat yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya fenomena alam, iklim, cuaca, bencana alam, maupun kondisi bangunan yang telah termakan

usia. Dan, jika mengandalkan pembangunan kembali rumah adat oleh masyarakat hukum adat sering kali mengalami kendala keterbatasan anggaran.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah tak segan membantu memfungsikan kembali desa adat untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas keberadaan desa-desa adat dalam pelestarian kebudayaan, serta menguatkan karakter dan jati diri bangsa. Oleh karena itulah, di tahun 2017 Kemendikbud melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan memberikan bantuan revitalisasi desa adat kepada 75 desa adat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, sasaran bantuan Revitalisasi Desa Adat ialah masyarakat hukum adat yang memiliki kekuatan identitas budaya yang khas

dan dilaksanakan secara rutin, serta memiliki pola dan aktifitas hidup yang diperoleh secara turun menurun. Adapun tema yang diangkat dalam Revitalisasi Desa Adat tahun 2017 ialah Kegotongroyongan. Program Revitalisasi Rumah Adat yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tak lain untuk memastikan adat tradisi dan kebudayaan lokal bisa bertahan dan menjadi ujung tombak Bhineka Tunggal Ika.

“Begitu bangganya warga Desa Adat Wudi ketika menerima bantuan RDA. Karena, sudah hampir 30 tahun rumah adat ini tidak pernah bisa berdiri kembali. Proses pengerjaan kedua rumah adat tersebut dilakukan secara gotong royong oleh seluruh warga desa adat selama dua bulan. Tiap hari lebih dari 100 warga bekerja membangun rumah adat. Kami kerja siang-malam.

Ada yang gali lobang, kasih bersih bambu, kasih bersih alang, dan macam-macam. Dan, selama proses pengerjaannya kami tidak pulang, tapi tinggal di sini. Berkat bantuan pemerintah, kami bisa kumpul dan kerja bersama bangun rumah adat. Kami sangat bangga dan senang dengan perhatian dari pemerintah.” ujar Ketua Adat Desa Wudi, Sumba, NTT (penerima bantuan pemerintah RDA 2017). ■



REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA SEBAGAI SUMBER INFORMASI PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL

Sebagian besar cagar budaya berada di tangan masyarakat, sehingga perlu diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan pendaftaran

Masjid Jami terletak di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Masjid ini yang dibangun sekitar tahun 1825-1828 pada masa pemerintahan Sultan Ayub merupakan saksi perkembangan ajaran Islam di Kabupaten Sanggau. Walaupun sudah lebih dari seabad, masjid ini masih berdiri kokoh. Masjid Jami kini telah didaftarkan sebagai cagar budaya yang wajib dilindungi dan dijaga.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2010 Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Mengingat pentingnya cagar budaya untuk dilestarikan keberadaannya, maka

pendaftaran atas cagar budaya sangatlah penting agar dapat diketahui jumlah, jenis, dan persebarannya. Pendaftaran cagar budaya adalah upaya pencatatan untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran benda, bangunan,

struktur, dan lokasi yang diduga sebagai cagar budaya. Hal ini dikarenakan sebagian besar cagar budaya berada di tangan masyarakat, sehingga perlu diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan pendaftaran.

Dengan demikian, cagar budaya berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil

penemuan dapat dicatat dan diberi perlindungan hukum terhadapnya. Berkas pendaftaran dan dokumentasi yang dibuat terhadap cagar budaya disimpan sebagai arsip untuk kepentingan masa depan dan sumber informasi pengembangan kebudayaan nasional.

“Dengan adanya Registrasi Nasional Cagar Budaya, pemerintah daerah dan masyarakat semakin terpacu untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi cagar budaya yang ada di sekitar”. kata Siki Handini Wedariwati, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. ■

Gereja Tua di Kupang, Nusa Tenggara Timur



Selama tahun 2017 jumlah objek yang didaftarkan sebanyak 8997. Total sejak tahun 2013 sebanyak 60.384 objek yang didaftarkan. Informasi terkait Registrasi Cagar Budaya dapat dilihat pada laman <http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/siteregnas/>.



silakan pindai QR code di atas.



KOMUNITAS BUDAYA BERPERAN DALAM MELESTARIKAN BUDAYA BANGSA

“Sebelumnya Sanggar Kanamingku Wakatobi hanya bisa meminjam alat musik tradisional dari Dinas Kabupaten untuk tampil. Setelah menerima bantuan, kami bisa membeli perlengkapan alat musik dan mengadakan pagelaran. Bantuan ini juga memicu semangat anak-anak. Dulu anggota kami 40 anak, setelah ada bantuan jadi tambah lagi 30 anggota baru. Mudah-mudahan sanggar Kanamingku makin mandiri dan terus berkarya agar bisa menjaga tradisi dan budaya khas Wakatobi. Ujar pengurus Sanggar Kanamingku dari

Wakatobi

Budaya etnis dan budaya lokal yang dimiliki oleh kelompok-kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia menjadi bagian penting dari kebudayaan bangsa yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penguatan jati diri dan pembentukan karakter bangsa serta ketahanan budaya bangsa. Salah satu sasaran pembangunan kebudayaan nasional adalah menggali, memelihara dan melestarikan karya-karya budaya yang mengacu pada budaya bangsa, serta memberikan perlindungan hukum terhadap

individual dan komunal.

Kondisi tersebut diperkaya lagi dengan keberadaan sejumlah komunitas yang konsisten dengan tradisi-tradisi yang diwarisi dari para leluhurnya. Komunitas itu lazim disebut sebagai Komunitas Budaya. Komunitas-komunitas budaya yang ada di masyarakat terwujud dalam berbagai bentuk institusi, ada yang berupa sanggar seni, padepokan, organisasi penghayat, komunitas adat, keraton dengan perangkat tradisinya dan masih banyak lagi bentuk komunitas budaya yang hidup di masyarakat.

Namun kondisi komunitas

budaya saat ini kerap memprihatinkan. Disatu sisi mereka memiliki idealisme dan komitmen yang kuat terhadap keberlangsungan tradisi yang dimiliki, namun di sisi lain mereka kerap menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya aspek legalitas dan keterbatasan sarana dan prasarana. Dalam rangka memfasilitasi peran serta komunitas budaya tersebut, Kemendikbud meluncurkan program Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM). Program ini merupakan pemberian fasilitasi dari pemerintah melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan yang dimanfaatkan untuk merevitalisasi, memberdayakan, dan meningkatkan kualitas keberadaan komunitas budaya, dalam rangka pelestarian kebudayaan.

“Kami merasakan dampak yang luar biasa dari bantuan

FKBM. Sekarang Sanggar akhirnya punya alat, kostum dan property yg memadai/ standar. Bantuan ini juga membangkitkan kepercayaan diri anak-anak sanggar. Jadinya anak-anak semakin semangat.

Rencana ke depan, kami akan menambah sekolah-sekolah dan desa-desa yang akan kami ajarkan tari dan musik tradisional.

Kami juga sedang mempersiapkan Sanggar Darung Tingkang untuk seleksi musik dan tari tradisional tingkat Provinsi di tahun depan. “ kata pengurus Sanggar Seni dan Budaya Darung Tingkang Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Hal tersebut diperkuat juga dari pengurus Sanggar Seni Lawang Budaya, Bangka Belitung

“Komunitas kami ini berawal dari inisiatif sendiri. Melalui bantuan pemerintah, kami merasa sangat terbantu dan mengucapkan terima kasih pada pihak terkait. Semoga kesenian Bangka Beliting dapat

terus terjaga.”

Melalui program FKBM ini telah terfasilitasi 152 Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM) dan Revitalisasi Desa Adat (RDA) di seluruh wilayah Indonesia. Mari ikut menjaga karya – karya budaya bangsa ini, kita patut bangga atas keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia. ■



DIALOG NASIONAL MERAWAT KEUTUHAN NKRI

Melalui dialog sebuah kesepakatan dapat dicapai secara harmoni dan satu suara”

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Dialog Nasional bertajuk “Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa Dalam Rangka Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” di Palu, Sulawesi Tengah. Dialog ini membahas tentang topik-topik nasionalis yang dirasa mampu merawat dan menjaga keutuhan NKRI.

Adapun terselenggaranya dialog nasional ini memiliki empat tujuan yang hendak dicapai, yakni meningkatkan peran dan fungsi nilai-nilai budaya; memantapkan persatuan dan kesatuan antar umat berketuhanan Yang Maha Esa dalam upaya membangun peradaban bangsa; meningkatkan serta menguatkan partisipasi dan kapasitas organisasi penghayat, komunitas adat, raja dan sultan Se-Nusantara

serta organisasi masyarakat keagamaan.

Setidaknya, dalam dialog nasional ini pemerintah memantapkan peran dan membentuk barisan bersama para pemangku kepentingan adat. Kurang lebih terdapat 300 orang peserta dialog yang terdiri dari perwakilan organisasi, komunitas adat dan tradisi, lembaga adat, raja dan sultan se-Nusantara, budayawan dan akademisi.

“Dialog ini sangat penting, karena diharapkan mampu menghasilkan rumusan dan rekomendasi mengenai peran dan partisipasi masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Keraton, serta organisasi

kemasyarakatan dalam membangun karakter dan jati diri bangsa menuju bangsa yang adil, makmur, bermanfaat dan sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai kearifan lokal yang berbudi pekerti luhur,” ujar Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid membuka dialog

nasional.

Melalui dialog ini dapat digarisbawahi pentingnya semua aspek kehidupan masyarakat beradat. Termasuk menumbuhkan kembali kecintaan akan tradisi oleh para penerus bangsa. ■

The infographic features a central illustration of a man in traditional Indonesian attire (Korpri) standing in front of a large number '12'. Surrounding him are 12 numbered blue boxes, each containing a recommendation. The recommendations are as follows:

1. Para Raja, Sultan, Komunitas Adat, dan Organisasi Sosial Keagamaan, serta Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam mengengkratkan adat istiadat sekaligus dengan mengacu pada kesepakatan Jember
2. Pentingnya para Raja dan Sultan, Komunitas Adat, Organisasi Sosial Keagamaan, serta Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa menerapkan lembaga adat seperti Keraton, Kamajenean, Kertajaya, Kedatuhan, Palingsih, dan Satrio, Saroseban, baik secara fisik maupun non fisik untuk pemertanian, pengembangan, pemertanian, dan pemertanian dalam rangka pengoptimalan budaya bangsa Indonesia
3. Pentingnya mengintegrasikan pendidikan karakter bangsa berbasis budaya dalam kurikulum nasional, mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi dengan model pembelajaran yang mengaitkan pada tokeyati, leluhur, dan nilai-nilai luhur
4. Pentingnya peningkatan kompetensi bagi orang-orang penatib, ketua dan tokoh adat, para penghayat, dan perungku kepeertangan lainnya
5. Pemerintah memfasilitasi percepatan implementasi kebijakan jaminan kebudayaan melalui peningkatan, pemertanian, dan pemertanian dalam rangka pemertanian nilai-nilai budaya bangsa dalam menajaga, dan pemertanian istiadat luhur
6. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana sebesar 3 s.d. 5 persen untuk pelestarian kebudayaan
7. Pentingnya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemertanian kebudayaan terutama pemertanian budaya lokal ke semua pemertanian kepeertangan
8. Pentingnya kebijakan pemertanian peran, fungsi, dan pemertanian tokoh-tokoh informal dan lembaga kearifan lokal
9. Pentingnya pelibatan tokoh-tokoh informal dalam pemertanian, pemertanian, dan pemertanian implementasi pemertanian kebudayaan
10. Pentingnya pemertanian payung hukum dan produk hukum adat
11. Pentingnya dibentuk Lembaga Pemertanian Kebudayaan dan Asosiasi Penulis Budaya
12. Adalah pentingnya dibentuk pemertanian Pancasila dalam rangka pemertanian Nilai-nilai Pancasila

12 rekomendasi yang dihasilkan dan disepakati oleh seluruh peserta dialog nasional

PENGUATAN PELAKU KEBUDAYAAN MELALUI ANUGERAH KEBUDAYAAN DAN MAESTRO SENI TRADISI

Perjalanan panjang seorang seniman dalam berkreasi dan berinovasi tentu tidaklah mudah. Banyak hal yang dilalui, mulai dari sulitnya menjangkau pasar, hingga menentukan 'identitas'. Bertahan dalam berbagai situasi dan terus berkarya hingga kini, menjadi tolok ukur akan konsistensi para seniman ini. Bagaimana mereka bekerja dengan hati, dan memberi persembahan untuk negeri. Dari kegigihan itu, tak jarang, banyak dari karya mereka berkibar dan dikenal masyarakat internasional. Persoalannya bukan sekadar mencipta, tetapi bagaimana akhirnya karya itu diterima dengan tangan terbuka. Terutama apresiasi dari dalam negeri sendiri.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melalui Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya (WDB), Direktorat Jenderal Kebudayaan merekam jejak para maestro Indonesia itu. Kemendikbud memberikan 47 penghargaan kebudayaan untuk berbagai kategori. Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Menteri Muhadjir yang didampingi oleh Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid dan Direktur WDB Najamuddin

Ramly, di Plaza Insan Berprestasi, Kamis, 28 September 2017.

Melalui penghargaan ini, Menteri Muhadjir memberi hormat dan penghargaan yang tinggi atas karya-karya para seniman ini. Mendikbud juga menjelaskan, dengan disahkannya UU Pemajuan Kebudayaan, pemerintah memiliki pijakan yang cukup kuat untuk terus memberikan dukungan terhadap eksistensi dari berbagai macam sumber kebudayaan yang ada, sehingga dapat terus dikembangkan dan menjadi kekayaan khasanah bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Penyerahan anugerah kebudayaan ini dimeriahkan dengan penampilan-penampilan seni musik dan seni tari, di antaranya kolaborasi musik etnik yang dibawakan oleh Dwiki Dharmawan, Irang Awai, Roland M. Lumbantobing, Irwansyah Harahap, dan Rudolf Jopyy Sajow. Tak kalah menarik, penampilan seni tari Balet Indonesia dari Sanggar Ibu Marlupi Sijangga juga turut meriahkan malam Anugerah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni dan Tradisi 2017.

9 kategori Anugerah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni dan Tradisi 2017

Kategori Bintang Budaya Parama Dharma sebanyak 3 penerima

Kategori Satyalancana Kebudayaan sebanyak 8 penerima

Kategori Pencipta, Pelopor dan Pembaru sebanyak 8 penerima

Kategori Pelestari sebanyak 8 penerima

Kategori Komunitas sebanyak 3 Komunitas

Kategori Anak Remaja sebanyak 5 penerima

Kategori Pemerintah Daerah sebanyak 5 penerima

Kategori Perorangan Asing sebanyak 3 penerima

Kategori Maestro Seni Tradisi sebanyak 4 penerima

Profil: Dari Filsuf, Seniman, hingga Komunitas Budaya

Dari yang muda hingga yang sudah tiada. Dari perseorangan hingga komunitas budaya. Dari 47 penerima Anugerah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni dan Tradisi 2017, beberapa di antaranya adalah seorang filsuf, filsolog, dan komunitas budaya. Beberapa di antaranya adalah Soedjatmoko (alm), Addie MS, dan Kampung Tarung Waikabubak.



Soedjatmoko (alm), filsuf

“Saya ingin diingat sebagai pemikir yang mandiri.” Setidaknya itulah kenangan yang masih diingat oleh anggota keluarga seorang pembelajar, pencari, dan pemikir yang mandiri, Soedjatmoko (alm). Baginya, hidup itu harus merupakan sebuah perjalanan mencari ilmu dan pengalaman yang tiada henti. “Belajar harus di mana saja dan dengan siapa saja” adalah moto hidup yang selalu ditekankan oleh Soedjatmoko (alm) kepada kedua anaknya, Kamala Chandrakirana dan Isna Marifa Sjadjali.

Sosok Soedjatmoko (alm) juga adalah sosok yang sangat haus akan ilmu dan selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin berdiskusi dan berbagi ilmu dengannya. Ia selalu berpendapat bahwa siapa pun, baik generasi sebayanya atau anak-anak muda yang berdiskusi dengannya adalah orang-orang yang juga sedang dalam masa pencarian. Untuk itu, ia selalu meladeni pertanyaan-pertanyaan dan diskusi berjam-jam lamanya dengan lawan bicaranya. Menurutnya, hal itu adalah pertukaran gagasan dan pengalaman.

Meskipun sudah tiada, namun sosok seorang Soedjatmoko (alm) masih dapat dikenang melalui karya-karya buku yang telah ia ciptakan.



Addie MS, musisi.

Siapa yang tidak mengenal sosok Addie MS? Sosok pria berkacamata dengan nama asli Addie Muljadi Surimaatmaja ini sudah sangat mendunia berkat aransemen-aransemen lagu nasional yang sudah ia ciptakan.

Penolakan keras dari sang ayah, Bandi Sumaatmadja yang notabene adalah seorang pengusaha justru membuat Addie MS semakin bersemangat menggeluti dunia musik. Bermula dari mempelajari piano klasik bersama Mrs Rotti, bakat musiknya kemudian semakin terasah secara otodidak. Hal itu didasari dari jiwa musik yang kuat di dalam diri sang maestro. Berbagai kursus dan lokakarya singkat pernah dijalaninya, salah satunya dengan mengikuti lokakarya dengan bimbingan dari Jorge Mester, konduktor Pasadena Syphony Orchestra dan Raymod Harvey, serta konduktor Fresno Philharmonic Orchestra.

Karir Addie MS kian melesat. Bersama Oddie Agam dan Indra Usmasjah Bakrie, ia mendirikan Twilite Orchestra. Bukan hanya mengisi beberapa *soundtrack* film, namun Addie MS dan Twilite Orchestra turut melaksanakan misi edukasi bertajuk “Sampoerna Untuk Indonesia”, kegiatan konser tahunan untuk mahasiswa di Istora Senayan dan juga mendirikan Twilite Youth Orchestra, atau orkes remaja yang tampil di sekolah-sekolah ataupun konser umum.

Berkat tangan dingin seorang Addie MS, lagu-lagu nasional Indonesia kini di aransemen ulang menjadi lebih ‘kekinian’. Beragam penghargaan sudah diraih oleh Addie MS, baik nasional maupun internasional. Bukan saja melambungkan namanya, namun keberhasilan Addie MS juga turut mengharumkan nama Indonesia.



Komunitas Kampung Tarung Waikabubak



Oase budaya yang sangat menarik dapat ditemui di Waikabubak, ibukota Kabupaten Sumba Barat, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Bagaimana tidak, di atas sebuah bukit dengan ketinggian 100 meter, terdapat sebuah kampung adat yang masih melestarikan adat istiadatnya. Itulah Kampung Tarung Waikabubak.

Rato Lado Regi Tera, seorang pemimpin spiritual komunitas Kampung Tarung menjelaskan bahwa di kampung tersebut masih sangat melestarikan budaya dan tradisi leluhur. "Di sini masih terdapat uma atau rumah adat Sumba yang berbentuk vernakular pencakar langit. Terdapat uma tempat tinggal, uma ndewa atau rumah keramat untuk ritual kepercayaan Merapu, dan uma bokolulu atau tempat musyawarah adat," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa atap uma yang ada di Kampung Tarung seluruhnya masih menggunakan alang-alang. Masyarakat setempat percaya bahwa rumah sudah selayaknya manusia, di mana alang-alang adalah rambut dengan tiang-tiang penyangga diibaratkan sebagai kerangka tubuh dan syaraf-syarafnya. Penduduk setempat juga masih menggunakan tungku api sebagai alat untuk memasak. Hal ini dikarenakan asap yang berasal dari tungku api dapat mengawetkan bangunan rumah.

Sekali dalam setahun, masyarakat Kampung Tarung selalu melaksanakan sebuah ritual adat Wula Phodu atau bulan suci yang dilaksanakan pada Oktober atau November. Ritual berusia ratusan tahun tersebut bertujuan untuk menyucikan kembali diri masyarakat Kampung Tarung dan juga untuk melindungi budaya di Kampung Tarung.

"Semua masyarakat adat di Indonesia adalah pelestari, penjaga, dan pelaku budaya," itulah pesan yang disampaikan oleh Rato Ladi Regi Tera. Menurutnya, kebudayaan adalah hal terpenting bagi Indonesia dengan komunitas dan masyarakat sebagai penjaganya.

"Komunitas adalah penjaga, pelestari, dan pelaku budaya. Tanpa adanya komunitas, tidak ada yang akan menjaga, melestarikan, dan bahkan menjadi pelaku budaya itu sendiri," tukasnya. ■

BELAJAR BERSAMA MAESTRO

Pergaulan mempengaruhi perilaku dan karakter. Karenanya anak-anak perlu mendapatkan dan memanfaatkan kesempatan bergaul yang baik. Bergaul dengan maestro bisa menjadi kesempatan emas bagi seseorang. Inspirasi kepada anak-anak bisa menjadikannya maestro di masa yang akan datang.

Minggu pagi, 23 Juli 2017, sekitar pukul 06:00 WIB di kawasan Semanggi, Jakarta. Pagi itu, kawasan jalan Sudirman – Thamrin dipenuhi puluhan ribu orang yang beraktivitas sepanjang jalan. Tidak ada kendaraan melintas, karena diberlakukan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sejak pukul 6:00 pagi hingga pukul 11:00 siang.

Tampak sekumpulan remaja yang semuanya berkalung kamera di lehernya. Di tengah-tengah mereka ada pria paruh baya, yang juga berkalung kamera. Fendi Siregar, namanya, seorang fotografer senior yang juga diketahui sebagai pendiri Asosiasi Fotografer Indonesia. Pagi itu Fendi mengajak pula seorang rekannya yang berprofesi sebagai seorang dokter, namun pagi itu hadir demi hobi fotografinya. Pagi itu Fendi dan rekannya sedang menjadi mentor bagi adik-adik peserta kegiatan Belajar Bersama Maestro 2017.

Sekitar 20 remaja usia SMA dari berbagai daerah di Indonesia itu sedang mengikuti kegiatan Belajar Bersama Maestro fotografi, Fendi Siregar. “Mereka tinggal bersama saya, di rumah saya dua minggu ini. Saya seperti punya banyak anak,” kata Fendi. Tinggal di rumah maestro foto, menyimpan banyak cerita bagi mereka. “Tiap pagi, harus antrre kalau mau mandi. Tapi seru, menyenangkan,” celetuk salah satunya. Selanjutnya diceritakan bahwa selama dua minggu mereka telah belajar banyak tentang fotografi dari sang maestro. Ya, mereka belajar langsung kepada maestro.

Hari itu mereka belajar memotret model dengan menggunakan kehidupan urban sebagai latar. Karya mereka pun didokumentasikan dengan baik, setiap mereka akan membuat portofolio berisi berbagai karya yang dihasilkan selama belajar bersama.



Fotografi tidak tergantung alat yang digunakan, melainkan siapa orang di belakang kamera. Tampak seorang peserta yang ingin tahu jenis kamera yang digunakan mentornya saat itu.



Maestro Fotografi, Fendi Siregar.

Lain halnya cerita para peserta BBM, yang belajar bersama maestro seni suara Titiek Puspa. Meski mereka tak tinggal serumah dengan eyang Titiek Puspa, interaksi yang terjadi tak kalah berkualitas. Eyang Titiek, selain mengisahkan perjalanan karirnya juga menanamkan kecintaan tanah air kepada mereka. Bimbingan untuk mengasah bakat seni diberikan oleh Eyang Titiek dibantu beberapa asistennya. Tantangan pun diberikan kepada adik-adik remaja ini. Hasilnya, dalam dua minggu, di antara mereka sudah ada yang berhasil mencipta lagu, puisi.

Tidak hanya seni dan budaya yang akan diajarkan kepada para peserta, namun juga nilai-nilai kebangsaan dan cinta terhadap sesama. Setidaknya itu yang diajarkan oleh sang legenda, Titiek Puspa. Ia mengatakan bahwa cara untuk membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik adalah melalui penekanan rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta terhadap sesama. Sehingga dengan itu, rasa kebencian

dan perbuatan tidak baik akan hilang dari diri para generasi muda bangsa. Mengakhiri masa belajar bersama maestro, digelarlah mini konser di salah sebuah ruangan Puspa Katering, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

Kepiawaian mendalang Ki Manteb Sudarsono, maestro pewayangan Indonesia, tentu tak perlu diragukan. Belum lama ini, tepatnya 28 Oktober 2017, digelar pertunjukan wayang kulit di gedung Ki Hadjar Dewantara, kompleks Kemendikbud. Ki Manteb malam itu tampil membawakan kisah berjudul Pandawa Makarya. Dalam bagian pertunjukan wayang itu, Ki Manteb menyinggung keterlibatannya dalam program Belajar Bersama Maestro bulan Juli yang lalu. Ini diceritakan dalam babak goro-goro yang menampilkan canda gurau punakawan Gareng, Petruk dan Bagong. Tokoh wayang Gareng mengisahkan kesediaannya menampung 20 anak dari berbagai daerah untuk belajar bersamanya.



Maestro Titiek Puspa bersama peserta Belajar Bersama Maestro setelah penampilan aksi musikal mereka.

Maestro Ki Manteb menceritakan kisah hidupnya agar menjadi pelajaran bagi peserta BBM. Di antara mereka ada yang berasal dari daerah lain yang tidak berbahasa Jawa, menanyakan apakah mungkin dia belajar mendalang. Ki Manteb pun menjawab, bisa. Ki Manteb pun mencontohkan ada salah seorang sinden yang berasal dari negara Jepang, belajar berkesenian dan hingga saat ini sudah 18 tahun

bergabung bersamanya

Peserta terpilih yang berkesempatan belajar bersama maestro tahun ini sebanyak 300 remaja dari berbagai daerah, dengan berbagai bidang seni yang mereka minati. Sementara jumlah maestro yang terlibat sebanyak 15 maestro dengan masing-masing 20 peserta yang belajar dan tinggal bersama selama 14 hari.



BBM Sebagai Bentuk Pendidikan Karakter

Gareng: "Aku kelingan, dek emben antarane 3 utawa 4 sasi kepungkur, didhawuhi karo panjenengane Bapak Menteri, ditipti para siswa neng acara BBM"

Bagong: "Opo kuwi BBM?"

Gareng: "Belajar Bersama Maestro"

Bagong: "Kowe ya kebageyan?"

Gareng: "Ho-oh, kebageyan cah rong puluh. Wah jan! (BBM kuwi komplit), ono sing,... pedalangan yo eneng, karawitan yo eneng, puisi enek, sing cah teather yo enek, penulis yo eneng. Wah, komplit."...

.....

Nek ono sambung rapete karo kesenian, Petruk ki senjata wis tuwek, aku siap mbantu."

Belajar Bersama Maestro juga bagian dari membentuk karakter. Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan, "Kegiatan ini merupakan upaya strategis untuk penguatan jati diri dan pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran seni dan budaya di luar pelajaran akademis di sekolah. Dengan ini, karakter anak bangsa menjadi lebih kuat dan hebat," lanjutnya.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, para maestro yang terlibat dalam kegiatan BBM 2017 berasal dari ranah kesenian yang lebih beragam, salah satunya adalah seni media. Adalah Fendi Siregar, fotografer kawakan Indonesia, serta Krisna Murti, seorang seniman media baru kebanggaan bangsa. Seniman lainnya yang terlibat dalam program BBM 2017 adalah sang legenda Titiok Puspa; pemain Sasando asal NTT, David Caro Habel Edon; maestro Tarling, Djana Partanain dari Cirebon; dan seniman Dedek Wahyudi. Keempatnya mengajarkan dan membagikan pengalaman mereka di bidang seni musik. Di lain pihak ada juga seniman-seniman tari yang terlibat, sebut saja Jose Rizal Firdaus asal Medan, Sumatera Utara; penari senior Retno Maruti asal Jakarta, dan Zakarya, maestro tari Nusa Tenggara Barat.

Seniman Iman Soleh yang acap kali mengisi monolog puisi dan sajak di berbagai kegiatan turut andil. Ada juga Asia Ramli, master teater asal Makassar dan juga pendiri Teater Kita Makassar. Dan yang tidak perlu diragukan lagi keahliannya, Ki Manteb Soedarsono, sang dalang kebanggaan Indonesia. Selain nama-nama di atas, seniman Sunaryo, sang pemilik Selasar Sunaryo di Bandung, Jawa Barat; Timbul Raharjo, seorang seniman andalan Yogyakarta;

dan Hanafi asal Jakarta juga ikut andil untuk mengajarkan seni rupa selama 14 hari.

Para peserta kegiatan Belajar Bersama Maestro 2017 adalah para pelajar sekolah menengah atas sederajat, kelas X atau XI. Rentang usia mereka merupakan rentang usia rawan, di mana pencarian jati diri dan masa depan sedang berlangsung. Banyak hal, baik positif maupun negatif masuk ke dalam pola pikir remaja. Oleh karena itu, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) diwujudkan salah satunya melalui seni dan budaya seperti ini harus terus digalakkan. Pelajar yang mengikuti program BBM haruslah para siswa/siswi yang memiliki bakat atau ketertarikan di bidang seni dan budaya. Harapannya, setelah selesai mengikuti program ini, peserta dapat melihat masa depan mereka lebih cerah lagi dan membantu mereka untuk menentukan arah di jenjang pendidikan selanjutnya.

Setelah 14 hari belajar, bertatap muka langsung dengan sang maestro, bertemu, dan bertukar cerita dengan teman sebaya sesama peserta yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia, para peserta BBM 2017 kembali ke kediaman masing-masing, bertemu dengan keluarga dan lingkungan asalnya. Namun mereka kembali bukan sebagai manusia yang sama seperti ketika mereka baru bertemu. Di dalam diri mereka sudah tertanam jiwa cinta tanah air dan rasa bangga akan segala seni budaya dan kearifan lokal Indonesia. Kini mereka siap untuk ikut melestarikan budaya bangsa, dari hal yang paling sederhana yaitu bercerita. Mereka berpisah, namun tertanam kesadaran akan keberagaman dan semangat menjaga persatuan. ■



Mendekatkan seni pada siswa dengan gerakan seniman masuk sekolah

GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH UNTUK PENUMBUHAN BUDI PEKERTI

Bagaimana jadinya jika sekolah kekurangan tenaga pengajar kesenian dan budaya? Setidaknya kekhawatiran tersebut dapat dicegah melalui program Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Sekolah sebagai sebuah institusi formal telah mampu menjalankan fungsi akademisnya dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotrik secara bersamaan. Namun di luar itu, aspek sosial dan emosional juga harus turut dikembangkan melalui beragam kecerdasan, minat, dan bakat.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, Direktorat Jenderal

Kebudayaan, Kemendikbud RI menyelenggarakan program Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Gerakan ini merupakan suatu program yang melibatkan para pelaku seni Indonesia untuk mengabdikan diri, mengajar langsung para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas/ sederajat.

Seniman-seniman terbaik bangsa ditempatkan di berbagai sekolah di segala penjuru Indonesia. Mereka mengajarkan bermacam

jenis seni sesuai bidang yang digeluti, seperti seni pertunjukan (seni musik, teater, tari), seni rupa, seni media baru, hingga sastra. Keseluruhan materi tersebut diajarkan di waktu ekstrakurikuler, masih di dalam lingkup belajar-mengajar di sekolah.

Antusiasme siswa penerima program ini sangat terasa ketika para seniman datang perdana ke sekolah mereka. Ada yang langsung mendaftarkan diri pada ekstrakurikuler tersebut, ada juga yang malu-malu untuk

bertanya. Berbeda halnya dengan para seniman yang sudah tidak sabar untuk segera membagikan ide dan kemampuannya kepada pelajar.

Kegiatan ekstrakurikuler kesenian oleh para seniman ini berlangsung selama 4 bulan dengan total pertemuan sebanyak 27 kali. Masing-masing pertemuan berlangsung selama 120 menit atau 2 jam. Diujung pertemuan, dihadirkan sebuah pementasan hasil belajar para siswa. Semua unjuk kebolehan hasil menggali ilmu kesenian yang diberikan seluas-luasnya oleh para seniman. Tidak ada yang tidak bangga. Murid, guru, seniman, dan sekolah merasakan hasil positif dari program Gerakan Seniman Masuk Sekolah ini.

“Gerakan ini bagus dan positif. Sebab, seniman bisa lebih mengenalkan kepada anak sekolah bagaimana membuat karya yang bagus dan baik, gerakan ini bagus

dan positif. Sebab, seniman bisa lebih mengenalkan kepada anak sekolah bagaimana membuat karya yang bagus dan baik,” kata Agit Yogi Subandi saat diwawancarai di Sekretariat Komunitas Berkat Yakin (Kober), Gunung Terang, Bandar Lampung, 31/10/2017.

Agit salah satu seniman Lampung yang mendapat mandat mengajar di Sekolah Global Madani, Bandar Lampung. Dia juga mengatakan, para seniman sebaiknya dilibatkan untuk melatih dan memberikan pemahaman lebih kepada para pelajar dalam bidang seni. Setiap satu sekolah memiliki satu seniman dan satu asisten yang mengajar kesenian sesuai bidangnya masing-masing, seperti seni tari, teater, sastra, maupun visual.

Menurut penulis buku puisi “Sebait Pantun Bujang” itu, Gerakan Seniman Masuk Sekolah masih diberikan di luar jam pelajaran (ekstrakurikuler).

Namun demikian, para pelajar terlihat antusias dan mau belajar.

“Memang masih banyak kekurangan, di antaranya karena program ini di luar jam pelajaran, sifatnya ekstrakurikuler. Tapi, sejauh ini, belum ada persoalan yang berarti. Sebab, Gerakan Seniman Masuk Sekolah lebih kepada peningkatan kapasitas pelajar dalam bidang seni,” ujarnya.

Agit menambahkan, nantinya, program Gerakan Seniman Masuk Sekolah memiliki goal tersendiri. Namun, bergantung pada kebijakan masing-masing sekolah. Sebab, pelajar ditempa dua kali dalam satu minggu selama sekitar empat bulan. “Beruntung kalau sekolahnya mendukung penuh. Misal, teater wajib ada pementasan. Kalau bidang sastra diharapkan bisa membuat buku kumpulan puisi, dan sebagainya,” kata dia. ■





Haji Umar, dkk sang pembuat perahu Padewakang turut mengawal perahu untuk dipamerkan pada pameran "Kingdom of the Sea Archipel"

EUROPALIA ARTS FESTIVAL INDONESIA MEMBAWA WAJAH INDONESIA KE EROPA

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Wajah Indonesia tentu tak cukup digambarkan dengan Bali, Jawa atau Sumatera saja. Menampilkan wajah Indonesia yang utuh menjadi bagian penting untuk eksistensi Indonesia di mata dunia.

Negara kepulauan dengan 17.000 pulau dan 81.000 kilometer panjang garis pantai, itulah Indonesia. Sejarah dan peradaban bangsa kita tak bisa dipisahkan dari budaya maritim. Di pameran "Kingdoms of the Sea Archipel", menjadi kegiatan budaya yang penting untuk menunjukkan identitas bangsa Indonesia.

Pameran tersebut adalah bagian dari rangkaian kegiatan Festival Seni Internasional Europalia yang merupakan kegiatan terbesar, termegah, dan bergengsi di Eropa yang diadakan setiap dua tahun sekali. Sebuah jenis perahu yang tercatat dalam sejarah maritim Indonesia, disiapkan untuk disajikan dalam pameran tersebut. Perahu Padewakang namanya, berasal dari daerah Mandar, Sulawesi Selatan. Perlu waktu sekitar 2 bulan untuk membangun perahu berukuran panjang 12 meter, lebar 4 meter dan tinggi 7 meter ini.

Perahu jenis ini mungkin kurang kita kenal,

kalah tenar dibanding perahu Pinisi. Pinisi digunakan dalam kurun waktu kurang dari 150 tahun terakhir, sedangkan Padewakang digunakan jauh lebih lama digunakan pada era sebelumnya. Bahkan perahu jenis ini terungkap pada relief Candi Borobudur. Ini artinya, perahu ini dikenal sejak lebih seribu tahun lalu.

Di pameran ini, perahu dibuat oleh ahlinya, Haji Umar dan rekan-rekannya di Mandar. Setelah selesai dibuat, perahu pun dibongkar untuk dikemas dan dikirim ke Belgia, kemudian dirakit kembali di sana.

Festival seni ini dikelola oleh Europalia, sebuah lembaga nirlaba internasional. Europalia langsung berada di bawah naungan Kepala Negara Belgia Raja Phillippe I. Europalia tahun ini adalah perhelatan ke 26, sejak Europalia pertama pada 1969.

Tahun 2017 ini, Indonesia menjadi negara pertama dari Asia Tenggara yang mendapatkan kehormatan menjadi Negara Tamu (*Guest Country*). Selama 4 bulan penuh, yakni pada 10 Oktober 2017 hingga 21 Januari 2018, karya seni budaya Indonesia baik berupa, teater, film, musik, seni rupa, sastra, tari, kuliner, dan lainnya akan dipamerkan di 50 kota di Eropa.

Indonesia yang didapuk menjadi *Guest Country* Europolia Arts Festival negara Asean pertama menampilkan perpaduan seni dan budaya serta ratusan benda-benda bersejarah peninggalan zaman purbakala di 7 negara Eropa. Ketujuh negara tersebut ialah Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Belgia, Austria dan Polandia.

Selama hampir empat bulan, perhelatan akbar ini akan melibatkan sebanyak 486 pekerja seni dalam pelaksanaan 228 karya dan program kegiatan, 69 pertunjukan tari dan teater, 71 musik, 36 sastra, 38 film dan 14 pameran.

Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menyatakan pertanggungjawaban penyelenggaraan Europolia Arts Festival Indonesia yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI akan berjalan dalam 3 aras kesuksesan. Kesuksesan tersebut tentunya dilihat dari 3 aspek, yakni sukses secara penyelenggaraan, promosi, dan perolehan (*gain*).

"Kami ingin menyatakan kehadiran Indonesia di daratan Eropa, khususnya melalui bahasa kesenian. Ini adalah festival kesenian dengan misi yang multidimensi," ujarnya. Oleh karena itu, lanjutnya, dengan keterlibatan Indonesia di forum festival internasional diharapkan mampu memperkuat kembali kerjasama antara Indonesia dan berbagai pihak. "Kita ingin menarik manfaat sebesar mungkin," tukasnya.

Salah satu rangkaian kegiatan sebagai Negara Tamu atau *Guest Country* di Festival



Seni Europolia, Indonesia menggelar Pameran *Kingdoms of the Sea Archipel* di Liege, Belgia. Pameran dengan tema budaya maritim ini diselenggarakan di Museum La Boverie di Liege Belgia dari tanggal 25 Oktober hingga 21 Januari 2018. Sebanyak 248 artefak dari koleksi Museum Nasional Indonesia dan beberapa museum provinsi, antara lain dari museum di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jambi dan Bali, telah dibawa langsung untuk ditampilkan pada pameran ini.

Restu Gunawan, Direktur Kesenian, mengatakan betapa pentingnya Europolia. Europolia mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Indonesia yang di dalamnya terdapat beragam budaya, suku bangsa bisa hidup berdampingan secara damai dengan terus berkobarnya semangat persatuan. ■





PEDULI HISTORI YANG TAK SETENGAH HATI

Soekarno pernah berkata “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah”. Sejarah memang sebaiknya tak sekadar dipelajari, namun perlu dipahami, dirangkul bahkan dijadikan landasan hidup acap kali manusia berpijak.

Mencetak generasi muda yang cerdas dan berprestasi dapat dimulai dengan mengenal kembali sejarah. Karena itulah Direktorat Sejarah menyelenggarakan Lawatan Sejarah Nasional (Lasenas) 2017. Lawatan yang berarti berkunjung, dimaknai seluruh peserta yang terdiri dari siswa-siswi SMA/SMK terpilih untuk mengunjungi sejumlah titik yang menjadi pusat sejarah suatu kota. Setiap tahun Lasenas digelar di kota-kota berbeda, tahun 2017 Bengkulu ditunjuk sebagai tuan rumah.

Peserta diajak menelusuri bekas jejak sejarah Presiden Republik Indonesia Pertama, Soekarno yang pernah diasingkan ke Bengkulu namun melahirkan perjuangan besar bagi Indonesia. Peserta juga menelusuri jejak tokoh-tokoh perjuangan lain yang berjuang untuk Bengkulu dan melepaskannya dari jeratan para penjajah Belanda.

“Hanya dengan mengenal sejarah bangsa, mengetahui akar sejarah, barulah kita bisa mengimplementasikan empat pilar baik dalam kehidupan berbangsaan dan bernegara,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani pada pembukaan resmi Lasenas 2017.

Wajah ceria dan penuh rasa keingintahuan

tinggi ditunjukkan oleh peserta Lasenas. Perwakilan pelajar dari seluruh Indonesia ini diajak menyelami sejarah Bengkulu. Tempat bersejarah yang disinggahi selama tiga hari tersebut ialah Fort Marlborough, Rumah Ibu Fatmawati, Rumah Pengasingan Bung Karno, Museum Negeri Provinsi Bengkulu, Makam Sentot Alibaysa, hingga melawat ke Masjid Jamik Bengkulu, dan Pertambangan Emas di Kabupaten Lebong.

Tema sentral dari Lasenas 2017 ini adalah “Merawat Keberagaman Melalui Memori Kolektif Untuk Memperkokoh Karakter Bangsa”. Ini merupakan keempat belas kalinya Lasenas dihelat sejak pertama kali di tahun 2003. Melalui kegiatan ini pemerintah terus berupaya membantu para generasi muda merawat pengetahuan terhadap sejarah agar kian terpupuk dan terhindar dari gerusan zaman.

Secara tidak langsung Lasenas mengajak siswa-siswi belajar dengan metode yang jauh lebih efektif dan mandiri dibandingkan hanya mengandalkan literatur sejarah. Dalam Lasenas ini para peserta dapat langsung mengunjungi tempat bersejarah dan menganalisis sendiri peristiwa sejarah melalui peninggalan-peninggalan yang ada.

Acara Lasenas pun memberikan kesan yang mendalam bagi para peserta. Tak terkecuali dengan Adinda Gusticahyani, siswi SMAN 1 Seluma, Bengkulu. Berkunjung ke tempat bersejarah di tanah kelahiran sendiri memang bukan pertama kali baginya. Kendati demikian ia pun lebih tahu bahwa Bengkulu menjadi bagian dari merdekanya Indonesia.

“Ini sesuatu yang baru buat saya, jadi lebih mengeksplor lagi. Kalau selama ini hanya melihat sekilas tanpa tahu ceritanya. Tapi di sini semua dijelaskan. Saya jadi lebih tahu lagi sejarah apa saja yang ada di Bengkulu ini,” ujar peserta asal Bengkulu ini.

Perspektif lainnya perihal budaya dan sejarah Bengkulu ditangkap secara berbeda oleh peserta asal Yogyakarta, Muhammad Galang. Siswa kelas 11 IPS dari SMAN 5 Yogyakarta ini berharap pemerintah setempat dapat memanfaatkan potensi Fort Marlborough sebagai destinasi sejarah untuk wisatawan mancanegara secara lebih maksimal.

“Saya sangat tertarik waktu berada di Fort Marlborough. Saya lihat di sini prospeknya besar untuk dikembangkan sebagai wisata yang lebih bagus dari yang sekarang, hanya mungkin pengelolanya perlu ditingkatkan lagi. Selain punya nilai sejarah,

lokasinya yang berdekatan dengan pantai juga menjadikan bentengnya punya pemandangan yang indah. Jadi di sini kita bisa maknai sebagai sarana rekreasi, yang bisa dikembangkan lagi menjadi pendapatan daerah masyarakat setempat,” ucapnya, lugas.

Seharusnya, peduli histori memerlukan upaya yang tak setengah hati. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berkomitmen untuk memperkuat pendidikan karakter melalui gerakan pengayaan di bidang kebudayaan, termasuk belajar kembali sejarah sebagai identitas bangsa. ■





Tarian Sambutan pada Pembukaan Pekan Budaya Indonesia

DARI PALU UNTUK NUSANTARA

Mengapresiasi kebudayaan daerah perlu dilakukan secara konsisten dan serius. Salah satu bentuk mengapresiasi budaya daerah adalah melalui Pekan Budaya Indonesia 2017. Pekan Budaya Indonesia diharapkan mampu mengangkat keunikan dan nilai-nilai budaya khas daerah. Untuk tahun 2017 dipilih “Dari Palu untuk Nusantara”.

Pekan Budaya Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi pelestarian budaya dengan berfokus untuk menyajikan, menghadirkan dan memprakarsai pelaku seni dalam rangka pelestarian budaya. Terlaksanakannya Pekan Budaya Indonesia menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kota Palu dan Kemendikbud untuk memperkuat dan memajukan kebudayaan. Kegiatan ini melibatkan pelaku seni dan budaya serta komunitas lintas daerah.

Palu sebuah kota yang terletak di jantung Provinsi Sulawesi Tengah ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Budaya Indonesia 2017. Tidak hanya keelokan panorama daerah dengan sebutan Mutiara Khatulistiwa ini saja yang begitu memikat, namun juga kebudayaan yang dihadirkan, baik kesenian, tari-tarian, maupun kuliner yang mampu mengenalkan pesona keindahan Palu di mata dunia.

“Tahun depan mungkin levelnya sudah tidak lagi di Palu, hanya saja palu sebagai jantungnya atau mutiaranya. Dan acara ini kita anggap sebagai latihan. Tahun 2019 kita maju bukan lagi ‘Dari Palu untuk Indonesia yang Berbudaya dan

Beradat’ tetapi ‘Palu Untuk Dunia’. Nanti akan dibuat festival internasional dengan melibatkan semua pihak, tidak hanya satu-dua. Saya kira kita sudah punya Undang-undang Pemajuan Kebudayaan yang mendukung untuk itu,” jelas Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid saat membuka acara.

Upaya untuk mendekatkan kembali daya tarik budaya khas Palu ke masyarakat luas diimplementasikan melalui kegiatan berbasis kebudayaan, antara lain pameran jalur rempah, pameran permainan tradisional, pentas seni, seminar, lomba mural, , maestro seni budaya, lokakarya membuat batik, diskusi kelompok tertumpun tentang Kawasan Megalitik Lore Lindu, pentas seni musik komtemporer dan kolosal, Kampung Kaili hingga interaktif 1.000 anklung. Kegiatan ini tentunya memungkinkan masyarakat Palu untuk dapat melakukan praktik dan merasakan langsung bagaimana cara menjaga dan melestarikan budaya itu sendiri.

Terdapat pula kegiatan yang mengangkat kembali kearifan budaya yang telah tenggelam selama ratusan tahun lamanya, antara lain ritual adat baliya yang berhasil memikat pengunjung di area Kampung Kaili, yang dikemas dalam atraksi seni pertunjukan bernilai arif dan luhur. ■



WARISAN INDUSTRI UNTUK PERADABAN

Wais Zulqorni masih mencoba mengatur ritme nafasnya, keringat nampak belum mengering diwajahnya setelah turun dari panggung. Dihadapan para tamu undangan dan pengunjung, ia baru saja menarikan tarian pertama dalam hidupnya. Perlahan tapi penuh antusias, pemuda 17 tahun itu mencoba mengungkapkan perasaannya selama mengikuti acara.

“Saya senang dengan konsep acara World Heritage Camp Indonesia (WHCI) menelusuri sejarah industri gula dan kereta api. Senang sekali dapat mengunjungi tempat yang selama ini hanya saya baca di buku,” jelas siswa kelas XI Pangkep Sulawesi Selatan itu.

Wais adalah salah satu peserta acara WHCI 2017, sebuah gelaran Direktorat Jenderal Kebudayaan. Selama hampir satu minggu para siswa/siswi terpilih dari seluruh Indonesia melakukan kunjungan di situs-situs peninggalan sejarah. Setelah sebelumnya mengunjungi

Yogyakarta dan Solo, kunjungan terakhir dilakukan di Semarang.

WHCI merupakan program pendidikan mengenai warisan dunia, khususnya warisan budaya Indonesia kepada generasi muda, agar mereka mengenal, memahami dan terlibat aktif dalam pelestarian dan mengampanyekan nilai-nilai penting warisan budaya Indonesia kepada masyarakat. Melalui program ini generasi muda memiliki kesempatan untuk menyuarakan perhatiannya dan terlibat dalam perlindungan warisan budaya dan alam.

Di WHCI 2017 yang mengangkat tema “Warisan Industri membentuk Peradaban” ini, para peserta diajak menelusuri sejarah perdagangan gula yang menjadi cikal bakal dibangunnya industri kereta api di Indonesia. Mereka menelusuri “Jalur Gula” mulai dari pabrik gula (PG) bersejarah Tasikmadu, Solo. PG Tasikmadu adalah pabrik gula swasta pertama di Indonesia yang

dibangun oleh Mangkunegaran IV untuk menyejahterakan dan melindungi rakyat kala itu.

“Jalur Gula” membawa para peserta ke muaranya, yaitu pusat industri dan pemerintahan Belanda saat itu, kini menjadi Kota Lama Semarang. Dimana gedung Nederlands-Indische Spoorweg Maaatschappij (Perusahaan Kereta Api Hindia Belanda) yang kini dikenal sebagai Lawang Sewu menjadi ujung dari seluruh rangkaian kegiatan WHCI 2017. Selain menelusuri “Jalur Gula” peserta juga berkesempatan mengunjungi situs Warisan Budaya Dunia seperti Candi Prambanan dan Candi Sewu.

Dalam Kegiatan WHCI 2017 ini, telah dihasilkan sebuah rekomendasi bersama agar kawasan Kota Lama Semarang menjadi Warisan Budaya Dunia UNESCO, serta usulan pada Pemerintah Daerah Kota Semarang terkait pengelolaan dan pelestarian kawasan tersebut. ■

PAMERAN BESAR SENI RUPA KE-5 DI AMBON

"Pendidikan seni budaya dan keterampilan memiliki peranan yang sangat besar dalam pembentukan pribadi untuk mencapai multi-kecerdasan"



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menggelar Pameran Besar Seni Rupa (PBSR) yang mengusung tema "Huele". Pameran Besar Seni Rupa (PBSR) pada tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-5. PBSR pertama kali diselenggarakan di Lampung pada tahun 2013, kemudian berlanjut di Papua pada tahun 2014, di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 dan pada 2016 diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara.

Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam sambutannya mengatakan, Huele memiliki makna penting untuk menyuarakan kabar baik kepada masyarakat luas. "Huele merupakan ekspresi kabar baik yang ingin disampaikan kepada semua orang di manapun berada. Bahwa di sini, di Propinsi Maluku telah berkumpul para seniman hebat dari seantero tanah air beta, tanah air Indonesia," ungkap Assagaff yang membuka pameran tersebut, 13 September 2017.

Tahun ini, Ditjen Kebudayaan bersinergi dengan kegiatan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia dan menghadirkan sebanyak 111 perupa yang terdiri dari 66 perupa wakil dari 33 provinsi di Indonesia hasil seleksi open call, 14 perupa undangan, 19 perupa Maluku, dan 12 perupa mural dan instalasi.

Kelompok kesenian, sanggar, komunitas, dan paguyuban-paguyuban dari berbagai daerah di Kota Ambon pun turut memeriahkan acara ini dan aktif terlibat dalam pawai budaya, pameran dan pagelaran seni di Taman Budaya Maluku.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Mohammad Saleh Thio mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya memperkuat proses edukasi di Indonesia. "Melalui prevensi budaya, kita dapat menjawab upaya pendidikan dan kebudayaan dalam pembentukan karakter dan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas karya seni, terutama seni rupa Indonesia, serta menjawab

pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang seni,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Assagaff berharap, adanya integrasi antara seni dengan pendidikan. “Kita harap seni yang kaya ini bisa diintegrasikan ke dalam dunia pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu instrumen transformasi peradaban yang sangat efektif,” ujarnya.

Pendidikan seni budaya dan keterampilan memiliki peranan yang sangat besar dalam pembentukan pribadi untuk mencapai multi-kecerdasan seperti kecerdasan intrapersonal, interpersonal, musikal, linguistik, naturalis, kreativitas, emosional, spriritual dan moral.

Pembukaan PBSR V juga dimeriahkan dengan penampilan putra-putri daerah yang menggunakan pakaian tradisional khas wilayahnya masing-masing, sajian musik orkestra dari Molucca Bamboowind Orchestra (MBO), dan penampilan penyanyi asal Kota Ambon, Glen Fredly. Selain itu, berlokasi di Pantai Namalatu juga diselenggarakan Seniman Workshop Sketch, Dialog Kepala Taman Budaya Bersama Direktur Kesenian, lokakarya Melukis di Atas Kaos, dan Wisata Menggambar Potrait Museum Basoeki Abdullah. ■





Karya seni siswa, terpajang di sebuah ruang galeri yang berada di SMAN 3 Kuningan, Jawa Barat.



MERAYAKAN KEMERDEKAAN DENGAN MENGGRATISKAN MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA

Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus menjadi momen yang selalu dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia setiap tahunnya. Beragam perayaan kemerdekaan dilakukan di seluruh penjuru Indonesia. Mulai dari upacara bendera, lomba tradisional, pawai, karnaval, hingga mencoba merayakan kemerdekaan melalui sejarah dan budaya

bangsa.

Hal ini bisa kita lakukan dengan mengunjungi museum atau cagar budaya sebagai bentuk nyata menghargai sejarah dan memetik pelajaran dari kekayaan sejarah dan budaya kita. Kemendikbud pun memberikan dukungan dalam bentuk menggratiskan tiket masuk museum dan cagar budaya yang berada di bawah Kemendikbud.

“Semua museum dan cagar

budaya yang berada di bawah Kemendikbud akan digratiskan untuk dikunjungi wisatawan di seluruh Indonesia,” papar Menteri Muhadjir saat konferensi pers tentang Pameran Lukisan Koleksi Istana Kepresidenan di Galeri Nasional Indonesia, pada 31 Juli 2017.

Saat ini terdapat tujuh museum yang berada di bawah pengelolaan Kemendikbud, yaitu Museum Nasional Indonesia, Museum Basoeeki



Abdullah, Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia (Balai Kirti) di Bogor. Juga, Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran terdapat Museum Manusia Purba Klaster Bukuran, Ngebung, dan Museum Lapangan Manyarejo.

Pameran Seni Rupa Istana Kepresidenan Republik Indonesia di Galeri Nasional Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2017, merupakan bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Melalui Kementerian Sekretariat Negara, Pameran Lukisan Koleksi Istana Kepresidenan bertajuk "Senandung Ibu Pertiwi"

ini diselenggarakan untuk kedua kalinya. Tema ini dapat dimaknai sebagai Tanah Air, yaitu tempat kita dilahirkan dan berkarya bersama-sama. Melalui pameran ini, masyarakat diharapkan dapat ikut menikmati karya para seniman kita di masa lalu yang berkualitas tinggi.

Pameran ini juga menjadi wadah untuk menunjukkan karya-karya unggulan seniman kita kepada komunitas internasional dan sebagai perwujudan komitmen Kementerian Sekretariat Negara dalam pemeliharaan karya-karya seni unggulan dari masa lalu yang menjadi koleksi di Istana-istana Kepresidenan.

Sementara itu, Kemendikbud juga turut merayakan kemerdekaan dengan meluncurkan lagu Indonesia Raya tiga stanza.

"Kami akan meluncurkan lagu Indonesia Raya tiga stanza yang sudah diproduksi (direkam) di Studio Lokananta di Solo. Semua pemusiknya adalah putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Gita Bahana Nusantara," ujar Menteri Muhadjir.

Tak hanya itu, Kemendikbud juga akan mengirimkan 170 judul buku cerita rakyat yang berasal dari cerita rakyat dari Sabang sampai Merauke. "Buku cerita itu dipilih dari beraneka ragam latar belakang budaya untuk membangun rasa kebinekaan," tutur Menteri Muhadjir. Buku-buku tersebut akan dikirimkan ke berbagai wilayah Indonesia secara gratis melalui PT Pos Indonesia. ■



Di suatu senja yang cerah, dengan berlatar belakang pemandangan Danau Toba dan matahari yang hendak kembali ke peraduan, sebuah penampilan musik berhasil menghipnotis para hadirin yang datang.

HARMONISASI MUSIK KONTEMPORER DAN TRADISIONAL DALAM SATU KOLABORASI BUDAYA

Beruntung sekali masyarakat yang tinggal di sekitaran Danau Toba, tepatnya di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba-Samosir, Sumatera Utara. Bagaimana tidak, sebuah orkestra internasional asal Spanyol, Siero Chamber Orchestra (OCAS) menyambangi kota kecil dengan 22 desa tersebut dan seketika memeriahkan kota tenang ini dengan alunan musiknya. Pada tanggal 29 Juli 2017, kelompok orkestra berjumlah puluhan orang telah sukses memukau masyarakat Laguboti yang memenuhi Amphiteater Kampus IT Del.

Project Vinculos, begitu OCAS menamai project keliling dunia mereka. Dimana, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat kesempatan langka ini, dan semakin membanggakan dengan terpilihnya Indonesia sebagai negara Asia pertama yang disambangi dan indahnnya Danau Toba sebagai tempat perdana diselenggarakannya konser.

Sebagaimana project Vinculos ini berlangsung, OCAS mempromosikan intergrasi sosial dan budaya melalui musik dengan cara memperkenalkan kebudayaan, adat-istiadat, dan pandangan hidup yang berbeda-beda di tiap negara yang dikunjungi tanpa diskriminasi sosial, agama, dan kelas sosial.

Dengan kata yang lebih sederhana, OCAS dengan Vinculos for Indonesia-nya mengajak seniman lokal Indonesia untuk berkolaborasi memadukan musik kontemporer berupa orkestra dengan musik tradisional khas Indonesia.

Kelompok musik lokal yang mendapat kehormatan itu adalah Mataniari, sebuah kelompok musik tradisi Batak Toba Sumatera Utara, dimana salah satu personilnya adalah Maestro Musik Batak Toba, Marsius "Si Raja Suling" Sitohang. Sawan Na Hujungunon, judul lagu kolaborasi Mataniari dan OCAS pada Vinculos for Indonesia. Lagu yang berkisah tentang kesedihan akibat kematian tersebut

sukses besar mengantarkan para penonton untuk larut dalam suasana haru dan ikut mendengarkan lagu berbahasa Batak tersebut.

Butuh proses panjang bagi Mataniari untuk bisa menghasilkan kolaborasi indah dengan OCAS dalam Project Vinculos for Indonesia ini. Surat – menyurat, saling mengirimkan aransemen dan partitur musik melalui surel sudah terlebih dahulu dilakukan sebelum konser digelar. Komunikasi lintas benua diantara dua kelompok musik hebat ini tak menjadi halangan untuk menciptakan sebuah kolaborasi musik yang banjir akan tepuk tangan dan pujian.

Kegiatan ini berawal dari OCAS yang ingin tampil di Indonesia. Hal ini disambut baik oleh Direktur Jenderal Kebudayaan yang berkeinginan agar pemusik lokal memiliki pengalaman berkolaborasi dengan pemusik international. Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan sigap bekerja sama dengan Pemda yang berada di Kawasan Danau Toba agar kegiatan kolaborasi musik kontemporer dengan musik tradisional dapat terselenggarakan dengan baik. Hasilnya masyarakat di Kawasan Danau Toba sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang memenuhi Amphiteater Kampus IT Del.

Musik Sebagai Alat yang Universal Konser kolaborasi Indonesia – Spanyol dalam project Vinculos for Indonesia telah berhasil membawa misi diplomasi budaya. Tidak hanya bagi Indonesia, misi budaya ini juga teramat penting bagi Spanyol. Keceriaan dan kebahagiaan juga berhasil dibawa dalam projek lintas benua ini. Terbukti, musik dapat menjadi media untuk bertukar kebudayaan dan juga alat perdamaian dunia. ■

KEKAYAAN ARKEOLOGI DI GEDUNG ARTEFAK BANTEN, TROWULAN, DAN PACITAN TAHUN 2017

Dari zaman dahulu kala, kebesaran Indonesia sudah terasa dengan kejayaan kerajaan-kerajaan besar masa lalu seperti Majapahit, Sriwijaya, Mataram dan lainnya. Kejayaan Kerajaan tersebut dapat dirasakan dengan berbagai macam peninggalan, termasuk di dalamnya artefak-artefak yang patut kita hargai dan maknai. Agar kekayaan peninggalan Bangsa Indonesia dapat dijaga dan dilestarikan maka perlu dilakukan pendataan terhadap hasil kekayaan arkeologi Indonesia. Pada tahun 2017, Pusat Arkeologi Nasional melakukan pendataan kekayaan arkeologi yang berupa barang-barang temuan yang berfokus pada penggalian di daerah Banten, Trowulan dan Pacitan. Benda-benda hasil pendataan tersebut masing-masing tersimpan di Gedung Artefak Banten di Serang, temuan di Gedung Artefak Trowulan di Mojokerto, dan temuan di Gedung Artefak Pacitan.

Sebelum pencatatan, biasa dilakukan proses ekskavasi (penggalian) benda-benda arkeolog. Sayangnya, tidak semua proses ekskavasi berjalan lancar. Terkadang prosesnya memakan waktu karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Seperti yang terjadi pada lokasi penggalian di calon terminal di Sukadiri, Kebalen, Banten Lama yang terendam air hujan di tahun 2017 ini. Lokasi mengandung banyak air sehingga tanah labil dan kotak ekskavasi mudah terisi air. Maka dari itu, penggalian harus dilakukan secara hati-hati agar artefak tidak rusak. Pada saat pematangan lahan dengan pengerukan, ditemukan tinggalan arkeologis berupa struktur bata melingkar dan susunan bata yang berorientasi tenggara – barat laut, fragmen keramik, dan gerabah. Menurut informasi masyarakat, lokasi tersebut dikenal dengan persawahan blok Kejayan, Desa Kasunyatan.

Berdasarkan kegiatan pendataan tahun 2017 terhadap kekayaan arkeologi di ketiga lokasi tersebut tercatat sebanyak 32.019 fragmen/

kepingan yang terdiri dari 23.193 temuan yang disimpan di Gedung Artefak Banten yang umumnya berupa fragmen keramik.

Selain penggalian di Banten, penggalian artefak juga dilakukan di daerah Trowulan, yang terkenal sebagai pusat peradaban Majapahit. Lokasi penggalian Trowulan terletak di pemukiman aktif saat ini membuat penggalian menjadi hal yang menantang tersendiri karena harus melakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Di Trowulan sendiri ditemukan 941 fragmen temuan yang disimpan di Gedung Artefak Trowulan yang terdiri dari batu (andesit, batu putih), fragmen gigi, fragmen keramik, fragmen logam, fragmen rahang, *stone ware*, fragmen tembikar, terakota, dan fragmen tulang. Selain usaha penggalian dan pendataan artefak, usaha untuk konservasi terus dilakukan.

Penggalian terakhir juga dilakukan di daerah Pacitan. Tim penggalian menemukan 7.885 buah temuan yang tersimpan di Gedung Artefak Pacitan. Kekayaan arkeologi tahun 2017 yang disimpan di Gedung Artefak Pacitan berupa hasil penelitian arkeologi yang ada di wilayah Pacitan dan sekitarnya. Kekayaan itu menunjukkan adanya 9 jenis alat batu yang terdiri dari jenis-jenis tatal, batu inti nodul, bilah, bilah berpunggung korteks, fragmen calon beliung, serpih, lancip, pisau berpunggung korteks, serpih, serpih besar, serpih dengan retus, serpih dipangkas, dan batu inti.

Kekayaan Indonesia yang sangat beragam dari zaman kerajaan Hindu dan Budha kuno memperkuat khazanah budaya Indonesia. Salah satu usaha pelestariannya adalah dengan melakukan penelitian dan pendataan terkait dengan kekayaan artefak yang ditemukan tim peneliti arkeologi. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam membantu pelestarian kekayaan budaya Indonesia ini agar peninggalan budaya masa lampau dapat terus menjadi sumber karakter dan kekayaan Bangsa.

Kekayaan Arkeologi yang disimpan di Gedung Artefak Banben

1	Fr. Keramik piring biru putih	1239	18	Fr. Batu dan tembikar	104	34	Mangkuk biru putih, porselin putih	2733
2	Cepuk, mangkuk biru, sendok putih biru, sendok enamel	356	19	Fr. Keramik piring seladon	614	35	Mangkuk	340
3	Fr. Keramik dasar mangkuk biru putih	180	20	Fr. Keramik piring	185	36	Mangkuk	170
4	Fr. Keramik mangkuk biru putih	501	21	Fr. Keramik mangkuk biru putih	701	37	Piring biru putih	266
5	Fr. Keramik piring	302	22	Fr. Keramik	193	38	Mangkuk dan kendi	318
6	Fr. Keramik mangkuk kecil Fujian (Cina) abad 18	737	23	Fr. Keramik piring dan mangkuk	323	39	Small cup, mangkuk	294
7	Fr. Keramik piring biru putih Fujian (Cina) abad 18	826	24	Fr. Keramik piring	740	40	Mangkuk abad 17	808
8	Fr. Keramik mangkuk	224	25	Fr. Keramik	141	41	Mangkuk	179
9	Fr. Keramik piring biru putih hissan cap	1199	26	Fr. Keramik mangkuk	411	42	Thal seladon, piring dan bobol	135
10	Mangkuk, cepuk, bull-bull	194	27	Fr. Keramik piring dan mangkuk	407	43	Guci Cina atau Asia Tenggara, bagian dasar	203
11	Fr. Keramik dasar piring	1079	28	Mangkuk, kendi, batakan, chopped box	207	44	Fr. Keramik	189
12	Fr. Keramik Fukien model mangkuk coklat	90	29	Dasar mangkok abad 17, mangkuk enamel, piring	760	45	Keeramik, kaca, tulang, kerang	375
13	Fr. Keramik	69	30	Mangkuk enamel unclassified	383	46	Piring abad 17, vas, mangkuk	845
14	Fr. Keramik mangkuk	185	31	Cepuk biru putih	1220	47	Bobol	24
15	Fr. Keramik piring biru putih	211	32	Fr. Keramik	150	48	Fr. Tempayan	111
16	Fr. Keramik lain-lain	107	33	Cepuk biru putih	103	49	Fr. keramik	1017
17	Fr. Keramik piring besar	891						
							Jumlah = 23.193	

Kekayaan Arkeologi yang disimpan di Gedung Artefak Trowulan

1	Batu	3
2	Batu andesit	3
3	Batu putih	5
4	Fragmen gigi	36
5	Fragmen keramik	350
6	Fragmen logam	4
7	Fragmen rahang	2
8	Stone ware	42
9	Tembikar halus	53
10	Tembikar kasar	180
11	Terakota	196
12	Fragmen tulang	67

Total = 941

Kekayaan Arkeologi yang disimpan di Gedung Artefak Pacitan dari hasil penelitian arkeologi di wilayah Gunung Sewu dan sekitarnya

1	batol	5091	8	pisau berpunggung korteks	32
2	batu inti nodul	96	9	serpih	760
3	bilah	77	10	serpih besar	2
4	bilah berpunggung korteks	7	11	serpih dengan rebus	2
5	fragmen calon belukang	29	12	serpih dipangkas	57
6	serpih	1686	13	batu inti	44
7	lancipan	2	Total = 7885		

RUMAH PERADABAN SEBAGAI MEDIA MEMAHAMI SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

Dalam upaya mendukung Nawacita Presiden Jokowi, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) melaksanakan program Rumah Peradaban. Rumah Peradaban merupakan bentuk media interaksi dan sarana edukasi dalam memasyarakatkan hasil penelitian arkeologi untuk memberikan pemahaman sejarah dan nilai-nilai budaya masa lampau. Program ini berkaitan dalam upaya melakukan revolusi karakter bangsa (Nawacita ke-8) dan memperteguh kebhinekaan serta memperkuat restorasi sosial Indonesia (Nawacita ke-9).

Dengan program Rumah Peradaban, diharapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan secara simultan oleh Puslit Arkenas dan Balai Arkeologi yang tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya dapat dimaknai di lingkungan akademis saja, tetapi juga dapat dimaknai oleh masyarakat umum untuk memahami nilai-nilai budaya sebagai fondasi dalam membangun

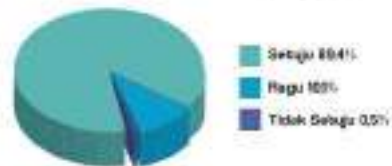
insan yang berkarakter.

Untuk mengetahui tanggapan pengunjung terhadap program Rumah Peradaban, telah dilakukan jajak pendapat terhadap dua sampel kegiatan Rumah Peradaban, yaitu di Jatiluwih (Bali) dan Karawang (Jawa Barat). Berdasarkan jajak pendapat tersebut, menunjukkan bahwa lebih dari 97% responden memberikan tanggapan positif. ■

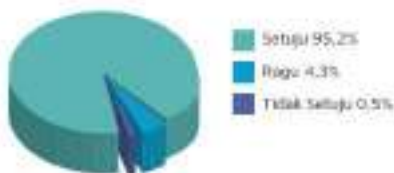




Sangat diperlukan partisipasi Pemda dalam menunjang pengembangan Rumah Peradaban sebagai destinasi arkeologi, literasi, dan buku pengayaan



Kegiatan Rumah Peradaban sangat bermanfaat bagi saya



Arkeologi menambah pengetahuan saya tentang budaya Indonesia dan pendidikan karakter bangsa



Saya suka pelajaran sejarah



Saya mengetahui ilmu arkeologi





MENDEKATKAN PENGAYAAN BAHASA MELALUI APLIKASI KBBI

Penggunaan istilah “Kids Jaman Now” saat ini tengah populer di kalangan masyarakat, Istilah yang merupakan penggabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini merujuk pada pemaknaan anak zaman sekarang. Istilah ini ramai digunakan baik dalam komunikasi tertulis di media sosial maupun komunikasi lisan. Ramainya penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa globalisasi juga telah mempengaruhi banyak aspek, salah satunya bahasa. Orang sudah dengan mudahnya menggabung berbagai bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, fenomena ini menunjukkan lebih populernya bahasa tidak baku dibandingkan bahasa baku. Terlihat dari kata “jaman” yang lebih populer dibandingkan kata “zaman” yang merupakan kata baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, sosialisasi mengenai KBBI harus perlu ditingkatkan untuk menjaga kelestarian Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil dari upaya kodifikasi bahasa dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-lima (KBBI V) merupakan edisi terbaru yang diluncurkan pada tanggal 28 Oktober 2016 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam versi cetak terbatas dan daring pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ketika diluncurkan, KBBI V memuat lebih dari 108.000 lema yang terdiri

atas lebih dari 126.000 makna. Versi luring dengan basis Android dan iOS diluncurkan kemudian pada bulan November 2016.

Salah satu keutamaan KBBI V dari edisi-edisi sebelumnya adalah penambahan lema yang berjumlah 18.000 lema baru dan format penyajian melalui daring dan luring. KBBI Daring adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna kamus mengakses informasi melalui laman kbbi.kemdikbud.go.id setiap saat selama terhubung dengan internet. Selain itu, di zaman globalisasi sekarang dimana setiap orang dengan cepat terpapar dengan bahasa atau istilah baru, KBBI Daring juga dilengkapi dengan fitur usulan yang memungkinkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan bahasa Indonesia.

Melalui aplikasi usulan tersebut, pengguna dapat mengoreksi, menambah, dan bahkan menonaktifkan masukan lema baru yang diusulkan. Dibandingkan dengan versi cetak dan luring, KBBI Daring merupakan versi yang paling mutakhir dan lebih lengkap fiturnya karena fitur usulan tidak tersedia pada versi luring dan cetak.

Selain dari usulan lewat KBBI Daring, bahan untuk pengembangan dan penambahan lema diperoleh dari hasil inventarisasi kosakata daerah sebanyak lebih kurang 25.000 lema baru per tahun yang diperoleh dari Balai/kantor bahasa di seluruh Indonesia, hasil pemadanan istilah yang dibuat oleh para pakar bidang ilmu yang juga tercatat dalam kamus bidang ilmu, serta



Barisan muda-mudi yang terpilih sebagai Duta Bahasa

hasil inventarisasi kosakata baru yang dilakukan oleh tim redaksi sendiri. Pemutakhiran data KBBI V dilaksanakan setiap enam bulan sekali pada bulan April dan Oktober untuk mempercepat masuknya kata dan istilah baru dalam bahasa Indonesia. Sejak pertama kali diluncurkan hingga bulan Oktober 2017, jumlah pencarian di KBBI Daring sudah mencapai lebih dari 7.000.000 dengan rata-rata angka pencarian sebesar 21.000 per hari. Jumlah total usulan yang masuk ke tim redaksi adalah lebih dari 15.000 usulan. Pengembangan dan penyempurnaan KBBI Daring selalu dilakukan untuk meningkatkan performa aplikasi.

Sejalan dengan perwujudan Nawacita Pemerintahan Joko Widodo dalam menguatkan kebhinekaan, penguatan peran Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa perlu dilakukan. Dengan mensosialisasikan perkembangan Bahasa Indonesia dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangannya diharapkan dapat memperkuat jati diri Bangsa Indonesia. ■



Tampilan laman KBBI daring di gawai

LABORATORIUM KEBINEKAAN BAHASA UNTUK MERAWAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

*Buah karambie dibalah duo
Karambie dibalah dicilok urang
Usahlah adiek baburuak sangko
Sayangnyo uda kaadiek surang*

*Buah kelapa dibelah dua
Kelapa dibelah dicuri orang
Janganlah adik berburuk sangka
Sayangnya abang ke adik seorang*

Gamaik: puisi rakyat dengan bahasa Minangkabau

Taukah kamu setidaknya ada 652 bahasa daerah yang terdapat pelosok negeri?

Sekarang tidak harus ke Sumatera Barat untuk mendengar luntai puisi rakyat Minangkabau, cukup dengan membuka laman <http://labbineka.kemdikbud.go.id/binekabahasa/> publik atau mengunjungi Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan yang berada di kawasan Sentul, Bogor kita sudah bisa menyaksikan luntai pantun, cerita rakyat atau belajar bahasa daerah Nusantara.

"Kunjungan ke laboratorium kebinekaan bahasa amat berkesan. kita menjadi sadar bahwa ada bahasa daerah yang terancam punah. kita harus memikirkan agar bahasa daerah tidak punah" – Afandi, Siswa SMAN 3 Jakarta-

Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) sejak tahun 2015 telah merancang pengembangan Laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra dan terwujud di tahun 2016. Laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra digagas untuk memberikan pemahaman kepada para siswa, mahasiswa, dan masyarakat tentang keberagaman bahasa dan sastra di Indonesia. Selain itu, laboratorium bahasa dan sastra ini diharapkan dapat memupuk semangat masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Marina Prolova, dosen Bahasa Indonesia di Institute of Asian and African Countries, Moscow State University menyatakan "Laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra sangat bagus, saya jadi tahu Indonesia punya banyak sekali bahasa daerah dan itu merupakan kekayaan

yang sangat tak ternilai"

Sepanjang 2017, sebanyak 500 orang telah berkunjung ke laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra tahun 2017 yang terdiri dari pelajar dan masyarakat umum, termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

Secara umum, pengunjung memberikan respon positif terhadap laboratorium kebinekaan. Wakil Kepala Sekolah SMAN 3 Jakarta yang berkunjung bersama 350 orang rombongan menyatakan bahwa laboratorium kebinekaan mendukung program sekolah mereka karena memberikan wawasan mengenai keragaman bahasa dan sastra Indonesia, sehingga diharapkan melalui kunjungan ini dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat bela Negara para siswa. Beliau juga berharap kegiatan kunjungan ke laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lain. Hal tersebut diperkuat Cecilia Firdana, Siswi SMAN 3 Jakarta. "Pengalaman yang sangat bagus saat berkunjung ke PPSDK. Salah satunya yang diajarkan adalah tentang UKBI yang penting karena kita sering menganggap sepele hal-hal kebahasaan dalam bahasa Indonesia." ■



mang bener Jakarte bermacam-macam suku (Memang benar (ada) bermacam-macam suku di Jakarta)

Jakarta bermacam-macam suku (Bermacam-macam suku (di) Jakarta)

Saking banyaknye suku (Saking banyaknya suku)

Beragamlah budaya (Beragamlah budayanya)

Gambang Rancang: puisi pada suku Betawi

koleksi laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra yang tercantum dalam aplikasi laboratorium

2017



- 65 Video Kosah Nusantara
- 22 Video Kosah Kata Dasar
- 21 Video Ekspresi Bahasa
- 5 Kisah Cerita Rakyat dari berbagai daerah untuk di pertunjukkan dalam bahasa Indonesia

Pada tahun 2017 juga dilaksanakan Pengayaan Bahan Koleksi dengan menambahkan **55 video baru**

- 15 video Kosah kata dasar
- 15 video Ekspresi
- 25 video Ekspresi Bahasa Nusantara

Koleksi laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra juga bertambah dengan adanya **poster kosah kata dasar** dari 122 bahasa daerah di Indonesia, informasi kebahasaan, cerita rakyat dan tambahan fitur **peta kosah kata dasar** dalam aplikasi laboratorium.

PETA KHAZANAH KEBINEKAAN INDONESIA



Pencatatan bahasa daerah oleh salah satu petugas di wilayah Papua

Indonesia adalah bangsa yang kaya, salah satu kekayaan yang patut dibanggakan tersebut terbukti dengan khazanah bahasa daerah yang bervariasi dan tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Rote. Bahasa daerah tersebut dituturkan oleh penutur dari beraneka suku bangsa dengan beragam budaya. Hal ini juga diperkaya dengan beragam dialek atau variasi bahasa dari masing-masing bahasa daerah. Dengan demikian, apabila bahasa dianggap dapat membantu untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang jati diri bangsa, maka diperlukan pengetahuan dasar mengenai situasi kebahasaan dan variasinya secara menyeluruh. Dalam hal ini, informasi dari sebuah peta bahasa mengenai daerah pemakaian dan persebaran bahasa dapat menuntun kita pada pemahaman mengenai situasi kebinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara proporsional.

Penelitian untuk pemetaan bahasa di Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah dilakukan sejak 1991. Bahasa daerah (tidak termasuk dialek dan sub-dialek) di Indonesia yang telah diidentifikasi

dan divalidasi sebanyak 652 bahasa dari 2.452 daerah pengamatan. Jika berdasarkan akumulasi persebaran bahasa daerah per provinsi, bahasa di Indonesia berjumlah 733. Jumlah tersebut tentunya akan bertambah seiring bertambahnya jumlah daerah pengamatan dalam pemetaan berikutnya. Bahkan angka tersebut belum termasuk bahasa di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat yang belum semua teridentifikasi. Deskripsi bahasa-bahasa daerah tersebut diterbitkan dalam buku Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia Edisi Keempat (2017).

Sebagai perbandingan jumlah bahasa hasil pemetaan yang dipublikasikan, Badan Bahasa telah mengidentifikasi 646 bahasa (dari 2.411 daerah pengamatan) pada tahun 2016, 578 bahasa (dari 2.344 daerah pengamatan) pada tahun 2013, dan 442 bahasa (dari 2.185 daerah pengamatan) pada tahun 2008. Jauh sebelum itu, pada tahun 1972, Lembaga Bahasa Nasional (sekarang Badan Bahasa) menyebutkan ada 418 bahasa daerah berdasarkan inventarisasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia pada tahun 1969—1971.

Antara tahun 1969-1971, Lembaga Bahasa Nasional (sekarang Badan Bahasa) menyebut ada **418** bahasa daerah berdasarkan inventarisasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia.

Tahun 2008, tercatat adanya **442** bahasa (dari 2.185 daerah pengamatan).

Pada tahun 2013, tercatat adanya **578** bahasa (dari 2.344 daerah pengamatan).

Pada 2016, Badan Bahasa telah mengidentifikasi **646** bahasa (dari 2.411 daerah pengamatan) pada tahun 2016.

Pemetaan bahasa yang dilakukan Badan Bahasa ini merupakan program inventarisasi dan identifikasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia secara komprehensif yang diharapkan dapat menentukan jumlah, varian, dan sebaran geografis bahasa serta menentukan hubungan kekerabatan antar bahasa dan pengelompokan bahasa. Tidak hanya itu, pemetaan bahasa ini sangat penting untuk menentukan upaya-upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa. Selain itu, pemetaan ini juga dapat digunakan sebagai bahan untuk menjelajahi berbagai kemungkinan fungsi bahasa (ranah penggunaan), akuisisi (transmisi lintas generasi), kebijakan pemerintah mengenai penetapan korpus (kumpulan ujaran) dan status bahasa, serta bahan pertimbangan untuk melakukan langkah-langkah pembelajaran dan perlindungan terhadap bahasa pada suatu kelompok masyarakat.

Pemetaan bahasa ini dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak di lapangan. Sebagaimana dirasakan oleh Moh Fifik Syafiudin, Kepala Bidang Toponim dari Badan Informasi Geospasial (BIG), "Pemetaan bahasa berperan penting dalam mengenal, memahami ciri dan karakter demografi bangsa serta memperkuat wawasan



kebangsaan.”
 Dalam tataran praktis, sebagai seorang yang bergerak di dunia penyiaran, Asep Nurisa Mahendra (Kepala Bidang Siaran Stasiun Siaran Luar Negeri di LPP RRI) mengutarakan, “Sebagai seorang yang sehari-hari berkecimpung di bidang penyiaran, manfaat dari peta bahasa sangat banyak. Antara lain, kita mendapatkan pengetahuan luas tentang berbagai kekayaan bahasa yang dimiliki setiap daerah. Kita bisa tepat sasaran dalam memberikan informasi kepada pendengar melalui bahasanya. Selama ini kita memberikan informasi ke pendengar melalui bahasa daerah, dan dengan adanya peta bahasa ini Radio Republik Indonesia (RRI) dapat terbantuan dalam penyampaian informasi mana yang cocok dengan kearifan lokal, sehingga informasi edukasi dan hiburan tidak terbuang percuma. Di samping itu, kita juga mengenalkan kepada dunia bahwa tiap daerah memiliki kekayaan bahasa daerah yang beragam, bukan hanya segi keindahan alamnya semata.” ■

MENEBAR BAHASA INDONESIA KE PENJURU DUNIA

Kita senang belajar Bahasa karena kita belajar tidak hanya bahasa tapi juga kebudayaan di Indonesia



Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yaitu peningkatan fungsi bahasa negara menjadi bahasa internasional, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Pengiriman Tenaga Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk Luar Negeri.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan jumlah pengguna dan sebaran penggunaan bahasa Indonesia di mancanegara serta memfasilitasi lembaga penyelenggara program BIPA di mancanegara dalam pengembangan pengajaran BIPA. Sasaran kegiatan ini meliputi Perwakilan RI, perguruan tinggi, sekolah, atau lembaga kursus di luar negeri, baik yang sedang mengembangkan maupun yang berminat membuka program pengajaran BIPA.

Untuk mencapai target itu diterapkan beberapa skema penugasan, yaitu (1) pengiriman tenaga pengajar dari PPSDK, (2) pengiriman tenaga pengajar melalui jalur kemitraan, dan (3) pengiriman tenaga pengajar melalui jalur perwakilan.



pengajaran bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di London, Inggris



pengajaran bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Huntingtower School, Australia



pengajaran bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di London, Inggris



pengajaran bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Huntingtower School, Australia



TESTIMONI:

“Pengajaran BIPA di Thailand sangat antusias untuk belajar Bahasa Indonesia, karena di tempat saya mengajar ada pertukaran siswa dari Kupang dan Malang dan siswa-siswa di Thailand sangat ingin berkomunikasi langsung dengan siswa dari Indonesia. Harapan ke depan untuk pengiriman pengajar BIPA ke luar negeri terus berlanjut dan dapat berkembang lagi serta lebih banyak bekerja sama dengan perguruan tinggi dan dosen di seluruh Indonesia itu akan lebih bagus karena nantinya akan ada kerja sama dalam hal penelitian juga.”

-Kris dari IPB (Pengajar BIPA yang dikirimkan ke Thailand)-

“Minat masyarakat Jerman untuk belajar Bahasa Indonesia makin tinggi tidak hanya di kalangan orang dewasa namun juga di kalangan anak-anak. Namun, hal ini terkendala jumlah pengajar BIPA dan pengembangan profesi pengajar BIPA yang belum maksimal untuk dibina. Sehingga sedikit menghambat perkembangan pengajar BIPA di Jerman. Manfaat pengiriman BIPA adalah pengajar BIPA di Jerman dapat mengetahui perkembangan BIPA di Indonesia seperti apa, dapat membentuk APBIPA di Jerman, dan saya kebetulan ditempatkan di KBRI sehingga KBRI juga lebih tau tentang kegiatan BIPA. Manfaat untuk saya pribadi adalah menambah jaringan kerja, dapat mengembangkan keilmuan saya

serta kemampuan diplomasi saya. Harapan pengiriman BIPA ke depan agar dapat lebih baik dalam persiapan, pelaksanaan, dan kepelungannya.”

-Paulina Candrasari dari UNIKA Atmajaya (Pengajar TOT yang dikirimkan ke Jerman).

“Saya ingin berterima kasih ke Republik Indonesia, PPSDK, Bahasa Indonesia untuk kelas ini, belajar Bahasa Indonesia. Kita senang belajar bahasa ini karena kita belajar tidak hanya bahasa tapi juga kebudayaan di Indonesia. Dan, terima kasih banyak.”

-Ronnel L. Olvido (Seniman Bayanihan PWU, pemelajar A2 di Manila, Filipina).

“Helo, saya Lella dari Universitas L'orientale, saya di tingkat Magister Dua. Saya pikir kuliah dengan Ibu Anik menarik sekali karena kita berbicara tentang banyak hal yang ada di Indonesia dan kita berbicara tentang tradisi yang ada di kota kami juga dan saya pikir sangat menarik bertemu dengan dosen yang asli dari Indonesia. Kita boleh memperbaiki bahasa karena dengan Ibu Anik selalu berbicara dalam bahasa Indonesia. Terima kasih.”

-Lella, Mahasiswa dari Universitas L'orientale, Napoli, Italia- ■



Kualitas dan totalitas seni peran seorang Christine Hakim, membuatnya kerap mendapatkan peran utama dalam setiap film yang dibintanginya, tak hanya film nasional, juga film luar negeri. Dedikasinya dalam dunia sinema membuahkan *Lifetime Achievement Awards* di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2016.



Mira Lesmana (tengah, depan) menggendong piala. Meraih 6 piala Citra pada FFI 2016, film *Athirah* yang digarapnya terpilih sebagai film terbaik.



Shanty Paredes, Tatyana Akman, Tara Basro dalam aksi musikal "3 Dara" pada Festival Film Indonesia 2016

FFI 2016 & 2017: OPTIMISME PERKEMBANGAN FILM TANAH AIR

“Biasanya begini kalau kita berusaha, selalu ada jalan keluarnya.”

Sepenggal dialog dalam Film Athirah tersebut, yang memenangkan kategori Film Terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2016, memberikan semangat optimisme, layaknya optimisme akan film-film karya sineas tanah air yang kian berkualitas. Tidak hanya menyabet penghargaan sebagai Film Terbaik FFI 2016, “Athirah” juga mendapatkan lima penghargaan lain, yaitu untuk nominasi Sutradara Terbaik (Riri Riza), Penulis Skenario Adaptasi Terbaik (Salman Aristo dan Riri Riza), Pengarah Artistik Terbaik (Eros Eflin), Penata Busana Terbaik (Chitra Subyakto), dan Pemeran Utama Wanita Terbaik (Cut Mini). Setiap tahunnya FFI digelar oleh Kemendikbud melalui Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm). FFI, sebagai puncak penghargaan tertinggi perfilman Indonesia setiap tahunnya dan merupakan cerminan kualitas film Indonesia, membuktikan bahwa sudah sepatutnya kita senantiasa optimis dengan perkembangan kualitas film Indonesia yang sangat membanggakan dari tahun ke tahun.

FFI 2016: PELESTARIAN SEJARAH & BUDAYA SEBAGAI BENTUK KECINTAAN TERHADAP BANGSA

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan kebudayaannya, maka dari itu FFI 2016 mengangkat tema restorasi. Peluncuran FFI 2016 dilaksanakan di Metropole XXI, Megaria, Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2016 dan dihadiri oleh Menteri Muhadjir. Setelah acara peluncuran diadakan acara nonton bareng film Tiga Dara, yang menggambarkan kehidupan romantika masyarakat Indonesia di tahun

1950an, salah satu film karya anak bangsa pada tahun 1956 dan telah direstorasi. Sebanyak 21 penghargaan diberikan dalam FFI 2016.

Tiga Dara adalah sebuah film musikal karya Usmar Ismail, pada tahun 1956. Agustus tahun lalu, tidak terasa telah enam puluh tahun berlalu, film tersebut kembali tayang di jaringan bioskop seluruh Indonesia. Bagaimana bisa film yang telah berumur lebih dari setengah abad itu diputar kembali? Tentu saja yang ditayangkan ini adalah hasil dari proses restorasi. Nyatanya, film seluloid yang rusak termakan usia, berjamur dan tergores telah berhasil diselamatkan. Proses restorasi dilakukan di laboratorium L'immagine Ritrovata, Bologna, Italia. Sementara proses digitalisasi dilakukan di Indonesia. Kualitas gambar pun telah disesuaikan dengan teknologi terkini (kiwari), yaitu dengan resolusi 4K.

“Insan perfilman Indonesia jangan berhenti berkarya. Masyarakat Indonesia juga harus terus mengapresiasi dengan menonton ke bioskop. Dan yang paling penting, pemerintah Indonesia berada di antaranya, dengan memberi dukungan penuh di bidang perfilman,” ujar Menteri Muhadjir saat memberikan sambutan di ajang pemberian penghargaan FFI 2016, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta,.

Tidak hanya sebagai ajang apresiasi film nasional, namun FFI juga merupakan bukti konkrit pemerintah untuk memajukan film karya anak bangsa, terutama mengingat film juga bukan sekedar media hiburan, namun juga media edukasi yang efektif, termasuk untuk generasi di masa depan mempelajari sejarah masa kini.

“Saya membayangkan generasi saat ini dan masa depan nanti memandang cara baru untuk belajar melalui film yang ditonton. Kita

bisa meninggalkan jejak sejarah menciptakan inovasi – inovasi baru melihat dunia secara global menemukan peleburan budaya baru untuk pendidikan Indonesia, membentuk budaya berfikir yang dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman,” ujar Menteri Muhadjir.

Menteri Muhadjir juga mengapresiasi serta menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang FFI 2016. “Kemenangan ini adalah kemenangan kita semua. Kita juga berterima kasih kepada festival film Indonesia yang telah sukses mengeluarkan kembali peristiwa malam ini mari kita mengapresiasi film karya anak bangsa karena saya bangga film Indonesia. Maju terus perfilman Indonesia,” ungkap beliau.

Keberagaman Indonesia tidak hanya tercermin dari beragam suku bangsa dan budaya saja, namun juga khasanah perfilman Indonesia yang begitu kaya. Maka dari itu, FFI tahun 2017 mengangkat keberagaman sebagai tema. FFI 2017 dilaksanakan pada 11 November 2017 di Manado, Sulawesi Utara. Pengumuman Nominasi FFI 2017 telah disampaikan sebelumnya, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2017 di Raffles Hotel Jakarta.

Terdapat kurang lebih 100 judul film yang terdiri dari Film Cerita Panjang, Film Dokumenter, Film Pendek dan Film Animasi diperhitungkan untuk penetapan nominasi FFI 2017. Seluruh film itu beredar melalui jaringan distribusi Bioskop dan Non-Bioskop di wilayah Indonesia sejak Oktober 2016 hingga akhir September 2017. Beberapa tahapan seleksi yang berlangsung dari awal Agustus 2017 yang melibatkan asosiasi profesi dan komunitas film. Salah satu kebaruan yang diangkat pada FFI 2017 adalah proses penjurian yang dilakukan secara daring yang mengutamakan tiga kriteria sebagai dasar penilaian, yaitu kejernihan gagasan dan tema, teknis dan estetika, dan profesionalitas. “Film-film yang menjadi nominator akan dipilih atas dasar gagasan dan estetika serta profesionalisme dari penilaian 75 juri mandiri dari kalangan pemangku kepentingan perfilman. Mereka mulai bekerja tanggal 10-24 Oktober akan memilih 1 terbaik dari 22 kategori yang siap meraih Piala Citra. Penjurian dilaksanakan dengan bantuan teknologi internet yang telah diujicoba oleh juri seperti Amaroso Katamsi, Jajang C Noer dan senior juri lainnya,” papar Riri Riza sebagai Ketua Dewan Juri FFI 2017.

Pada malam Pengumuman Nominasi FFI 2017 diumumkan puluhan nominasi dari 22 kategori.

Tahun ini, film Pengabdian Setan dan Kartini mendapatkan nominasi terbanyak.

Malam ini menjadi penting karena seluruh stakeholder mulai dari pemerintah hingga insan perfilman dapat berkumpul. Mari kita jadikan FFI tahun 2017 ini sebagai batu pijakan festival Indonesia dan film Indonesia agar menjadi lebih berkilau di masa yang akan datang,” ujar Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, membuka malam itu. Beberapa pelaku perfilman tanah air nampak hadir untuk membacakan nominasi pemenang pada malam itu, antara lain Morgan Oey, Anggy Umbara, Wulan Guritno, Ayushita, dan Hengky Sulaiman. Pada Sabtu, 11 November 2017, para insan perfilman Indonesia berkumpul di Grand Kawanua, Manado, Sulawesi Utara menghadiri perhelatan yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya, Malam Anugerah Piala Citra FFI 2017. Didampingi Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, dan Ketua Umum Pelaksana FFI 2017, Leni Lolang, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, membuka secara resmi acara tersebut. “Kita ingin film menghasilkan nilai-nilai budaya, karakter yang baik bagi anak didik kita di tanah air. Film Indonesia sekarang mulai luar biasa, jumlah penontonnya semakin meningkat. Ini suatu hal yang baik dan tidak terlepas dari insan perfilman. Kita berharap lebih banyak lagi muncul film yang baik, berkualitas, dan menjadi tontonan yang menyenangkan,” ungkap beliau saat membuka acara malam itu.

Film “Night Bus”, peraih Piala Citra untuk kategori film terbaik yang diserahkan oleh Presiden RI ke-5, Megawati, bercerita tentang perjalanan sekelompok orang dalam sebuah bus yang menyusuri daerah konflik antara pemerintah dengan milisi gerakan kemerdekaan. Darius Sinathrya, sebagai produser film tersebut, menerima langsung piala yang merupakan lambang supremasi tertinggi bagi insan perfilman sejak 1955 itu. Film “Night Bus” juga meraih 5 Piala Citra untuk 5 kategori lainnya, yaitu penulis skenario adaptasi terbaik, penyunting gambar terbaik, penata busana terbaik, penata rias terbaik, dan pemeran utama pria terbaik.

Pada Malam Anugerah Piala Citra FFI 2017 diberikan 22 kategori penghargaan, termasuk penghargaan khusus Pengabdian Seumur Hidup (Lifetime Achievement) diberikan kepada Produser Budiyati Abiyoga. Budiyati merupakan produser sejumlah film yang pernah meraih

FFI 2017: KEBERAGAMAN



Malam Penganugerahan FFI 2017

Piala Citra, seperti Kejarlah Daku Kau Kutangkap (1985, Skenario Terbaik FFI 1986), Naga Bonar Jadi 2 (2007, Film Terbaik FFI 2007), dan film terbaru “Iqro: Petualangan Meraih Bintang” (2017) yang meraih nominasi FFI 2017. Pembacaan pemberian penghargaan khusus ini dilakukan oleh produser Mira Lesmana.

Tidak hanya meriah, namun malam ini juga menjadi salah satu lambang semakin majunya film tanah air yang semakin beragam dan, tentunya, berkualitas. Acara puncak FFI 2017 ini pun sukses menjadi perlambang kemajuan kondisi perfilman nasional kita, yaitu sebagai salah satu perwujudan hasil usaha dan daya upaya seluruh pihak untuk memajukan dan berkontribusi bagi dunia perfilman nasional. ■

BERIKUT DAFTAR LENGKAP PEMENANG FESTIVAL FILM INDONESIA 2017

Film Terbaik

Night Bus

Sutradara Terbaik

Edwin (Posesif)

Lifetime Achievement Award

Budiyati Abiyoga

Pemeran Utama Pria Terbaik

Teuku Rifnu Wikana (Night Bus)

Pemeran Utama Wanita Terbaik

Putri Marino (Posesif)

Pemeran Pendukung Wanita Terbaik

Christine Hakim (Kartini)

Pemeran Pendukung Pria Terbaik

Yayu Uriu (Posesif)

Penulis Skenario Adaptasi Terbaik

Rahabi Mandra dan Teuku Rifnu Wikana (Night Bus)

Penulis Skenario Asli Terbaik

Ernest Prakasa (Cek Toko Sebelah)

Film Animasi Pendek Terbaik

Lukisan Nafas (Fajar Ramayel)

Film Pendek Terbaik

Ruah (Makbul Mubarak)

Film Dokumenter Pendek Terbaik

The Unseen Words (Wahyu Utami Wati)

Film Dokumenter Panjang Terbaik

Film Dokumenter Panjang Terbaik

Bulu Mata (Tonny Trimarsanto)

Penata Efek Visual Terbaik

Finalize Studios (Heri Kuntoro dan Abby Eldiple untuk

Film Pengabdian Setan)

Penyunting Gambar Terbaik

Kelvin Nugroho dan Sentot Sahid (Night Bus)

Pemeran Anak Terbaik

Muhammad Adhiyat (Pengabdian Setan)

Pencipta Lagu Tema Terbaik

The Spouse - Kalam Malam (Pengabdian Setan)

Pengarah Artistik Terbaik

Allan Sebastian (Pengabdian Setan)

Pengarah Sinematografi Terbaik

Ical Tanjung (Pengabdian Setan)

Penata Musik Terbaik

Aghi Narottama, Tony Merle, Bemby Gusti (Pengabdian Setan)

Suara Terbaik

Khikmawan Santosa dan Anhar Moha (Pengabdian Setan)

Penata Rias Terbaik

Cherry Wirawan (Night Bus)

Penata Busana Terbaik

Gemilla Gea Geriantiana (Night Bus)

MEMAJUKAN DAN MELESTARIKAN PERFILMAN INDONESIA

“Pembuatan film tidak tergantung pada soal komersial belaka. Melainkan hasil karya seni yang bebas dan mencerminkan kepribadian nasional.”

Nampaknya pernyataan yang disampaikan oleh Haji Usmar Ismail sekian puluh tahun silam tersebut masih relevan hingga saat ini. Haji Usmar Ismail, yang sering disebut sebagai Bapak Perfilman Nasional, telah menghasilkan sekitar 30 judul film sepanjang hidupnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia perfilman tanah air kian berkembang pesat, talenta-talenta putra-putri bangsa semakin bertebaran tidak hanya di Tanah Air, namun hingga kancan internasional. Hasil karya anak bangsa pun semakin menuai apresiasi dan prestasi. Penikmat film Indonesia pun senantiasa antusias menyambut dan menunggu produk film nasional. Semua pencapaian tersebut mencerminkan dunia seni nasional yang semakin berkembang dan berkualitas, kepribadian bangsa kita yang semakin kuat dari hari ke hari.

Prestasi Insan Perfilman Indonesia dalam Ajang Internasional

Salah satu pencapaian insan perfilman nasional yang patut kita semua banggakan adalah dinobatkannya Reza Rahadian sebagai Aktor Terbaik, atas perannya dalam film Rudy Habibie, dalam ajang Asia-

Pacific Film Festival 2017. Asia-Pacific Film Festival 2017 digelar di Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu, 30 Juli 2017. Di ajang tersebut, Tya Subiakto juga menerima penghargaan sebagai Penata Musik Terbaik. “Ini menjadi salah satu motivasi besar bagi kami, insan perfilman Tanah Air, untuk terus membuat film yang baik dan bermutu,” papar Manoj Punjabie, produser film Rudy Habibie. **Kolaborasi sebagai Bentuk Aksi Nyata Memajukan Perfilman Indonesia** Kerja sama dengan pihak asing juga menjadi salah satu upaya konkret untuk memperkenalkan perfilman Indonesia, salah satunya melalui pekan film Indonesia. Salah satunya adalah Indonesia Film Festival (IFF) 2017 yang dilaksanakan selama tiga hari di Osaka, Jepang. IFF ini terselenggara atas kerja sama antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka, Pemerintah Prefektur Osaka dan Kemendikbud melalui Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbang Film).

“Kegiatan ini diharapkan membuat film Indonesia lebih dekat lagi dengan masyarakat Indonesia di luar negeri sekaligus memperkenalkan wajah Indonesia kepada dunia internasional melalui film,” kata Menteri Muhadjir Effendy dalam

pembukaan IFF 2017 pada 22 September 2017. Osaka dipilih karena Jepang memiliki ikatan sejarah, budaya dan ekonomi dengan Indonesia. Melalui IFF 2017 diharapkan semua pemangku kepentingan film dan praktisi film di Jepang mau bekerja sama dengan sineas Indonesia. Pusbang Film berperan menjadi mediator untuk kerja sama tersebut.

Kerja sama juga dilakukan bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dengan meluncurkan Festival Film Pendek Kemaritiman dan Festival Dokumenter Pelajar 2017 pada tanggal 25 Juli 2017. “Idenya adalah bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam menghidupkan nuansa kemaritiman. Media film pendek dan dokumenter dapat menjadi saluran pengingat budaya maritim kita. Hal lain yang tidak kita perhatikan sebelumnya, misalnya para pelajar itu bisa mengamati lingkungannya lebih detil, itu akan membantu mereka mengamati suasana sekelilingnya. Selama ini kita dijejali film dokumenter dari luar. Masa’ kita tidak bisa membuat film dokumenter sendiri”, ujar Deputy Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim Kemenko Kemaritiman, Safri Burhanuddin.

Perayaan Hari Film Nasional 2017 sebagai Wadah Merayakan Keberagaman Indonesia

Setiap tanggal 30 Maret setiap tahunnya, insan perfilman Indonesia merayakan Hari Film Nasional yang merupakan tanggal pengambilan gambar film Indonesia bicara pertama yang berjudul “Darah dan Doa” karya Usmar Ismail. Kemendikbud, Badan Ekonomi Kreatif, dan Perusahaan Film Negara bersama dengan beberapa mitra pendukung menyelenggarakan perayaan Hari Film Nasional 2017 dengan tema “Merayakan Keberagaman Indonesia”. Perayaan Hari Film Nasional dilakukan sepanjang bulan Maret dengan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia dan di luar negeri, antara lain penayangan film, diskusi, lokakarya (*workshop*), diskusi kelompok terpumpun atau *focus group discussion* (FGD), dan pameran film.

Restorasi dan Alih Media Melestarikan Kekayaan Perfilman Indonesia

Pusbang Film Kemendikbud juga senantiasa melakukan restorasi film Indonesia dan alih media (digitalisasi) sebagai upaya melestarikan karya sineas-sineas terdahulu agar dapat dapat terus dinikmati. Salah satu film yang direstorasi pada tahun ini adalah “Pagar Kawat Berduri” dengan sutradara Asrul Sani, yang

diproduksi tahun 1961. Dalam setahun, Pusbang Film telah melakukan proses alih media 35 film pada tahun 2017.

Merayakan Kemajuan Perfilman Indonesia Hingga ke Pelosok Negeri (Pemutaran Film & Pemberian Bantuan)

Antusiasme masyarakat sangat nampak saat Pusbang Film menyelenggarakan acara nonton bareng dan diskusi terbuka film Indonesia (seperti dalam foto di samping), yaitu pemutaran film “Soekarno: Ketika Bung di Ende”, di Kecamatan Waikububak dan Loli Sumba Barat pada 12-13 Juni 2017. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat terhibur, lalu mengapresiasi film Indonesia serta mengambil nilai-nilai luhur yang disampaikan dalam film.

Pusbang Film juga memberikan bantuan berupa peralatan menonton film, yang berupa layar, proyektor serta pengeras suara atau speaker aktif untuk daerah tertinggal, salah satunya Kabupaten Bangka Selatan di Provinsi Bangka Belitung. “Kita, alhamdulillah mendapatkan bantuan alat lengkap untuk pemutaran film, semuanya lengkap dari layar yang ukuran 4X6 hingga proyektor dan speaker-nya, ini tentunya akan kita manfaatkan untuk membantu setiap program pemerintah disosialisasikan ke masyarakat Basel,” ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Eddy, saat menerima

bantuan, (4/10/2017). Bantuan tersebut merupakan respons yang diberikan Pusbang Film atas permohonan bantuan yang diajukannya. Peralatan tersebut rencananya akan digunakan untuk menonton film yang mendidik dan menambah ilmu di desa-desa secara bergilir menggunakan jadwal. Antusiasme dan kebahagiaan yang sama juga dirasakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, saat menerima bantuan serupa yang rencananya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan nonton film bersama, antara lain film “Soekarno: Ketika Bung di Ende”.

Dalam konferensi pers Hari Film Nasional 2017, aktor kawakan Slamet Rahardjo mengatakan, jika dilihat dari sejarah perfilman, negara tidak lagi berperang dengan mengirimkan nuklir tapi cukup melalui media audio visual, sehingga sangat tepat jika dikatakan bahwa film adalah guru. Film juga menjadi media yang cukup signifikan untuk mempengaruhi publik. Menteri Muhadjir juga menegaskan posisi strategis film untuk memperkuat karakter bangsa. Semoga dunia perfilman Indonesia semakin kuat! ■



MENDORONG INTERAKSI PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Era sekarang tak lepas dari keterhubungan seseorang dengan internet. Di seluruh dunia, telah lebih dari separuh penduduk dunia menggunakan internet. Ya, penduduk dunia saat ini mencapai 7,497 milyar. Lebih dari 3,8 milyar telah menggunakan internet, atau tingkat penetrasi internet mencapai 51%. Banyak sekali hal yang didapat dari pemanfaatan internet. Transfer informasi antarindividu di belahan dunia berlangsung seketika. Pertukaran informasi yang cepat dan luas menjadi kebutuhan bagi setiap orang, sehingga pertumbuhan penggunaan internet pun melaju dengan cepatnya.

Ketika ditelusuri lebih lanjut, ternyata dari 3,8 milyar pengguna internet, pengguna media sosial mencapai 2,9 milyar lebih.

Di Indonesia tercatat sebanyak 111 juta orang menggunakan facebook. Ini menempatkan Indonesia berada di urutan keempat negara dengan pengguna facebook terbanyak. Amerika menempati urutan pertama dengan 219 juta pengguna facebook, India pada urutan kedua dengan 213 juta pengguna, kemudian Brasil di urutan ketiga dengan 123 juta pengguna.

Menyebarkan informasi dan menghubungkan pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan pun dilakukan oleh Kemendikbud dengan media sosial. Ini pun sejalan dengan tujuan untuk membentuk ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berdasarkan gotong-royong. Karena itu keberadaan kementerian di dalam jejaring media sosial pun diperkuat.

Urusan pendidikan dan kebudayaan tak hanya menjadi urusan pemerintah saja, melainkan urusan semua pihak, sehingga pelibatan publik sangat diperlukan. Kementerian perlu memberitakan kerja keras yang telah dilakukan, sedangkan perbincangan publik menjadi pertimbangan perbaikan kebijakan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjadi kementerian dengan jumlah

pengikut (follower) yang besar di media sosial (medsos) dibandingkan dengan kementerian dan lembaga pemerintah lain. Terbukti, per tanggal 25 Oktober 2017, Fanpage Facebook Kemendikbud memiliki 1,9 juta fans Facebook, Twitter dengan 1,2 juta pengikut, Instagram 82.000, serta Youtube 1.091 subscribers. Dengan jumlah tersebut, semua akun medsos Kemendikbud menduduki peringkat 10 besar di antara seluruh kementerian dan lembaga. Keempat akun tersebut juga telah terverifikasi secara resmi. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memunculkan rasa percaya masyarakat terhadap informasi yang berasal dari medsos Kemendikbud.

Dengan jumlah pemangku kepentingan terbesar, peran media sosial akan sangat efektif dalam proses penyampaian informasi ke masyarakat. Berbagai kanal medsos Kemendikbud berperan sebagai saluran utama dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah khususnya Kemendikbud, juga sebagai wadah dalam menerima aspirasi, baik dalam bentuk kritikan dan tanya jawab dengan masyarakat.

Terhitung tanggal 31 Oktober 2017, Kemendikbud melalui Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat mengevaluasi perkembangan secara statistik keempat medsosnya. Secara keseluruhan dari jumlah pengikut, baik Facebook, Twitter, Instagram, maupun Youtube terus mengalami peningkatan yang stabil. Selain itu, laman kemdikbud.go.id juga menduduki 50 besar peringkat laman dari seluruh Indonesia berdasarkan situs Alexa.

Facebook

Hingga saat ini, 1.956.702 pengguna Facebook telah menyukai akun @Kemdikbud.RI. Dengan rata-rata pertumbuhan 3.000 akun penyuka setiap bulannya, akun ini menduduki peringkat pertama dengan diikuti Kementerian



Pelajari informasi yang kita peroleh dari media sosial. Cari tahu informasi yang valid dari sumbernya.

Sila pindai QR code untuk menuju kanal informasi media sosial resmi Kemendikbud

Agama di peringkat dua dengan selisih 1.316.462 pengikut. Tingkat interaksi yang dimiliki untuk hingga 28 Oktober 2017 pun mengalami peningkatan 37% dengan 131.438 interaksi. Jangkauan informasi untuk tanggal 22-28 Oktober 2017 mencapai 817.537 orang, tumbuh 51%. Selain itu juga ada peningkatan pengikut sejumlah 2% (1.739).

Berdasarkan data keaktifan pengguna, penyuka akun @Kemdikbud.RI rata-rata aktif memantau *fanpage* Kemendikbud mulai pukul 06.00 hingga 21.00 WIB. Frekuensi terbesar terjadi antara pukul 20.00 hingga 21.00 WIB.

Twitter

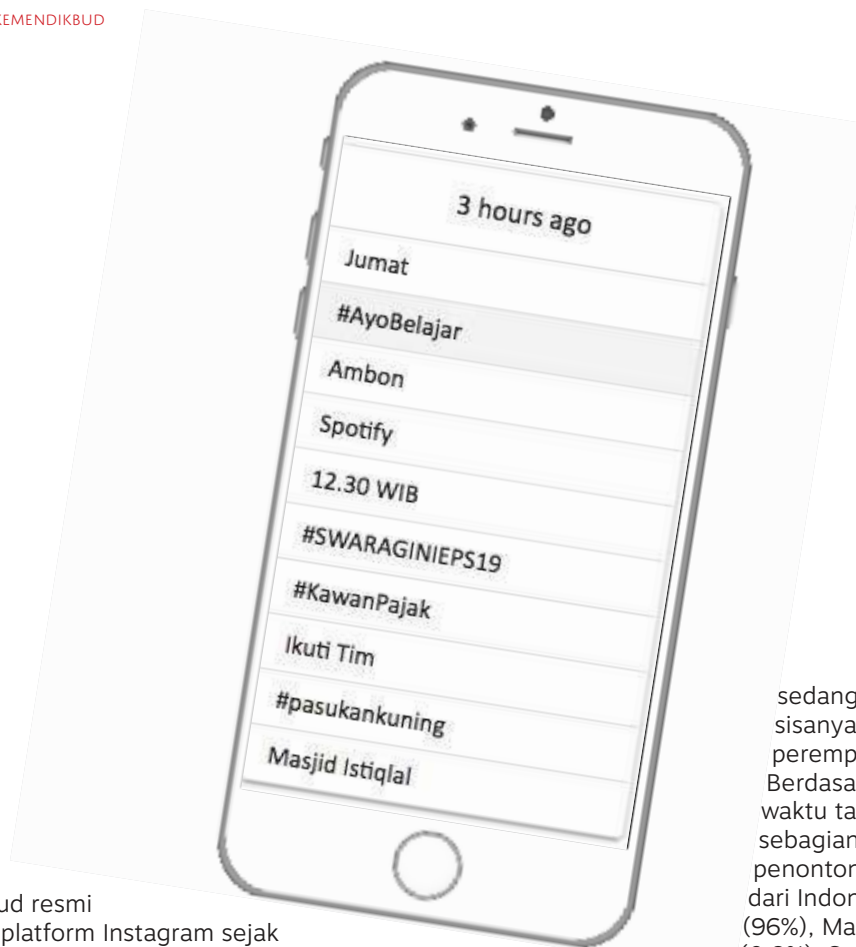
Dibuat sejak Juli 2012, saat ini (31 Oktober 2017), akun Twitter @Kemdikbud_RI telah memiliki 1.278.423 pengikut dengan pertumbuhan sebesar 1.446 akun organik per harinya. Jumlah ini menjadikan Kemendikbud menduduki posisi ke-2, di bawah @kemristekdikti dengan 1.624.112 pengikut dalam pemeringkatan akun Twitter kementerian dan lembaga pemerintah.

Dalam platform yang berlambang burung berwarna biru ini, terdapat fitur retweet. Fitur

ini dapat membantu dalam membagikan cuitan (tweet) dengan cepat ke semua pengikut yang dimiliki oleh suatu akun. Kita dapat me-retweet kiriman orang lain maupun kita sendiri. Rata-rata @Kemdikbud.RI mendapatkan 393 retweets, 717 likes, dan 126 balasan dari pengikut per harinya. Selain itu, untuk tautan yang dikirimkan mendapatkan 595 klik per hari serta jumlah . Sedangkan rata-rata tingkat interaksinya sebesar 1,3% dengan impresi 266,8 ribu per harinya.

Salah satu cuitan yang memperoleh impresi tertinggi adalah tautan untuk mengunduh #LaguIndonesiaRaya 3 stanza, yaitu 113.456. Cuitan ini memperoleh total 3.106 interaksi dalam bentuk 1.487 interaksi media, 275 retweets, 297 likes, 222 hashtag clicks, dan 163 tautan telah diklik.

Fungsi tagar yang berguna untuk menandai suatu topik juga kerap digunakan dalam konten yang dikirimkan oleh @Kemdikbud_RI. Dengan fungsi ini, kita dapat mencari suatu topik tertentu dan menganalisis bagaimana respons warganet terhadap topik tersebut. Beberapa tagar yang digunakan dan sempat mejejit menjadi trending topic di Twitter adalah #CerdasBerkarakter (2 Mei 2017), #SMKHebat (17 Mei 2017), #AyoBelajar (9 Juni 2017), dan #IndonesiaDiEuropalia (11 Oktober 2017). Selain itu, untuk sapaan terhadap pemangku kepentingan, @Kemdikbud_RI menggunakan tagar #SahabatDikbud, sedangkan untuk artikel berita menggunakan #BeritaDikbud.



Instagram

Kemendikbud resmi menggunakan platform Instagram sejak Februari 2017 dengan nama akun @kemdikbud.ri. Hingga 31 Oktober 2017, akun ini telah mengirimkan 1.450 kiriman. Pengikut dari akun ini berjumlah 80.564 akun dengan pertumbuhan 8,6 ribu perbulan. Dengan jumlah ini, @kemdikbud.ri menduduki peringkat ke-5 di bawah @kemenpupr dengan 93.238 pengikut dan di atas @Kementerianbumn dengan 78.165 pengikut.

Berdasarkan 20 kiriman terakhir, @kemdikbud.ri telah mendapatkan 19.054 likes, 240 komentar, dan 23,95% interaksi. Tiga besar kiriman yang mendapatkan likes terbanyak adalah "poster Sumpah Pemuda" (2.264), "video ucapan Sumpah Pemuda" (2.038), dan "Gladi bersih persiapan simponi Indonesia Raya 3 stanza" (1.724). Sedangkan tiga kiriman yang mendapatkan komentar terbanyak adalah "Kuis Europalia 2017" (37), "video ucapan Sumpah Pemuda" (30), dan "Pameran koleksi di Europalia 2017" (25).

Youtube

Seluruh video yang diunggah telah dilihat sebanyak 17.291 kali dengan durasi 27.218 menit dalam 28 hari terakhir. Sebagian besar, pengunjung adalah laki-laki dengan 59%,

sedangkan sisanya perempuan. Berdasarkan waktu tayang, sebagian besar penonton berasal dari Indonesia (96%), Malaysia (0,9%), Saudi States (0,5%), dan

Arabia (0,6%), United States (0,3%), dan Singapore (0,3%).

Akun Youtube Kemendikbud menduduki peringkat ke-7, di bawah Sekretaris Kabinet (1999) dan di atas Kemenhub151 (1810).

Kemdikbud.go.id

Rata-rata waktu kunjungan di laman ini adalah 1 menit 27 detik dengan bounce rate 75,85%. Hal ini sesuai dengan komposisi tulisan yang rata-rata terdiri dari 6 hingga 7 paragraf. 57,7% persen dari pengunjung laman adalah pengunjung baru.

Berdasarkan situs analisis Alexa, kemdikbud.go.id menduduki peringkat 48 di Indonesia. Posisi ini menempatkan laman resmi Kemendikbud ini di peringkat teratas dari 34 kementerian dan lembaga negara.

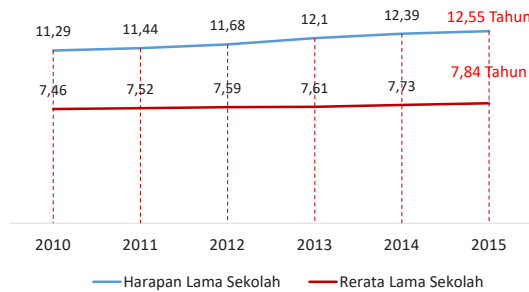


NERACA PENDIDIKAN NASIONAL 2016



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA 2015

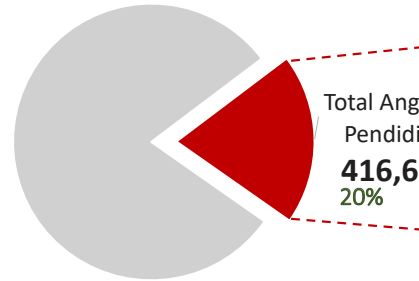
69,55



Sumber: BPS 2016

APBN-P 2016

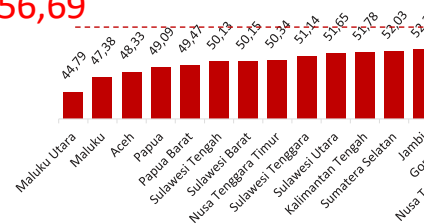
TOTAL BELANJA NEGARA
Rp2.082,95 T



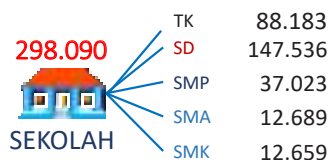
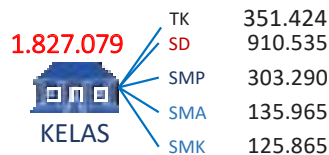
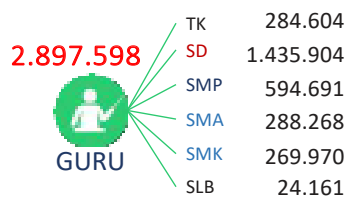
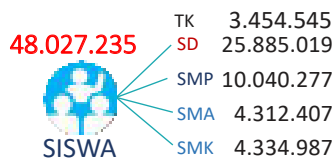
Sumber: Biro PKLN 2016

UJI KOMPETENSI GURU

56,69



Data Pendidikan Nasional

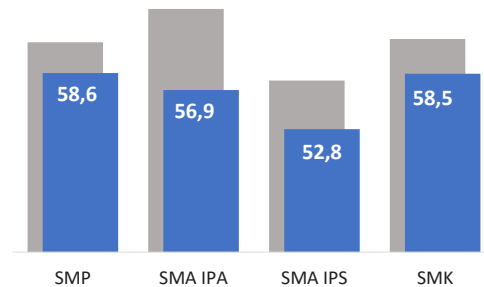


Sumber: PDSPK 2016

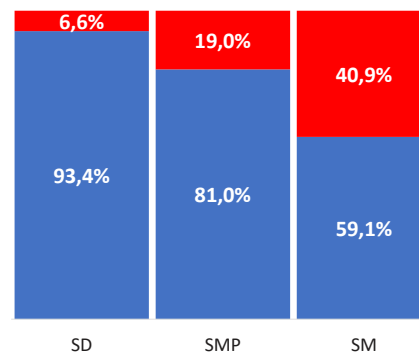


UJIAN NASIONAL

Sumber: Puspensdik 2016



ANGKA PARTISIPASI MURNI

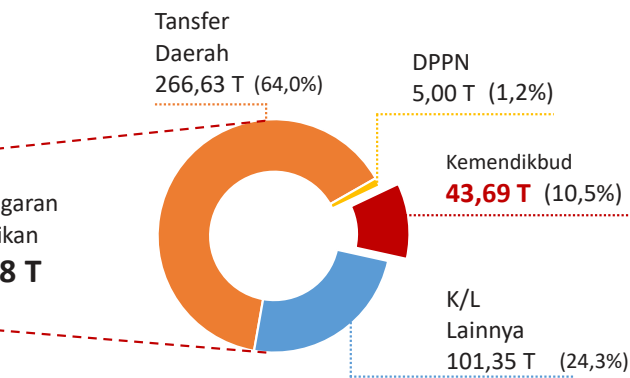


Sumber: PDSPK 2016

Seringkali fakta terabaikan. Data tak menjadi pertimbangan pengambilan keputusan. Kini saatnya bercermin, lalu berbenah.

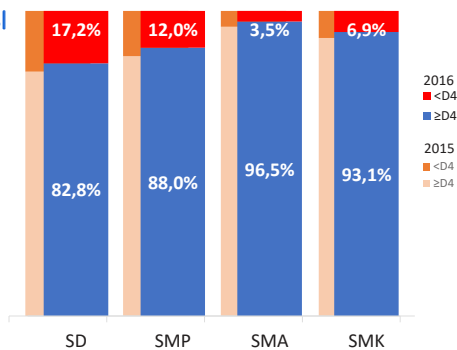


NERACA PENDIDIKAN DAERAH



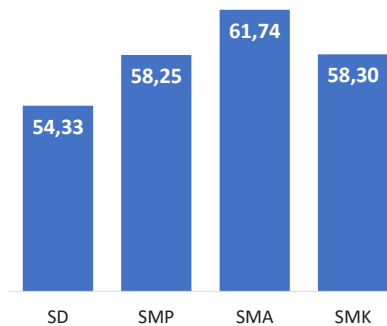
garangan
ikan
8 T

KUALIFIKASI GURU



Sumber: PDSPK 2016

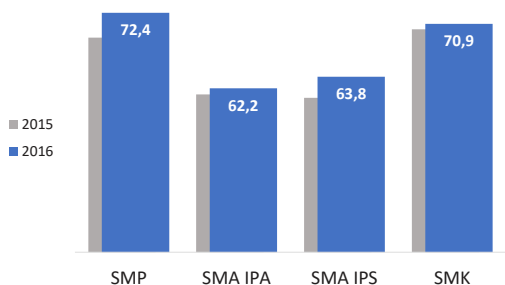
UJI KOMPETENSI GURU PER JENJANG



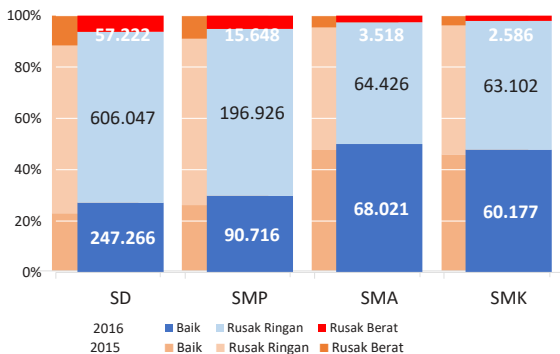
Sumber: Ditjen GTK 2015

INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL

Sumber: Puspendik 2016



KONDISI RUANG KELAS



Sumber: PDSPK 2016

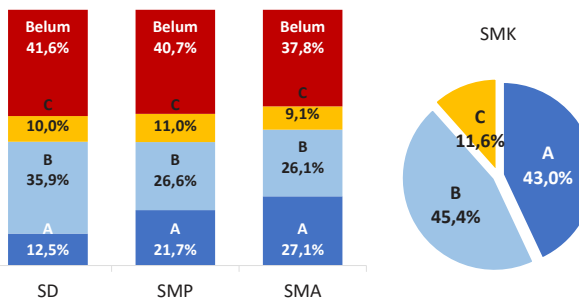
RASIO PENDIDIKAN

	SD	SMP	SMA	SMK
Rombel : Siswa	1:24	1:29	1:29	1:28
Guru : Siswa	1:18	1:17	1:15	1:16

Sumber: PDSPK 2016

AKREDITASI

Untuk SMK, hasil akreditasi menurut Program Keahlian



Sumber: BAN-SM 2016



PELIBATAN PUBLIK DALAM MENGAWAL PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Ada yang berbeda dari suasana Diskusi Kelompok Terpumpun Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah dan Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan (NPD dan NGTK 2016) Provinsi Bengkulu di Hotel Swiss-Bell, Bengkulu. Waktu sudah menunjukkan pukul 22.00, namun peserta Diskusi Kelompok Terpumpun yang dibagi dalam beberapa kelompok masih semangat mendiskusikan masalah pendidikan yang terjadi di Provinsi Bengkulu berdasarkan data-data yang tersedia dalam NPD dan NGTK. Serupa dengan pelaksanaan DKT pada provinsi-provinsi sebelumnya, DKT ke-11 yang diadakan pada tahun 2017 ini mengajak para peserta dari berbagai elemen masyarakat untuk berdiskusi dengan bersama-sama menganalisis dan membandingkan data-data yang ada dengan situasi lapangan yang terjadi yang sebenarnya. Peserta Diskusi Kelompok Terpumpun ini sangat beragam dan mewakili unsur-unsur yang berasal dari anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, Tokoh/Pegiat/ Pemerhati/ Dewan Pendidikan, akademisi perguruan tinggi,

UPT Kemendikbud, media massa, Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia, organisasi masyarakat sipil dan perwakilan sekolah.

Topik utama yang dibahas adalah upaya memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu melalui inventarisasi permasalahan yang terjadi dan menemukan bagaimana solusi penyelesaiannya. Pendidikan yang berkualitas menjadi kunci utama bagi kemajuan suatu bangsa, namun mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bukanlah sebuah perkara yang mudah. Ada banyak faktor dan permasalahan yang mempengaruhinya. Diperlukan kerja sama dari pemerintah, guru, orang tua, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan. Masih banyak permasalahan pendidikan yang belum terselesaikan dengan baik karena kurangnya data dan informasi terhadap objek permasalahan, sehingga solusi yang dilakukan masih belum bisa mengatasi permasalahan tersebut.

Pada tahun 2017, Kemendikbud kembali berinovasi dengan penerbitan NPD yang banyak

mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembaruannya. Pembaruan terhadap NPD dilakukan dengan cara membarui data maupun tampilan. Pembaruan tersebut dilakukan dengan memperhatikan masukan-masukan dari pemangku kepentingan yang menggunakan NPD. Tidak hanya itu, Kemendikbud juga meluncurkan Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan (NGTK) yang memiliki karakteristik yang sama dengan NPD namun dengan data yang lebih spesifik terkait Guru dan Tenaga Kependidikan. NGTK 2016 memberikan gambaran yang lebih rinci tentang hasil Uji Kompetensi Guru di masing-masing daerah, jumlah guru dengan berbagai macam pengelompokan, bahkan proyeksi jumlah guru yang akan pensiun dalam 3-5 tahun ke depan.

NPD dan NGTK menyajikan data dan capaian pendidikan pada skala nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang dapat diunduh oleh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan secara bebas melalui laman <https://npd.data.kemdikbud.go.id>. Dengan diluncurkannya NPD, maka semua pihak dapat memperoleh data tentang pendidikan di daerah mana pun dengan lebih mudah. Atas inisiasi dan penerbitan NPD

dan NGTK tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan apresiasi kepada Kemendikbud. Dalam pernyataannya, KSP berharap NPD menjadi contoh untuk Kementerian/Lembaga lainnya untuk dapat menyusun produk serupa, yang merangkum data dan capaian pendidikan sebagai salah satu instrumen untuk perencanaan dan pengawasan anggaran yang bisa diakses secara terbuka oleh semua lapisan masyarakat.

Kemendikbud melalui Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA), memperkuat lagi penggunaan dan pemanfaatan NPD dan NGTK sebagai salah satu acuan data pendidikan dengan mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah dan Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan. Dalam kegiatan tersebut, PASKA melakukan sosialisasi mengenai NPD dan mengajak semua pemangku kepentingan untuk dapat terlibat dan berdiskusi aktif mencari alternatif solusi terhadap permasalahan pendidikan yang memang terjadi di daerah mereka masing-masing.

Diskusi yang diadakan PASKA tersebut sudah diselenggarakan di 12 Provinsi pada tahun 2016, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara



Suasana Diskusi NPD dan NGTK

Barat, Banten, Aceh, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Papua Barat, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Riau. Pada tahun 2017, diskusi tersebut sudah diselenggarakan di 13 Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Maluku Utara, Bali, Lampung, Sulawesi Tenggara, Jambi, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Kalimantan Utara, dan Maluku.

Permasalahan yang didiskusikan dalam DKT tersebut dikelompokkan dalam topik Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendanaan pendidikan, Akreditasi dan Sarana Prasarana Pendidikan, Siswa dan hasil belajar. Hasil diskusi alternatif solusi atas permasalahan pendidikan yang terjadi, kemudian dirangkum dan dilaporkan kepada Unit utama di Kemendikbud, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kab/Kota yang bersangkutan, serta Kepala Dinas Pendidikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi di setiap provinsi yang dikunjungi hampir serupa, namun ada banyak faktor yang menjadikan alternatif solusi untuk masing-masing daerah bisa sangat beragam, misalnya sosial, budaya, maupun geografis. Selain permasalahan pendidikan topik lain yang dibahas adalah Program Penguatan Pendidikan Karakter dan Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan sebagai isu yang didiskusikan.

“Neraca Pendidikan Daerah ini sangat bermanfaat, baik bagi Pusat maupun Daerah. Bagi Pemerintah Daerah, data-data di NPD bisa dipakai dalam penyusunan program daerah

dan juga bahan untuk diskusi di Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan) Provinsi Kaltara,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara pada sesi pembukaan Diskusi Kelompok Terpumpun NPD dan NGTK pada 12 September 2017 lalu.

“Bahkan NPD harus bisa dipasang di setiap kantor dinas pendidikan, agar masyarakat bisa tahu,” tambah beliau.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh salah satu peserta DKT NPD dan NGTK di Maluku pada 5-6 Oktober 2017 lalu. “NPD harus diketahui oleh tiap stakeholder di Pemerintah Daerah mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota, DPR bahkan Dewan Pendidikan agar mereka sadar akan pentingnya data dalam penyusunan kebijakan pendidikan di daerah.”

Ada lagi komentar yang berbeda dari Pius A. Batlyare, peserta DKT Maluku yang merupakan pengelola PKBM Ngrias Melar dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat, “saya senang diikutsertakan dalam kegiatan diskusi NPD dan NGTK ini, saya menjadi tahu tentang data-data pendidikan di Maluku. Ini membuat saya semakin peduli dan makin terlibat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Maluku. NPD dan NGTK diharapkan bisa menjadi acuan prioritas pembangunan pendidikan bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kolaborasi pengembangan pembangunan pendidikan antara pemerintah pusat Pemerintah daerah dan masyarakat akan berujung pada terselenggaranya pendidikan bermutu dan akses yang merata secara nasional. ■



Cuplikan film televisi (FTV) "Sarmin" produksi TVE di tahun 2017.

TV EDUKASI : MENGEDUKASI LEWAT TELEVISI

Pemanfaatan media televisi sejatinya dapat menjadi pilihan untuk menggiatkan interaksi yang diharapkan terjadi dalam ekosistem pendidikan

Perkembangan TIK memerlukan penentuan sikap yang bijak dalam memanfaatkannya. Salah satu tema yang terdapat dalam rencana strategis Kemendikbud adalah ekosistem pendidikan. Arah pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang melibatkan berbagai elemen yang saling berinteraksi juga menuntut kebijaksanaan seluruh pihak untuk secara bersama-sama berkontribusi pada proses pendidikan, khususnya pembelajaran, sesuai kapasitas masing-masing elemen.

Interaksi dan antar pelaku pendidikan atau pemangku kepentingan di bidang pendidikan menjadi kata kunci dalam sebuah ekosistem pendidikan. Interaksi yang dimaksud dalam sebuah ekosistem pendidikan tentu saja membutuhkan sarana komunikasi yang tepat agar dapat berlangsung efektif. Pemanfaatan media televisi sejatinya dapat menjadi pilihan untuk menggiatkan interaksi yang diharapkan terjadi dalam ekosistem pendidikan. Sebagai salah satu media elektronik Kemendikbud, TV Edukasi (TVE) menjadikan tema ekosistem

pendidikan sebagai tantangan dan kesempatan untuk lebih berkontribusi dalam memfasilitasi interaksi antar pelaku pendidikan (khususnya pembelajaran) dengan segenap potensi yang dimiliki.

Pengembangan program-program TVE dalam mendukung tujuan pendidikan nasional, termasuk berkontribusi pada perwujudan Nawacita. Nilai-nilai yang tertuang dalam Nawacita tersebut selanjutnya menjadi rujukan bagi tim perancangan dan produksi program TVE dalam merancang program berbasis video (televisi). Kategori program seperti Film Televisi (FTV), Pendidikan Karakter, Kerja Sama, Eksplorasi, Budaya, Motivasi, Instruksional, Tutorial Talkshow, Pemberitaan, hingga Iklan Layanan Masyarakat. Pengembangan program TVE selain melibatkan warga pendidikan seperti guru, siswa, sekolah, lembaga kursus, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang terkait sebagai wujud kerja sama di antara pelaku pendidikan dalam mengembangkan konten-konten pendidikan yang dapat

dimanfaatkan oleh warga pendidikan dan masyarakat umum.

Kekuatan dan potensi televisi sebagai sarana menyampaikan konten pendidikan dimanfaatkan untuk pengembangan konten pendidikan berbasis TIK. Program FTV misalnya, mengembangkan ide cerita dari sosok inspiratif yang menjadikan pendidikan sebagai “fondasi” untuk membangun manusia yang cerdas dan berakhlak. Nilai-nilai karakter juga dikuatkan pada setiap FTV yang sudah diproduksi sejak tahun 2012. FTV teranyar (produksi 2016) berjudul SARMIN, berlatar belakang di Wonogiri, Jawa Tengah, dan TANAH CITA-CITA, berlatar belakang di Bima, Nusa Tenggara Barat, mengangkat ide dasar Pendidikan dan orang-orang yang memegang teguh prinsip akan pentingnya pendidikan serta semangat juang dalam kondisi apapun. Keragaman latar belakang yang diambil tersebut juga merupakan upaya memperkenalkan keragaman Indonesia yang kaya dan aneka. Kekuatan media iklan juga disasar untuk melakukan sosialisasi mengenai informasi maupun nilai-nilai baik kepada masyarakat melalui produksi program-program iklan layanan masyarakat yang tema-temanya terkait pendidikan karakter, literasi (TIK), dan sebagainya.

Penguatan pendidikan karakter juga menjadi rujukan dalam pengembangan program sinetron Laskar Anak Bawang (tahun 2017) yang mendasarkan tema-tema di setiap episodenya pada 18 nilai karakter, diantaranya kejujuran, nilai-nilai patriotisme, cinta Tanah Air, semangat bela Negara, gotong royong, budi pekerti dan lainnya. Tokoh-tokoh yang ditampilkan pada sinetron juga menggambarkan keragaman bangsa Indonesia dan potensi anak-anak Indonesia yang beragam. Program motivasional juga mengusung nilai-nilai inspiratif yang dimiliki seseorang dan semangat untuk memberi manfaat bagi lingkungan sekitar sesuai kapasitas yang dimiliki.

Program budaya menjadi sarana TVE dalam memperkenalkan kebinekaan Indonesia dari aspek budaya, baik dilihat dari sudut pandang seni musik, seni tari, tradisi, kuliner, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Potensi daerah, seperti di Sebatik (Kalimantan Utara), Sumba (Nusa Tenggara Timur), Pulau Simeulue (Aceh), Lebak (Banten), Sijunjung (Sumatera Barat) dan lainnya dieksplorasi untuk kemudian ditampilkan sisi edukasinya melalui program kerja sama

dan eksplorasi yang melibatkan LIPI, ITB, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Daerah, dan lainnya.

Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan diwujudkan TVE melalui program instruksional dan tutorial talkshow. Sebagai core business, video instruksional menjadi trademark TVE sebagai produsen video pembelajaran. Pengembangan video instruksional memfasilitasi guru dan siswa untuk mendapatkan aneka sumber belajar berbasis video yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Manfaat TVE ini juga dirasakan oleh guru SMP Muhammadiyah 1 Surabaya, Ibu Roro Martiningsih yang memanfaatkan TVE dalam proses belajar-mengajar. “Sekolah kami memanfaatkan TVE dalam pembelajaran, baik itu streaming atau secara langsung. Sebelumnya kami mendownload jadwal terlebih dahulu, dan apabila ada kesulitan kami selalu lapor, bagaimana tentang pembelajaran berbasis TVE,” ungkap beliau.

Sejak 2013, TVE menjadi bagian dalam sosialisasi Kurikulum 2013 dalam pelatihan bagi guru-guru menggunakan media video, yaitu untuk menghadirkan model/ strategi pembelajaran berbasis Kurikulum 2013. Selain itu, tahun 2017 arah pengembangan TVE ditujukan untuk mengangkat potensi sekolah menengah kejuruan serta literasi. Kebijakan terkait Penguatan Pendidikan Karakter dan Literasi menjadi “warna” dalam pemberitaan yang disajikan redaksi TVE dalam menyebarluaskan kebijakan tersebut.

Hal ini disetujui oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Purwadi Sutanto, “Insya Allah ke depan akan kita tingkatkan untuk bekerja sama menyediakan bahan ajar, untuk anak-anak di daerah yang memang sulit terjangkau bahan ajar.”

Pada akhirnya, konten-konten yang telah dan akan dikembangkan melalui TVE akan lebih bermakna apabila masyarakat dapat dengan mudah mengakses konten-konten tersebut dan mendapat manfaat serta nilai dari konten-konten yang ada. Dukungan strategis dalam hal kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan budaya menjadi komponen kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan TVE dan konten-konten yang dimilikinya. ■



RUMAH BELAJAR : BELAJAR DIMANA SAJA, KAPAN SAJA

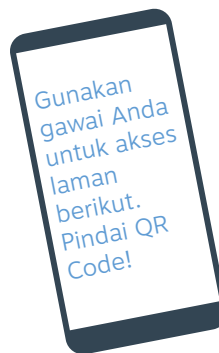
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di abad ke-21 atau abad teknologi ini begitu pesat. Perkembangan ini menciptakan tantangan-tantangan baru dalam proses belajar mengajar. Permasalahan yang makin kompleks menuntut kesiapan dunia pendidikan untuk mengantisipasinya. Informasi dan pengetahuan yang semakin beragam dan mudah penyebarannya menuntut pendidik dan peserta didik untuk dapat mempergunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu perubahan teknologi yang cepat harus disertai dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dalam hal ini pendidik, peserta didik dan masyarakat, dalam memanfaatkan teknologi pada kehidupan sehari-hari.

Selama ini pendidik atau tenaga pendidik menghadapi banyak tantangan dalam proses penyelenggaraan pembelajaran. Salah satu

tantangan yang sering dihadapi oleh pendidik atau tenaga kependidikan adalah kesulitan menuntaskan pelaksanaan kurikulum, termasuk dengan adanya penyesuaian dan perubahan kurikulum 2013, serta tuntutan sertifikasi pendidik sebagai upaya peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik.

Peserta didik juga masih kesulitan memperoleh bahan ajar dan media ajar mandiri yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan dapat diatasi dengan adanya portal Rumah Belajar. Rumah Belajar memfasilitasi beraneka ragam bentuk sumber belajar yang dapat digunakan siswa atau guru dalam mengembangkan proses belajar-mengajar. Tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan, rumah belajar juga mempunyai fitur yang berhubungan dengan bahasa dan kebudayaan.





Kelas Maya

Sarana pembelajaran dan tutorial daring bagi siswa dan guru. Guru dan siswa bisa belajar bersama dalam satu wadah diskusi atau mengerjakan tugas secara daring.



Sumber belajar

Berisi bahan belajar interaktif, video, dan audio yang bisa diakses oleh berbagai pihak; <https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar/>.



Bank Soal

Kumpulan soal yang dapat dimanfaatkan untuk latihan, ulangan harian, dan ujian, sehingga dapat juga difungsikan guru sebagai sumber untuk evaluasi pembelajaran.



Pengembangan Keprofesian

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), yaitu sarana diklat daring untuk tutor, fasilitator, dan peserta diklat (<http://diklat.belajar.kemdikbud.go.id>);



Laboratorium Maya

Kumpulan simulasi untuk persiapan praktikum di laboratorium.



Buku Sekolah Elektronik (BSE)

Penyediaan buku sesuai kurikulum secara digital (<http://bse.kemdikbud.go.id>);



Peta Budaya

Konten kebudayaan Indonesia yang tersaji dalam bentuk peta.



Wahana Jelajah Luar Angkasa

Sarana menjelajah angkasa daring yang interaktif (<http://www.belajar.kemdikbud.go.id/>)



Karya Komunitas

Wadah kumpulan karya-karya dari berbagai kalangan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan budaya.

Rumah Belajar juga menyediakan tautan ke portal pembelajaran lainnya, yaitu Anugerah Kihajar, Klinik Konsultasi Pembelajaran, Sekolah Menengah Terbuka, dan Klub Pompei, TV Edukasi, Klub Pompei, dan m-Edukasi. Rumah Belajar dapat dimanfaatkan peserta didik, pendidik, mahasiswa, dosen dan masyarakat luas. Portal Rumah Belajar ini pula diharapkan menjadi milik komunitas, dengan pengisian konten dan aktivitas dari dan untuk komunitas belajar.

Penggunaan Rumah Belajar Terus Diperluas

Agar dapat dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin kalangan, Kemendikbud berusaha untuk memperluas akses rumah belajar ke segala kalangan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pelatihan pada guru, pengawas dan kepala sekolah di 33 provinsi. Pada setiap pelatihan ini, masing-masing unsur di atas dilatih untuk menggunakan fitur yang ada dalam Rumah Belajar.

“Rumah Belajar menjadi hal yang dibutuhkan. Tampilan Rumah Belajar seakan menunjukkan sebagai rumah untuk belajar dengan fitur-fitur yang mendukung proses belajar. Belajarnya pun tak monoton, karena banyak pilihannya,” ujar salah satu siswa di SMAN 26 Tangerang yang sudah menggunakan fasilitas Rumah Belajar dalam proses belajar-mengajar.

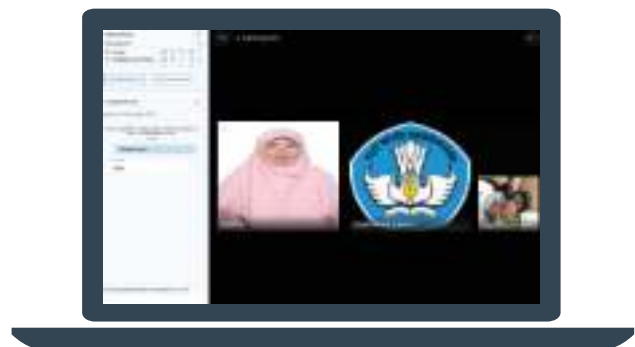
“Rumah Belajar juga dapat digunakan siswa sebagai sarana latihan Ujian Nasional, terutama yang berbasis komputer. Siswa dapat berlatih membiasakan diri mengerjakan tugas nasional dengan komputer sehingga membuat dirinya lebih tenang dalam mengerjakan Ujian Nasional,” ujar salah satu guru di SMAN 2 Banjar.

Rumah Belajar juga digunakan untuk peningkatan kapasitas guru. Kemendikbud dan yayasan sosial kemanusiaan Wahana Visi Indonesia (WVI) menjalin kerja sama peningkatan kapasitas guru dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan, khususnya bagi guru sekolah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur.

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari program DIGITAL, Develop Generation with Information Technology Learning, sebuah program yang diinisiasi oleh WVI dan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dan siswa dalam mengembangkan materi belajar berbasis TIK.

Sinergi yang Kemendikbud dan WVI lakukan adalah dengan menyelenggarakan rangkaian fasilitasi pemanfaatan TIK untuk pendidikan bagi tiga puluh orang guru yang berasal dari enam SD dan SMP di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Jatinegara memang sudah ditetapkan sebagai target program DIGITAL oleh WVI. Penyelenggaraan awal fasilitasi berlangsung pada tanggal 28 dan 29 Juli 2017 di kantor Pustekkom, Ciputat. Kegiatan ini berfokus pada pembuatan RPP yang mengintegrasikan pemanfaatan TIK dan portal Rumah Belajar.

Program DIGITAL sendiri sudah diluncurkan secara resmi sehari sebelum fasilitasi. Peluncuran program dilakukan di SMPN 243 Jatinegara dan diresmikan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud, Drs. Wowon Widaryat, M.Si. “Kami mendorong seluruh kepala sekolah dari keenam sekolah (peserta program DIGITAL di Jatinegara) untuk terus memelihara dan menggunakan alat sesuai peruntukkan program secara bertanggung jawab, serta aktif dalam mengikuti pelatihan, studi banding, eksebisi, kompetisi, baseline, serta evaluasi seperti yang sudah ada pada rencana program ini.” sebagaimana oleh Direktur Wowon.



Fitur tatap muka menghubungkan guru dan siswa secara daring.

TUNAS INTEGRITAS SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

Senyum sumringah masih terlihat dari muka Bapak dan Ibu yang mengikuti workshop di LPMP DKI Jakarta. Workshop tersebut merupakan salah satu rangkaian dari workshop Tunas Integritas yang merupakan salah satu implementasi dari reformasi birokrasi di Indonesia.

Tunas integritas adalah predikat seseorang yang telah mengikuti Workshop Tunas Integritas yang merupakan program Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Desain workshop tunas integritas dirancang oleh Tim Fasilitator Deputi Pencegahan KPK untuk mengarahkan proses berpikir peserta menjadi lebih mengenal budaya kerja organisasi dan memunculkan sikap anti korupsi. Workshop ini menggunakan pendekatan *Inside Out* yaitu menumbuhkan kesadaran dari dalam hati sanubari pegawai dan menghasilkan perilaku yang mulia dan anti korupsi. Pendekatan *Inside Out* lebih banyak melibatkan peserta dalam proses diskusi dan perenungan nilai-nilai dan tidak banyak menggunakan stimulasi dari luar seperti efek musik, pencahayaan ruangan, dan sistem suara sebagaimana digunakan oleh Lembaga pelatihan yang menggunakan pendekatan *Outside In*.

Kondisi yang melatarbelakangi inisiatif KPK untuk membentuk tunas-tunas integritas adalah merebaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara massif dan sistemik. Korupsi saat ini telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan dan sebagian di antaranya menduduki jabatan strategis. Korupsi juga berdampak besar terhadap posisi daya saing bangsa yang saat ini masih belum beranjak dari status negara berkembang. Oleh karena itu untuk memberantas korupsi diperlukan orang-orang luar biasa yang disebut dengan istilah Tunas Integritas.

Sejak tahun 2013 sudah terselenggara workshop tunas integritas sebanyak 31 angkatan dan telah menghasilkan tunas integritas sebanyak 771 orang. Jumlah tersebut merupakan tunas integritas terbanyak di seluruh Kementerian/Lembaga. Hal ini menjadi bukti bahwa komitmen Kemendikbud dalam mencegah korupsi sangat tinggi. Berdasarkan data per unit utama maka jumlah tunas integritas terbanyak berasal dari Sekretariat Jenderal sebanyak 178 orang. Secara detail data jumlah tunas integritas per unit utama adalah sebagai berikut



Tunas-tunas integritas sebanyak 771 orang atau sekitar 0,048% tentu masih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah pegawai Kemendikbud yang berjumlah 16.000 orang. Hal ini karena harapan yang diamanahkan kepada para tunas integritas ini adalah untuk menjadi penyemai nilai-nilai kebaikan terutama nilai budaya kerja, garda terdepan pembuat perubahan positif, dan membangun sikap mental anti korupsi. Harapan besar tersebut tentunya amat berat untuk diemban oleh para tunas integritas, namun tentu berbuat kebaikan walaupun sedikit akan jauh lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa.

Herdiana, Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Umum Kemendikbud, merupakan salah satu peserta workshop tunas integritas menyampaikan bahwa: “pelaksanaan workshop tunas integritas sangat bermanfaat terutama bagi saya adalah semacam recharge kembali tentang integritas yang sesungguhnya kalau tidak di recharge, sadar atau tidak akan luntur terbawa arus pelaksanaan kegiatan praktis sehari-hari yang kadang tanpa disadari melakukan pembenaran-pembenaran yang sedikit banyak bisa melenceng dari nilai integritas yang sebenarnya”.

Selain Herdiana, Maryanto, Kepala Bidang Pengendalian dan Penghargaan, Pusat Pembinaan, Badan Bahasa yang juga telah mengikuti workshop tunas integritas menyampaikan bahwa setelah mengikuti workshop Maryanto berharap : “agar kita semua sebagai aparatur negara yang bekerja mengabdikan diri kepada bangsa melalui Kemendikbud semakin berintegritas; pikiran dan ucapan makin dekat kesesuaiannya dengan hati nurani yang makin bersih dan positif untuk

membangun negara-bangsa ini”.

Para tunas integritas dibekali dengan internalisasi nilai-nilai budaya kerja Kemendikbud meliputi Integritas, Kreatif, Inovatif, Meritokrasi, Pembelajar, Aktif, Inisiatif, dan Tanpa Pamrih.

Dengan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai tersebut maka diharapkan aparatur Kemendikbud dapat menjiwai dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, kantor, maupun di masyarakat luas. Tunas integritas menjadi contoh teladan aparatur Kemendikbud yang bermarwah tinggi mencerminkan pribadi yang berpendidikan dan berkebudayaan. Para tunas integritas diharapkan dapat menjadi motor penggerak perubahan di Kementerian.

Di samping pembekalan tata nilai budaya kerja Kemendikbud, para Tunas Integritas juga dibekali nilai-nilai anti korupsi versi KPK yang dirumuskan berdasarkan penelitian. Ada 10 nilai yang bila diterapkan akan mewujudkan sikap anti korupsi yaitu Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggungjawab, Kerja keras, Sederhana, Berani, Adil, dan Sabar. Nilai-nilai tersebut terus didiskusikan sepanjang proses pembelajaran dalam workshop tunas integritas. Pada akhirnya tunas integritas membuat pernyataan komitmen untuk menjadi model dan agen perubahan, serta mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang jumlah tunas integritasnya lebih banyak dari Kementerian lainnya, tentu memiliki harapan dapat berubah dan lebih baik daripada Kementerian lain. Dengan idealisme dan semangat besar dari para tunas integritas, perubahan inovatif Kemendikbud akan lebih terjamin berjalan sesuai arah dan visinya.



PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI INTERNAL KEMENDIKBUD

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu Kementerian yang paling banyak mendapat sorotan publik, utamanya karena kinerja Kemendikbud sangat berdampak strategis terhadap kemaslahatan publik dan menentukan harkat martabat bangsa sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi mandat bagi Kemendikbud yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Untuk itu masyarakat mengharapkan Kemendikbud dapat memberikan kinerja terbaik dalam hal penyediaan layanan pendidikan bermutu dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat secara mudah.

Pemerintah saat ini fokus pada upaya perbaikan tata kelola menuju pemerintahan bertata kelola baik (*Good Governance*). Dengan demikian instansi pemerintah termasuk Kemendikbud dapat menyediakan layanan bermutu dan berkinerja secara efektif, efisien serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kemendikbud sejak tahun 2014 hingga saat ini terus aktif mengimplementasikan Reformasi Birokrasi Internal (RBI) secara intensif dan berkesinambungan. Program RBI memiliki 2 komponen terdiri dari komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%). Komponen pengungkit adalah upaya-upaya konkret Kemendikbud dalam meningkatkan mutu tatakelola, sistem dan prosedur, serta pelayanan publik. Di sisi lain, komponen hasil adalah pandangan masyarakat terhadap kinerja dan layanan Kemendikbud yang diukur oleh lembaga independen dan kompeten. Dengan kata lain komponen pengungkit merupakan upaya Kemendikbud dengan pengendalian penuh, sedangkan komponen hasil merupakan hasil penilaian pihak eksternal yang harus diterima apa adanya.

Komponen pengungkit meliputi 8 area perubahan dengan komposisi bobot persentase berbeda-beda dalam rangka memudahkan pengukuran. Kedelapan area perubahan

tersebut terdiri dari Manajemen Perubahan (5%), Penataan Peraturan Perundang-undangan (5%), Penguatan Organisasi (6%), Penataan Tatalaksana (5%), Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (15%), Penguatan Akuntabilitas (6%), Penguatan Pengawasan (12%), dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6%). Dari kedelapan area perubahan tersebut, ada 2 area yang bobotnya sangat besar yaitu Penataan Sistem Manajemen SDM dan Penguatan Pengawasan.

Komponen hasil meliputi 3 area yaitu kapasitas dan kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kualitas pelayanan publik. Area kapasitas dan kinerja organisasi dinilai oleh Kementerian PAN dan RB. Area pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan. Area kualitas pelayanan publik dinilai oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Di samping adanya nilai indeks RB, Kementerian PAN dan RB juga mendorong Kementerian untuk mencanangkan diri sebagai Zona Integritas. Hal ini menjadi bukti bagi publik bahwa Kementerian telah menunjukkan komitmen kuat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Selanjutnya Kementerian didorong untuk membentuk unit-unit percontohan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal ini merupakan perwujudan dari konsep pulau-pulau integritas (*Island of Integrity*). Kemen-PAN dan RB mengharapkan dengan adanya WBK yang diduplikasikan menjadi semakin banyak di setiap Kementerian, maka Kementerian akan semakin baik tata kelolanya dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam kerangka program RBI, Kemendikbud telah dicanangkan sebagai Zona Integritas pada tanggal 6 Oktober 2015 di gedung Ki Hajar Dewantara oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disaksikan oleh Menteri PAN dan RB, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi,

Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dan Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sejak diterapkannya program-program RBI, Kemendikbud telah melakukan banyak perubahan. Terkait kepegawaian, Kemendikbud sudah melakukan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama dan telah menyelenggarakan asesmen pegawai yang menghasilkan pengelompokan kapasitas pegawai. Dalam hal manajemen, Kemendikbud sudah menerapkan dan terus mengembangkan pemerintahan elektronik (*E-Government*). Dalam hal layanan publik, Kemendikbud juga telah membentuk Unit Layanan Terpadu sejak tahun 2015. Inspektorat Jenderal Kemendikbud telah mencapai level III (Terintegrasi) dalam model

kapabilitas organisasi Audit Internal (Internal Audit Capability Model).

Sejak tahun 2014 nilai indeks RB Kemendikbud menunjukkan tren positif. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Kemendikbud telah berhasil menerapkan program RB.

Pada tahun 2017 Kemendikbud telah menetapkan 35 satuan kerja menjadi unit percontohan WBK. Dari ke-35 satuan kerja tersebut, Tim Evaluator Kemen-PAN dan RB telah melakukan penilaian terhadap 19 satuan kerja. Hasil akhir akan menetapkan satker yang ditetapkan secara resmi sebagai WBK diumumkan pada Hari Anti Korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember 2017.



Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2017, Kementerian mengajak masyarakat untuk merayakannya dalam berbagai kegiatan selama satu bulan. Rangkaian kegiatan dinamai Bulan Pendidikan dan Kebudayaan, yang diawali dengan olahraga bersama dan panggung hiburan di halaman Kemendikbud pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Minggu 30 April 2017.





KONSISTENSI KEMENDIKBUD DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN

Laporan Keuangan Kemendikbud tahun 2016 mendapat penilaian dengan predikat tertinggi dari BPK RI yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyusunan Laporan Keuangan Kemendikbud mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku umum bagi Kementerian Negara/Lembaga, yang dihasilkan melalui proses yang sistematis dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI). SAI merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, transaksi keuangan, BMN, dan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta penatausahaan BMN, dengan tujuan antara lain untuk:

Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Kemendikbud, sebagai dasar penilaian kinerja;

Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan satuan kerja, unit utama, maupun Kemendikbud secara keseluruhan;

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan kemendikbud;

Menjaga aset atau kekayaan Kemendikbud melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai



dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan kementerian/lembaga yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan : 1) standar akuntansi pemerintahan, 2) kecukupan pengungkapan, 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) efektivitas sistem pengendalian intern. Performa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan salah satu wujud Reformasi Birokrasi Internal yang merupakan implementasi dari Revolusi Mental di kalangan Pemerintah. Performa ini akan terus Kemdikbud pertahankan dengan menjaga sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel. ■



KEMENDIKBUD



KERJA CERDAS DENGAN E-OFFICE

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak akhir tahun 2011, telah mengembangkan Aplikasi Persuratan Elektronik atau disebut e-office. Aplikasi Persuratan Elektronik merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu pengelolaan persuratan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan konsep setiap tahapan proses dalam pengelolaan Persuratan dilakukan secara elektronik sehingga dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama tersedia koneksi internet.

Dengan aplikasi ini, proses pengelolaan persuratan menjadi lebih efektif dan efisien, kemudian permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan persuratan, seperti kehilangan surat, keterlambatan penyampaian informasi dan pemborosan penggunaan kertas dapat dikurangi secara signifikan.

“Dengan adanya e-office distribusi disposisi surat masuk dari kepala ke kepala seksi hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, jadi e office sangat mengefisienkan waktu bekerja dan yang pasti HEMAT kertas”, ungkap Sri Ariani, Pengadministrasi Persuratan, LPMP Sulawesi Tengah.

Pemutakhiran aplikasi persuratan elektronik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Di tahun 2017, pengembangan aplikasi difokuskan untuk mengakomodir pengguna dengan mobilitas tinggi. Saat ini aplikasi persuratan elektronik, selain dapat diakses melalui web di alamat <https://persuratan.kemdikbud.go.id>, juga telah tersedia dalam bentuk aplikasi khusus untuk perangkat komunikasi bergerak berbasis android dan iOS, sehingga dapat memudahkan pengguna dalam melakukan aktivitas persuratan melalui telepon genggam atau komputer tablet.

“Dengan adanya e-office, sangat membantu pekerjaan saya yang terkadang juga harus mobile mendampingi pimpinan diluar kantor. Proses surat bisa selesai dalam 1 hari.

Penyampaian surat pun hanya butuh waktu beberapa menit dan tindaklanjut surat oleh penerima disposisi langsung terpantau sehingga kontrolnya mudah. Semoga e-office bisa semakin dirasakan manfaatnya oleh teman-teman di unit lain. Sehingga pelayanan maksimal dapat diberikan kepada masyarakat.”. Ujar Drs. Amin N. Nusi, M.Pd, pejabat LPMP Gorontalo

Saat ini tercatat sebanyak 41 dari 49 satker pusat dan 50 dari 149 UPT di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah memanfaatkan minimal salah satu dari fitur-fitur penunjang persuratan yang tersedia di aplikasi persuratan elektronik.

Rencana pengembangan aplikasi persuratan elektronik di tahun 2018 adalah pemanfaatan teknologi tanda tangan digital untuk memudahkan proses pembuatan dan penandatanganan surat. Peningkatan kehandalan dan keamanan juga menjadi prioritas pengembangan seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna aplikasi persuratan elektronik. Ditargetkan pertengahan 2018, semua satker Kemendikbud sudah mengimplementasikan penuh aplikasi persuratan elektronik. ■

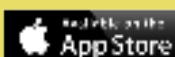


<https://persuratan.kemdikbud.go.id>



Kini hampir semua pegawai Kemendikbud telah menggunakan aplikasi e-office untuk meningkatkan kinerjanya. Memeriksa surat, undangan rapat, memberikan disposisi bisa dilakukan kapan pun.

Lebih Cepat. Lebih Baik. Lebih Cerdas.

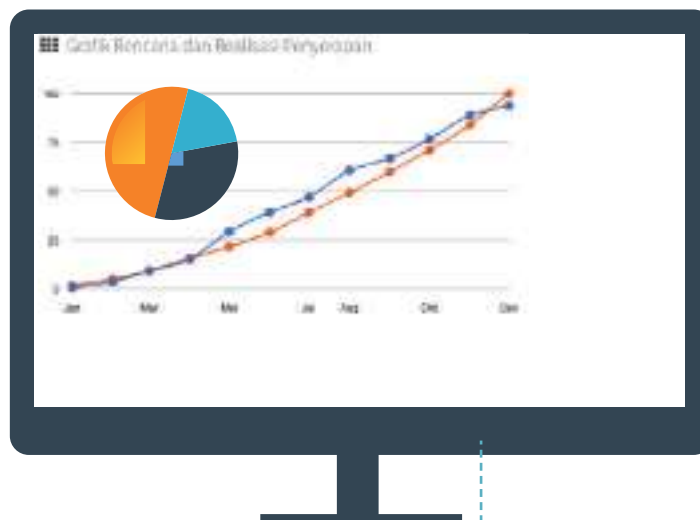


MONITORING ONLINE LAPORAN KEUANGAN (MOLK) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN KEMENDIKBUD

Saat ini untuk memantau daya serap anggaran sangat mudah dikarenakan adanya Sistem Informasi Manajemen Keuangan Kemendikbud (MoLK SIMKeu) yang dikembangkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemendikbud. MoLK SIMKeu merupakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola di bidang keuangan. Sistem tersebut mampu menyajikan data dan informasi pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan secara online dan *realtime*; menyajikan Laporan Keuangan; dan mengevaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Tujuan dari MoLK SIMKeu ini adalah:

Untuk memonitoring realisasi anggaran dan realisasi fisik berdasarkan SPM/SP2D secara online dan *realtime*, Per Eselon-1/Satker/Output/



Komponen/Sub Komponen/
Akun;

Sebagai alat kontrol pimpinan dalam mempercepat dan mengendalikan pelaksanaan anggaran;

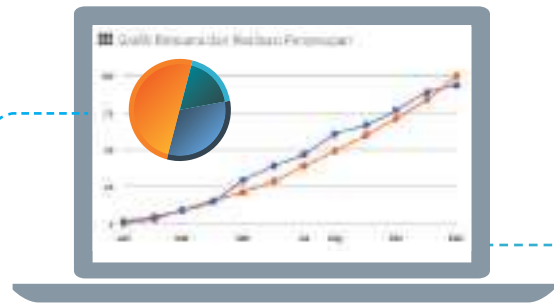
Memberikan informasi mengenai kinerja pelaksanaan anggaran, kegiatan, dan pencapaian keluaran.

Meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemendikbud.

MoLK SIMKeu saat ini telah digunakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kemendikbud dan membantu jajaran pimpinan di Kemendikbud untuk memastikan bahwa realisasi anggaran telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perencanaan.

“MoLK sangat membantu tata kelola keuangan dalam memantau realisasi anggaran serta memantau pelaksanaan pencairan keuangan” ujar Rusprita, Kasubbag Tata Usaha PASKA.

Biro Keuangan sebagai penanggung jawab MoLK SIMKeu akan terus mengembangkan sistem informasi ini agar tata kelola di bidang keuangan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini juga merupakan salah satu usaha Kemendikbud dalam mereformasi birokrasi agar bisa lebih transparan. ■





PENUTUP

Alhamdulillah, telah sampai penghujung laporan ini. Banyak yang telah kami hadapi, banyak yang telah kami lalui, selama perjalanan setahun. Namun, terasa masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, karenanya masih membutuhkan uluran tangan banyak pihak. Bersyukur atas dukungan semua pihak selama setahun ini.

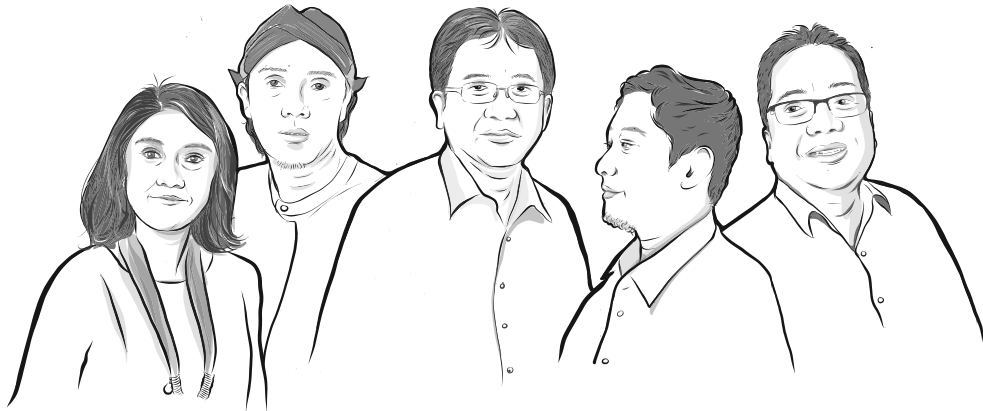
Demi kualitas yang lebih baik di tahun yang akan datang, marilah kita niatkan untuk kerja bersama yang berkelanjutan dan lebih kokoh. Kita niatkan untuk Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR AKRONIM

APK	: Angka Partisipasi Kasar	Puskurbuk	: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
ASEAN	: Association of South East Asia Nation	RKB	: Ruang Kelas Baru
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri	RUU	: Rancangan Undang-Undang
Bimtek	: Bimbingan Teknis	SARA	: Suku, Agama, Ras dan Antargolongan
BOP	: Bantuan Operasional Pendidikan	SDM	: Sumber Daya Manusia
CLC	: Community Learning Centre	SKB	: Sanggar Kegiatan Belajar
BK	: Bimbingan Konseling	SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
BKK	: Bursa Kerja Khusus	SKL	: Standar Kompetensi Lulusan
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi	SMALB	: Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
BSNP	: Badan Standar Nasional Pendidikan	SQ	: Spiritual Quotient
DAK	: Dana Alokasi Khusus	ToT	: Training of Trainer
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan	TBM	: Taman Baca Masyarakat
DUDI	: Dunia Usaha dan Dunia Industri	TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
FFI	: Festival Film Indonesia	TUK	: Tempat Uji Kompetensi
FTV	: Film Televisi	UNBK	: Ujian Nasional Berbasis Komputer
GGD	: Guru Garis Depan	UNKP	: Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil
GLN	: Gerakan Literasi Nasional	UNESCO	: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
HOTS	: Higher Order Thinking Skills	UPT	: Unit Pelaksana Teknis
KD	: Kompetensi Dasar	US	: Ujian Sekolah
KI	: Kompetensi Inti	USB	: Unit Sekolah Baru
KIP	: Kartu Indonesia Pintar	USBN	: Ujian Sekolah Berstandar Nasional
KIS	: Kartu Indonesia Sehat	USO	: Universal Service Obligation
KKG	: Kelompok Kerja Guru	UU Sisbuk	: Undang-Undang Sistem Perbukuan
KKP	: Kawah Kepemimpinan Pelajar	WBTB	: Warisan Budaya Tak Benda
KS	: Kepala Sekolah	WHCI	: World Heritage Camp Indonesia
LKP	: Lembaga Kursus dan Pelatihan	WSC	: World Skill Competition
LPMP	: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan		
LPTK	: Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat		
LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi		
LSP-P1	: Lembaga Sertifikasi Profesi – Pihak Pertama		
LSP-P2	: Lembaga Sertifikasi Profesi – Pihak Kedua		
MGMP	: Musyawarah Guru Mata Pelajaran		
MKKS	: Musyawarah Kerja Kepala Sekolah		
NISN	: Nomor Induk Siswa Nasional		
NPSN	: Nomor Pokok Sekolah Nasional		
OGN	: Olimpiade Guru Nasional		
PBSR	: Pameran Besar Seni Rupa		
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Mengajar		
PMR	: Palang Merah Remaja		
PPG	: Pendidikan Profesi Guru		
PPDB	: Penerimaan Peserta Didik Baru		
PPK	: Penguatan Pendidikan Karakter		
PPPPTK	: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
PS	: Pengawas Sekolah		

KREDIT FOTO

Halaman	Nama	Halaman	Nama
Cover	Dokumentasi Kemendikbud	112-115	Dokumentasi Kemendikbud
III	Azis Purwanto	117	Dokumentasi Kemendikbud
XII-XIII	Azis Purwanto	120-123	Dokumentasi Kemendikbud
XIV	Azis Purwanto	124	Azis Purwanto
1	Ridwan Maulana	125-126	Ridwan Maulana
2	Azis Purwanto	127-130	Dokumentasi Kemendikbud
3	Ridwan Maulana	131	Ridwan Maulana
7-11	Ridwan Maulana	132-135	Dokumentasi Kemendikbud
13-16	Ridwan Maulana	136-137	Ridwan Maulana
17-19	Dokumentasi Kemendikbud	138	Dokumentasi Kemendikbud
20	Azis Purwanto	146-147	Azis Purwanto
24-26	Azis Purwanto	150-154	Dokumentasi Kemendikbud
29	Azis Purwanto	157	Dokumentasi Kemendikbud
32-33	Azis Purwanto	161	Azis Purwanto
35-36	Dokumentasi Kemendikbud	163	Azis Purwanto
37	Azis Purwanto	165	Azis Purwanto
38-39	Ridwan Maulana	168-169	Dokumentasi Kemendikbud
40-41	Azis Purwanto	171	Azis Purwanto
43-49	Dokumentasi Kemendikbud	177	Dokumentasi Kemendikbud
50-51	Ridwan Maulana	179	Dokumentasi Kemendikbud
52	Dokumentasi Kemendikbud	180-181	Azis Purwanto
54-56	Azis Purwanto	183	Azis Purwanto
59	Azis Purwanto		
60-61	Dokumentasi Kemendikbud		
64-65	Dokumentasi Kemendikbud		
69	Azis Purwanto		
69	Annisa Dwi Astuti		
70-72	Edhy Tua Ginulywan		
74	Ridwan Maulana		
77	Ridwan Maulana		
78	Azis Purwanto		
79-81	Dokumentasi Kemendikbud		
84-85	Agi Bahari		
86-87	Dokumentasi Kemendikbud		
88-89	Azis Purwanto		
91	Azis Purwanto		
92	Dokumentasi Kemendikbud		
94	Ridwan Maulana		
98	Jilan Rifai		
100	Dokumentasi Kemendikbud		
102	Azis Purwanto		
104	Jilan Rifai		
105-107	Dokumentasi Kemendikbud		
108-110	Dokumentasi Kemendikbud		



| TERIMA KASIH

PASKA mengapresiasi bantuan banyak pihak, terutama kontributor dari semua unit utama di lingkungan Kemendikbud. Juga para staf ahli dan staf khusus Mendikbud; atas kerja sama yang baik, kita bisa selesaikan buku ini.

Buku ini adalah buah #kerjabersama kita semua.

Salam





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

